

**SEKTOR PERIKANAN, PELABUHAN PERIKANAN
SAMUDERA (PPS) CILACAP DAN PEMBANGUNAN
REGIONAL KABUPATEN CILACAP**

TESIS

YUNI TRIKUMORO WATI

0706 299 366



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
DEPOK
JANUARI 2009**

**SEKTOR PERIKANAN, PELABUHAN PERIKANAN
SAMUDERA (PPS) CILACAP DAN PEMBANGUNAN
REGIONAL KABUPATEN CILACAP**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister

YUNI TRIKUMORO WATI
0706 299 366



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
DEPOK
JANUARI 2009

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Yuni Trikumoro Wati

NPM : 0706299366

Tanda Tangan : 

Tanggal : Januari 2009

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Yuni Trikumoro Wati
NPM : 0706299366
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Judul Tesis : Sektor Perikanan, Pelabuhan Perikanan
Samudera (PPS) Cilacap dan Pembangunan
Regional Kabupaten Cilacap

Telah berhasil dipertahankan di depan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi pada Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Suahasil Nazara

(*Suahasil Nazara*)

Penguji : Prof. Dr. Mangara Tambunan

(*M Mangara Tambunan*)

Penguji : Dr. Andi Fahmi

(*Andi Fahmi*)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 7 Januari 2009

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yuni Trikumoro Wati
NPM : 0706299366
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Departemen : Ekonomi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Sektor Perikanan, Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap dan Pembangunan Regional Kabupaten Cilacap

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : Januari 2009
Yang menyatakan



(Yuni Trikumoro Wati)

ABSTRAK

Nama : Yuni Trikumoro Wati
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Judul : Sektor Perikanan, Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) dan
Pembangunan Regional Kabupaten Cilacap

Sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki peranan dalam pembangunan ekonomi nasional, khususnya dalam penyediaan bahan pangan protein, perolehan devisa dan penyediaan lapangan pekerjaan. Jika pemanfaatannya dioptimalkan akan dapat meningkatkan produk domestik bruto dan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan sub sektor perikanan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia sangat memungkinkan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sektor Perikanan, Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap dan Pembangunan Regional Kabupaten Cilacap. Selain itu untuk mengetahui kecamatan yang menjadi pendorong kegiatan perekonomian. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, Location Quotient, Tabel Input Output Regional dengan memakai Input Output Jawa Tengah tahun 2004, Analisis Tipologi Daerah.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi sub sektor perikanan di kabupaten Cilacap masih rendah, hal ini disebabkan kurang perhatian pemerintah padahal potensi yang ada di Cilacap masih cukup besar untuk dikembangkan. Keberadaan PPS Cilacap telah memberikan dampak bagi usaha perikanan maupun usaha lain. Kecamatan yang dapat dijadikan pendorong untuk peningkatan pembangunan ekonomi Kabupaten Cilacap adalah kecamatan Dayeuhluhur, Sidareja, Sampang, Cilacap Selatan, Cilacap Utara, Cimanggu, Wanareja dan Jeruklegi.

Kata kunci : Perikanan, Location Quotient, Input Output Regional, Tipologi Daerah.

ABSTRACT

Name : Yuni Trikumoro Wati
Study Program : Master's of Planning and Public Policy
Title : Fisheries Sector, Cilacap Oceanic Fishing Port and Regional Development of Cilacap Region

Marine and fishery sector is one of the economic sectors that have a role in national economic development, especially in the provision of food, protein, income and the provision of employment. If the utilization could be optimized, it will be able to increase the gross domestic product and the welfare of the community. The development of the fisheries sub-sector as a new source of economic growth in Indonesia is very possible. This research was conducted to know fisheries sector, Cilacap Oceanic Fishing Port and Regional Development of Cilacap region. In addition to knowing the district which become the economic activities promotor. Analysis used in this research is descriptive analysis, Location Quotient, Regional Input Output Table by using the Input Output of Central Java in 2004, the Regional Analysis typology.

Results from this research indicates that the contribution of the fisheries sub-sector in the Cilacap district is still low, this is less government attention on the potential that exists in Cilacap is still big enough to be developed. The presence of Cilacap Oceanic Fishing Port has impact for the business of fisheries and other businesses. Subdistrict, which can be used as the stimulus for increased economic development of Cilacap region is Dayeuhluhur, Sidareja, Sampang, South Cilacap, North Cilacap, Cimanggu, Wanareja and Jeruklegi.

Keywords: Fisheries, Location Qoutient, Input Output of Regional, Klassen Typology

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Terwujudnya tesis ini dari awal sampai selesai tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, masukan, dorongan dan semangat. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Pusbindiklatren Bappenas yang telah memberikan beasiswa untuk mengambil studi di Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik.
2. Dr. Suahasil Nazara selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran dalam mengarahkan dan membimbing sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
3. Bapak/Ibu dosen yang sudah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama mengikuti kuliah di MPKP.
4. Teman-teman angkatan XVII yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik langsung maupun tidak langsung.
5. Seluruh keluarga khususnya suami, anak-anakku, bapak dan ibu atas doa dan dukungannya.

Semoga tesis ini bermanfaat bagi para pembaca.

Depok, Januari 2009

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR GRAFIK.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Permasalahan	7
1.3 Tujuan Penulisan.....	7
1.4 Ruang Lingkup	7
1.5 Sistematika Penulisan	7
2. TINJAUAN TEORITIS.....	9
2.1 Pengaruh Infrastruktur (Pelabuhan Perikanan) terhadap Pertumbuhan Ekonomi	9
2.2 Sumber Pertumbuhan Ekonomi.....	14
2.3 Pembangunan Ekonomi Daerah	18
2.4 Peranan Pemerintah Mendorong Investasi.....	19
2.5 Pentingnya Membangun <i>Economic Based</i>	21
3. METODOLOGI.....	23
3.1 Analisis Input Output.....	24
3.1.1 Koefisien Input Output atau Koefisien Teknis	27
3.1.2 Analisis Input Output Regional	27
3.2 Statistik Deskriptif.....	28
3.3 Location Quotient.....	29
3.4 Tipologi Klassen atau Tipologi Daerah	31
4. KONDISI EKONOMI DAN INFRASTRUKTUR KABUPATEN CILACAP.....	32
4.1 Keadaan Umum Kabupaten Cilacap	32
4.2 Kondisi Infrastruktur Daerah.....	33
4.2.1 Infrastruktur	33
4.2.2 Air bersih, Listrik dan Energi	34
4.3 Perkembangan Perekonomian Kabupaten Cilacap	34
4.4 Kondisi Perikanan di Kabupaten Cilacap	36
	viii

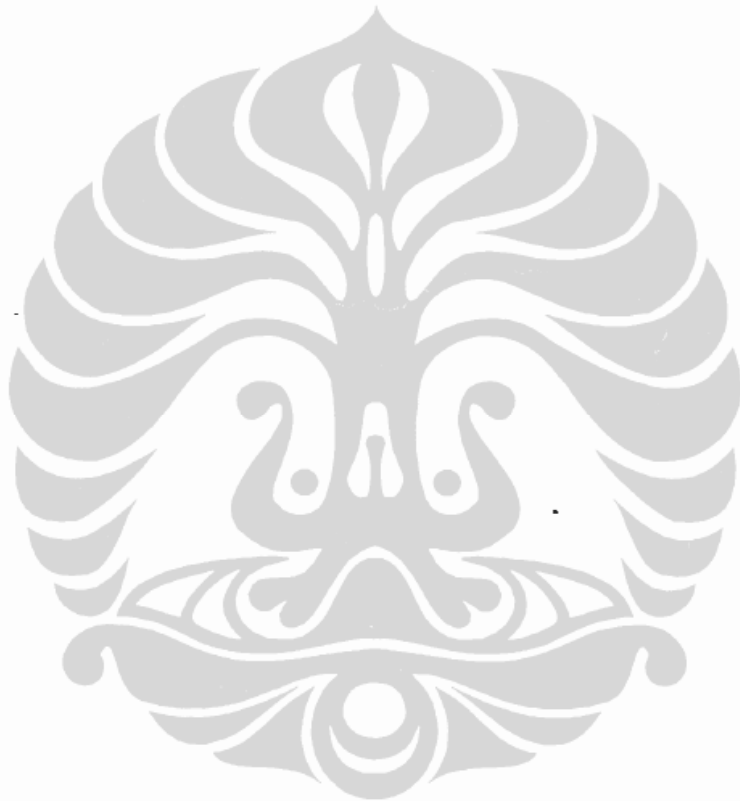
4.5	Kondisi Fisik dan Fasilitas PPS Cilacap.....	40
5.	SEKTOR PERIKANAN, PPS CILACAP DAN PEMBANGUNAN REGIONAL KABUPATEN CILACAP	44
5.1	Analisis Input Output Regional	44
	5.1.1 <i>Output Multiplier</i>	44
	5.1.2 Keterkaitan Antarsektor.....	45
5.2	Input Output untuk Perikanan	47
	5.2.1 Struktur Input Antara	47
	5.2.2 Struktur Permintaan Antara	48
	5.2.3 Struktur Output	49
5.3	Keragaan Operasional PPS Cilacap	50
	5.3.1 Produksi dan Nilai Produksi Hasil Tangkapan	51
	5.3.2 Armada Penangkap Ikan (Kapal)	53
	5.3.3 Alat Tangkap.....	55
	5.3.4 Nelayan	56
	5.3.5 Tenaga Kerja yang Terserap	56
	5.3.6 Perkembangan Investasi Pemerintah di PPS Cilacap	57
	5.3.7 Jenis Produk, Volume dan Nilai Ekspor Komoditi Perikanan Cilacap	58
	5.3.8 Kegiatan Ekonomi	60
	5.3.9 Pelaksanaan Kebijakan	61
5.4	Analisis Location Quotient	62
5.5	Kontribusi Sektor-sektor Ekonomi dalam PDRB Cilacap.....	64
5.6	Kawasan Andalan/Prioritas di Kabupaten Cilacap.....	64
5.7	Analisis Tipologi Daerah	66
6.	PENUTUP	
6.1	Kesimpulan.....	70
6.2	Saran	71
	DAFTAR PUSTAKA.....	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	PDRB Propinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Cilacap Tahun 2000-2001.....	1
Tabel 2.1	Perbedaan Konsep Lama dan Konsep Baru Pembangunan Ekonomi.....	19
Tabel 3.1	Tabel Transaksi Input Output.....	25
Tabel 3.2	Klasifikasi Daerah dengan Analisis Tipologi Daerah.....	31
Tabel 4.1	Nilai PDRB Kecamatan Tahun 2001 dan 2005 Atas Dasar Harga Konstan 2000 (dalam juta Rp).....	35
Tabel 4.2	Potensi Lestari dan Tingkat Pemanfaatan Sumberdaya Ikan di WPP Samudera Hindia (IX), 2000.....	37
Tabel 4.3	Potensi dan Produksi Perikanan Indonesia.....	38
Tabel 4.4	Usaha Penangkapan Ikan di Cilacap.....	39
Tabel 4.5	Fasilitas PPS Cilacap.....	41
Tabel 5.1	Keterkaitan ke Belakang dan Keterkaitan ke Muka.....	45
Tabel 5.2	Perkembangan masuk dan keluarnya kapal di PPS Cilacap.....	54
Tabel 5.3	Jenis dan Jumlah Alat Tangkap di PPS Cilacap.....	55
Tabel 5.4	Perkembangan Jumlah Nelayan di PPS Cilacap.....	56
Tabel 5.5	Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Terserap di PPS Cilacap.....	57
Tabel 5.6	Perkembangan investasi Pemerintah di PPS Cilacap.....	57
Tabel 5.7	Jenis Produk, Volume dan Nilai Ekspor Komoditi Perikanan Cilacap.....	59
Tabel 5.8	Kegiatan Ekonomi di PPS Cilacap.....	61
Tabel 5.9	Nilai Location Qoutient PDRB Kabupaten Cilacap.....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan Pengembangan Perikanan dengan Pertumbuhan Ekonomi.....	5
Gambar 3.1	Kerangka Berpikir.....	23
Gambar 4.1	Peta Kabupaten Cilacap.....	33



DAFTAR GRAFIK

Grafik 5.1	Perbandingan Produksi Hasil Tangkapan di PPS Cilacap dengan TPI se-Kabupaten Cilacap.....	51
Grafik 5.2	Perbandingan nilai Produksi di PPS Cilacap dengan TPI se-Kabupaten Cilacap.....	53
Grafik 5.3	Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor.....	60
Grafik 5.4	Posisi Perekonomian Kecamatan di Kabupaten menurut Topologi Daerah.....	67



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Transaksi Total atas Dasar Harga Produsen Prop Jawa Tengah 19 x 19
- Lampiran 2. Transaksi Total atas Dasar Harga Produsen Jawa Tengah
- Lampiran 3. Koefisien Teknis
- Lampiran 4. Penyesuaian Koefisien Teknis
- Lampiran 5. Output Multiplier
- Lampiran 6. Tabel Transaksi Kabupaten Cilacap
- Lampiran 7. Produksi dan Nilai Produksi PPS Cilacap dan TPI se-Kabupaten Cilacap
- Lampiran 8. PDRB Jawa Tengah Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Tahun 2000-2006
- Lampiran 9. PDRB Kabupaten Cilacap Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2000-2006
- Lampiran 10. Kontribusi Sektor pada PDRB Kabupaten Cilacap
- Lampiran 11. PDRB dan LQ Kecamatan Dayeuhluhur
- Lampiran 12. PDRB dan LQ Kecamatan Wanareja
- Lampiran 13. PDRB dan LQ Kecamatan Majenang
- Lampiran 14. PDRB dan LQ Kecamatan Cimanggu
- Lampiran 15. PDRB dan LQ Kecamatan Karangpucung
- Lampiran 16. PDRB dan LQ Kecamatan Cipari
- Lampiran 17. PDRB dan LQ Kecamatan Sidareja
- Lampiran 18. PDRB dan LQ Kecamatan Kedungreja
- Lampiran 19. PDRB dan LQ Kecamatan Patimuan
- Lampiran 20. PDRB dan LQ Kecamatan Gandrungmangu
- Lampiran 21. PDRB dan LQ Kecamatan Bantarsari
- Lampiran 22. PDRB dan LQ Kecamatan Kawunganten
- Lampiran 23. PDRB dan LQ Kecamatan Jeruklegi
- Lampiran 24. PDRB dan LQ Kecamatan Kesugihan
- Lampiran 25. PDRB dan LQ Kecamatan Adipala
- Lampiran 26. PDRB dan LQ Kecamatan Maos
- Lampiran 27. PDRB dan LQ Kecamatan Sampang
- Lampiran 28. PDRB dan LQ Kecamatan Kroya
- Lampiran 29. PDRB dan LQ Kecamatan Binangun
- Lampiran 30. PDRB dan LQ Kecamatan Nusawungu
- Lampiran 31. PDRB dan LQ Kecamatan Cilacap Selatan
- Lampiran 32. PDRB dan LQ Kecamatan Cilacap Tengah
- Lampiran 33. PDRB dan LQ Kecamatan Cilacap Utara
- Lampiran 34. Perhitungan LQ rata-rata kecamatan di Kabupaten Cilacap 2001-2005

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Cilacap merupakan kabupaten terluas di Propinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah mencapai 2138,5 Km² atau 6,69 % dari luas propinsi Jawa Tengah. Salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi yang diperlukan untuk evaluasi dan perencanaan ekonomi makro, biasanya dilihat dari pertumbuhan angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cilacap dan Propinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 PDRB Propinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Cilacap Tahun 2000-2001

Tahun	PDRB Jawa Tengah	Pertumbuhan	PDRB Kabupaten Cilacap	Pertumbuhan
2000	114,701,304.81	-	14,049,884.54	-
2001	118,816,400.29	3.59	14,748,667.72	4.97
2002	123,038,541.13	3.55	16,015,937.32	8.59
2003	129,166,462.45	4.98	17,029,165.05	6.33
2004	135,789,872.31	5.13	18,162,397.85	6.65
2005	143,051,213.88	5.35	19,565,221.06	7.72
2006	150,682,654.74	5.33	20,543,344.49	5.00

Sumber : BPS, data diolah

Dari tabel 1.1 di atas terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cilacap lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi di Propinsi Jawa Tengah, tetapi pada tahun 2006 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten mengalami penurunan dibanding tahun 2005 walaupun dilihat PDRB-nya mengalami peningkatan.

Kabupaten Cilacap berada di pinggir pantai dengan garis pantai terbagi dua yaitu Segara Anakan dengan panjang 96,6 Km dan garis pantai yang berhadapan dengan Samudera Hindia sepanjang 105 Km. Letak Kabupaten Cilacap yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia menyebabkan

Kabupaten Cilacap memiliki potensi pengembangan yang cukup besar di bidang perikanan tangkap maupun perikanan budidaya.

Menurut Suara Pembaruan (2000) Cilacap bercita-cita menjadi Kota Nelayan. Sesuai dengan mottonya Jala Bhumy Wijaya Kusuma Cakti, jala berarti air, bhumy adalah tanah daratan, wijaya kusuma berarti bunga dan cakti adalah kejayaan, maka simbol kota yang terletak paling selatan di Pulau Jawa itu bermakna kemampuan membudidayakan bumi, laut, air untuk kemakmuran. Dalam memasuki era globalisasi, Cilacap secara khusus mulai menata sektor perikanan dengan melakukan pendekatan-pendekatan dengan berbagai pihak, termasuk pengusaha, agar ikut ambil bagian menjadikan Cilacap sebagai kota nelayan terbesar di Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap memberikan kesempatan kepada investor untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah lewat pelayanan serta kemudahan yang berkaitan dengan penanaman modal. Untuk mencapai tujuan tersebut, berbagai fasilitas pendukungnya sudah tersedia seperti sarana perhubungan laut, darat, udara, telekomunikasi dan akomodasi.

Pemerintah semakin mengarahkan pada upaya peningkatan keterlibatan swasta, sebab peranannya sangat dominan berkaitan dengan pemanfaatan atau potensi yang ada, yang membutuhkan investasi yang tidak mungkin dibiayai pemerintah. Kabupaten Cilacap sangat potensial menjadi kota nelayan karena selain punya kawasan zona industri dan pariwisata, Cilacap dalam sejarahnya, terkenal karena pelabuhan lautnya. Pelabuhan Cilacap dibangun pada tahun 1888 oleh Bupati RMAA Tjakrawerdya. Sebelum Perang Dunia II, Pelabuhan Cilacap termasuk salah satu di antara lima pelabuhan terbesar di Indonesia dan merupakan satu-satunya pelabuhan di pantai selatan Pulau Jawa. Pelabuhan Cilacap dibenahi secara terus-menerus untuk meningkatkan fungsi pelabuhan sebagai terminal laut yang tangguh dan sebagai daerah pengembangan industri dan ekonomi yang mantap. Barulah pada tanggal 18 Juni 1969, Pelabuhan Cilacap ditetapkan sebagai pelabuhan laut yang dibuka untuk perdagangan umum luar negeri. Dan tanggal 13 Desember 1980, Pelabuhan Cilacap ditetapkan sebagai pelabuhan Kelompok A, dapat melayani kegiatan bongkar-muat barang maupun hewan, keluar-masuk kapal 24 jam sehari semalam. Pada 24 Oktober

1983, berdasarkan surat keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 200/OT/001/PHB.83, Pelabuhan Cilacap ditetapkan menjadi Pelabuhan Kelas II dalam lokasi Provinsi Jawa Tengah.

Rencana besar menjadikan Cilacap sebagai kota nelayan perlu diberikan acungan jempol karena akan sangat menguntungkan bagi kehidupan nelayan khususnya dan pemerintah daerah pada umumnya. Dengan terwujudnya Cilacap sebagai Kota Nelayan, diharapkan akan berkembang berbagai industri yang berkaitan dengan keperluan para nelayan, tersedia berbagai peralatan mulai dari kapal berukuran kecil sampai keperluan jaring dan alat-alat penangkap ikan modern. Apabila Kota Nelayan berhasil tercipta, maka dengan sendirinya wilayah Cilacap secara berangsur-angsur semakin makmur karena pertumbuhan ekonomi akan mengikuti perkembangan yang terjadi. Cilacap sebenarnya kaya, sebagai kota kabupaten tingkat II, sudah memiliki pelabuhan udara, laut, perikanan, dan sarana-sarana pendukungnya serta hotel-hotel berbintang. Oleh karena itu, Cilacap juga sebenarnya bisa berkembang lebih pesat lagi kalau pemanfaatan alamnya terkelola dengan baik dan terencana. Dengan tersedianya fasilitas dan pendukung seperti Tempat Pelelangan Ikan (TPI), ada pabrik es, bahan bakar minyak dan beberapa industri perikanan, tentulah sangat membantu nelayan. Nelayan yang ada sekarang masih kekurangan dan bahkan masih tradisional dan kurang memahami cara-cara menangkap ikan yang benar, kurang pengetahuan tentang cuaca, dan paham bermanajemen. Kalau ini semua sudah ditingkatkan, mereka kelak akan menjadi nelayan profesional.

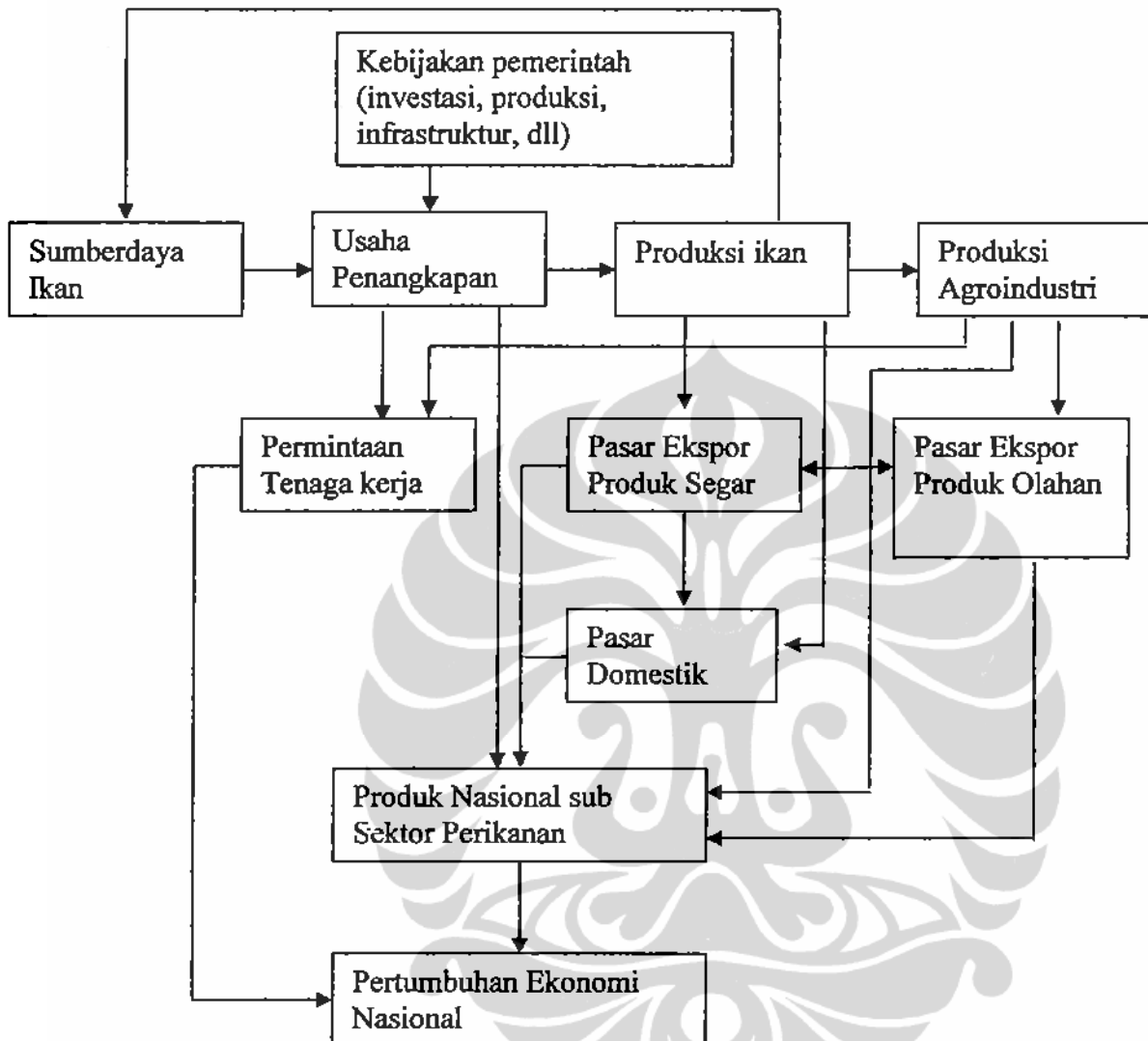
Berdasarkan penelitian Rahayu (2006) wilayah pesisir selatan sangat terbatas ketersediaan sarana dan prasarana fisik yang mendukung perekonomian, sehingga mendorong masyarakat di wilayah pesisir selatan bekerja di daerah lain. Tenaga kerja yang ada banyak terserap di sektor primer karena pilihan pekerjaan yang terbatas serta pekerjaan ini tidak memerlukan pendidikan khusus. Dukungan Sumber Daya alam yang besar tetapi tidak didukung oleh sarana dan prasarana seperti pasar lelang ikan, dermaga, prasarana jalan menyebabkan potensi Sumber Daya Alam tidak berkembang.

Pembangunan perikanan harus diarahkan menjadi perikanan maju, efisien dan tangguh yaitu mampu memanfaatkan sumberdaya secara optimal, mampu

menyesuaikan pola dan struktur produksi, dan mampu berperan positif dalam pembangunan wilayah serta mempertahankan pelestarian sumberdaya dan lingkungan hidup. Tujuan yang harus dicapai oleh pembangunan perikanan antara lain : 1) pemenuhan kebutuhan konsumsi produk perikanan, 2) peningkatan perolehan devisa, 3) peningkatan produksi perikanan sesuai dengan potensi lestari dan daya dukung lingkungan, 4) pemeliharaan kelestarian stok ikan dan 5) peningkatan kesejahteraan nelayan dan petani ikan (Mulyadi, 2007)

Pengembangan sub sektor perikanan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia sangat memungkinkan karena : 1) potensi sumberdaya perikanan tersedia cukup besar dan belum sepenuhnya dimanfaatkan, 2) sebagai bahan baku protein hewani dan bahan baku industri domestik belum separuhnya dimanfaatkan, 3) beberapa komoditas perikanan mempunyai keunggulan komparatif di pasar Internasional dan 4) kemampuan menyerap tenaga kerja, meningkatkan dan meratakan pendapatan masyarakat (Soemokaryo, 2001).

Secara teoritis keterkaitan pengembangan sub sektor perikanan dengan pertumbuhan ekonomi nasional disajikan dalam Gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1 Keterkaitan Pengembangan Perikanan dengan Pertumbuhan Ekonomi

Produk hasil perikanan dibagi dalam tiga golongan (sesuai potensi nilai ekonomi dan potensi pasar Internasional) yaitu tuna-cakalang, udang dan jenis ikan lain. Produksi ikan segar ini sebagian diolah untuk produk olahan (agroindustri) dan sebagian diekspor dan sisanya untuk konsumsi domestik. Gambar 1.1 menunjukkan keterkaitan umum antara sumberdaya, produksi, usaha penangkapan, kebijakan pemerintah dan pasar. Keterkaitan ini berpengaruh terhadap GDP sub sektor perikanan dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional.

Perikanan tangkap atau usaha penangkapan merupakan salah satu bentuk pemanfaatan sumberdaya perikanan. Faktor yang cukup mendasar untuk pengembangan usaha perikanan tangkap ini adalah dengan tersedianya prasarana untuk berlabuh/berlindung bagi kapal-kapal perikanan (*fishing base*) dan mendaratkan hasil tangkapannya. Prasarana yang dimaksud adalah berupa Pelabuhan Perikanan (PP) atau Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) sebagai tempat/pangkalan bagi kapal-kapal perikanan.

Pelabuhan perikanan ini harus dikembangkan sehingga mampu menampung seluruh perahu/kapal yang memerlukan fasilitas kepelabuhanan. Pembangunan prasarana pelabuhan perikanan pada hakekatnya dilakukan dalam rangka sentralisasi kegiatan usaha perikanan, sehingga dapat dilakukan usaha perikanan pada skala ekonomis yang efisien dan sekaligus memanfaatkan dampak dari aglomerasi kegiatan ekonomi yang terjadi di dalamnya. Hal ini karena keberadaan pelabuhan perikanan membawa dampak ganda (*multiplier effect*) terhadap kegiatan usaha lain, baik yang berbasis pada usaha penangkapan ikan sendiri, maupun bidang usaha lainnya.

Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap merupakan salah satu bentuk pelabuhan perikanan di Indonesia yang dibangun oleh pemerintah dan terletak di tepi Samudera Indonesia yang mempunyai peranan penting dalam memberikan pelayanan di bidang perikanan laut. PPS Cilacap dibangun mulai tahun 1991 berdasarkan SK Menko Ekuin dan Wasbang Nomor Kep.09/M.EKUIIN/1990 tanggal 24 Maret 1990. Pada awalnya statusnya Pelabuhan Perikanan Nusantara sesuai dengan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, 16 Agustus 1995. Namun dalam perkembangan selanjutnya meningkat statusnya menjadi Pelabuhan Perikanan tipe Samudera berdasarkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 86/M/PAN/4/2001 tanggal 4 April 2001 (Demersal, 2007).

PPS Cilacap diharapkan dapat sebagai pusat pengembangan masyarakat nelayan. Selain itu PPS Cilacap juga dituntut untuk menyediakan berbagai kemudahan untuk mendapatkan berbagai fasilitas yang menunjang keberhasilan usaha perikanan. PPS Cilacap merupakan salah satu lokasi pengembangan dan

pembangunan PP/PPI di lingkaran luar wilayah Indonesia (*Outer Ring Fishing Port*).

1.2 Perumusan Permasalahan

Dari latar belakang di atas, maka ada dua perumusan masalah penting yang akan dijawab dalam tulisan ini, yaitu :

1. Bagaimana peranan sektor Perikanan dan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap terhadap perekonomian Kabupaten Cilacap?
2. Bagaimana arah pembangunan regional Kabupaten Cilacap?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisa dan mengetahui peranan sektor Perikanan dan PPS Cilacap terhadap perekonomian Kabupaten Cilacap.
2. Mengetahui arah pembangunan regional Kabupaten Cilacap sehingga dapat diperoleh kecamatan yang dapat menjadi pendorong bagi kegiatan perekonomian di Kabupaten Cilacap.

1.4 Ruang lingkup

Data yang digunakan pada penelitian meliputi data PPS Cilacap tahun 1997 – 2006, PDRB Kabupaten Cilacap 2000-2006 dan PDRB Kecamatan di Kabupaten Cilacap tahun 2001-2005 serta Tabel Input Output Propinsi Jawa Tengah tahun 2004 .

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan berisi latar belakang penelitian, perumusan permasalahan, tujuan penulisan, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II Tinjauan Teoritis mengenai pengertian pertumbuhan ekonomi, pengaruh infrastruktur (Pelabuhan Perikanan) terhadap pertumbuhan ekonomi, sumber pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi daerah, peranan pemerintah mendorong investasi, pentingnya membangun *economic based*.
- Bab III Metodologi.
- Bab IV Kondisi Ekonomi dan Infrastruktur Kabupaten Cilacap
- Bab V Sektor Perikanan, PPS Cilacap dan Pembangunan Regional Kabupaten Cilacap.
- Bab VI Penutup berisi Kesimpulan dan Saran.



BAB II TINJAUAN TEORITIS

Tinjauan teoritis yang digunakan pada penelitian ini meliputi :

2.1 Pengaruh Infrastruktur (Pelabuhan Perikanan) terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Dahuri (2000) dalam Kamarijah (2003) kondisi pembangunan perikanan Indonesia yang diinginkan adalah suatu pembangunan perikanan yang dapat memanfaatkan sumberdaya ikan beserta ekosistem perairannya untuk kesejahteraan umat manusia, terutama nelayan dan petani ikan, secara berkelanjutan (*on sustainable basis*). Pembangunan perikanan pada tingkat regional pada dasarnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu tujuannya bertumpu pada kepentingan nasional secara utuh. Selanjutnya dikatakan bahwa apabila profil (visi) pembangunan perikanan ini dijabarkan ke dalam tujuan pembangunan, maka ada lima tujuan yang harus dicapai oleh pembangunan perikanan nasional :

- a. Pemenuhan kebutuhan konsumsi produk perikanan untuk dalam negeri.
- b. Peningkatan perolehan devisa
- c. Peningkatan produksi perikanan sesuai dengan potensi lestari dan daya dukung lingkungan
- d. Pemeliharaan kelestarian stok ikan dan daya dukung lingkungannya
- e. Peningkatan kesejahteraan nelayan dan petani ikan.

Pembangunan Pelabuhan Perikanan sangat mutlak dibutuhkan dalam menunjang keberhasilan pembangunan perikanan. Pembangunan Pelabuhan Perikanan diperlukan terutama dalam upaya memberikan dukungan pada kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya serta diharapkan dapat mengembangkan pusat pertumbuhan baru, dapat dijadikan prime mover di sektor perikanan dan kelautan terutama dalam (PPN Brondong, 2006):

- a. Peningkatan penerimaan devisa melalui perluasan ekspor hasil perikanan;
- b. Peningkatan penerimaan negara dan daerah melalui pemanfaatan sumberdaya ikan dan peningkatan pelayanan publik;
- c. Perbaikan gizi masyarakat melalui peningkatan konsumsi ikan;
- d. Peningkatan pendapatan nelayan melalui pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat;
- e. Peningkatan kesempatan kerja melalui pengembangan industri perikanan.

Menurut UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, definisi pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

Untuk mengatur pelaksanaan UU No. 31/2004 tentang Perikanan tersebut, telah dikeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.16/MEN/2006 tanggal 23 Juni 2006 tentang Pelabuhan Perikanan, yang mengatur beberapa hal berikut :

- a. Rencana induk pelabuhan perikanan secara nasional disusun dengan mempertimbangkan : daya dukung sumberdaya ikan yang tersedia, daya dukung sumberdaya manusia, wilayah pengelolaan perikanan (WPP), rencana tata ruang wilayah propinsi/kabupaten/kota, dukungan prasarana wilayah, geografis wilayah dan kondisi perairan.
- b. Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan rencana induk secara nasional.
- c. Pemerintah menyelenggarakan dan membina pelabuhan perikanan yang dibangun oleh pemerintah, BUMN maupun perusahaan swasta.
- d. Pemerintah, BUMN maupun perusahaan swasta yang akan membangun pelabuhan perikanan wajib mengikuti rencana induk pelabuhan perikanan secara nasional dan peraturan pelaksanaannya.
- e. Pembangunan pelabuhan perikanan dilaksanakan melalui pentahapan *study, investigation, detail design, construction, operation* dan *maintenance* (SIDCOM).

- f. Selain pemerintah, pihak swasta dapat membangun dan mengoperasikan pelabuhan perikanan.
- g. Klasifikasi pelabuhan perikanan dibagi ke dalam 4 klas, yakni Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS), Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).
- h. Setiap pembangunan pelabuhan perikanan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Menteri Kelautan dan Perikanan. Lokasi pembangunan pelabuhan perikanan ditetapkan oleh bupati/walikota setempat.
- i. Pengelolaan pelabuhan perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Pelabuhan. Kepala Pelabuhan Perikanan bertindak sebagai koordinator tunggal dalam menyelenggarakan pelabuhan perikanan.

Menurut Lubis (2002), fungsi pelabuhan perikanan dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni ditinjau dari pendekatan kepentingan dan pendekatan aktivitas. Berdasarkan pendekatan kepentingan, fungsi pelabuhan perikanan adalah :

- a. Fungsi maritim, dimana pelabuhan perikanan merupakan suatu tempat terjadinya kontak bagi nelayan dan/atau pemilik kapal, antara laut dan daratan melalui penyediaan kolam pelabuhan dan dermaga.
- b. Fungsi pemasaran, dimana pelabuhan perikanan merupakan suatu tempat awal untuk mempersiapkan pemasaran produk perikanan dengan melakukan transaksi pelelangan ikan.
- c. Fungsi jasa, dimana pelabuhan perikanan memberikan jasa – jasa pelabuhan mulai dari ikan didaratkan sampai ikan didistribusikan.

Sedangkan pendekatan aktivitas, fungsi pelabuhan perikanan adalah :

- a. Fungsi pendaratan dan pembongkaran, dalam hal ini pelabuhan perikanan lebih ditekankan sebagai (tempat) pemusatan sarana dan kegiatan pendaratan dan pembongkaran hasil tangkapan di laut.
- b. Fungsi pengolahan, dimana pelabuhan perikanan sebagai tempat membina peningkatan mutu serta pengendalian mutu ikan dalam menghindari kerugian pasca tangkap.

- c. Fungsi pemasaran, dimana pelabuhan perikanan berfungsi sebagai tempat untuk menciptakan mekanisme pasar yang menguntungkan atau mendapatkan harga yang layak bagi nelayan maupun pedagang.

Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.16/MEN/2006 tanggal 23 Juni 2006, Pelabuhan Perikanan diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) kelas yaitu :

- 1). Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) berdasarkan kriteria teknis :
 - a. Melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di laut teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan laut bebas;
 - b. Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 60 GT;
 - c. Panjang dermaga sekurang-kurangnya 300 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 3 m;
 - d. Mampu menampung sekurang-kurangnya 100 kapal perikanan atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 6.000 GT kapal perikanan sekaligus;
 - e. Ikan yang didaratkan sebagian untuk tujuan ekspor;
 - f. Terdapat industri perikanan.
- 2). Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) berdasarkan kriteria teknis :
 - a. Melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di laut teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
 - b. Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 30 GT;
 - c. Panjang dermaga sekurang-kurangnya 150 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 3 m;
 - d. Mampu menampung sekurang – kurangnya 75 kapal perikanan atau jumlah keseluruhan sekurang – kurangnya 2.250 GT kapal perikanan sekaligus;
 - e. Terdapat industri perikanan.
- 3). Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) berdasarkan kriteria teknis :
 - a. Melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial;

- b. Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang – kurangnya 10 GT;
 - c. Panjang dermaga sekurang – kurangnya 100 m, dengan kedalaman kolam sekurang – kurangnya minus 2 m;
 - d. Mampu menampung sekurang-kurangnya 30 kapal perikanan atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 300 GT kapal perikanan sekaligus.
- 4). Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) berdasarkan kriteria teknis :
- a. Melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan pedalaman dan perairan kepulauan;
 - b. Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 3 GT;
 - c. Panjang dermaga sekurang-kurangnya 50 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 2 m;
 - d. Mampu menampung sekurang-kurangnya 20 kapal perikanan atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 60 GT kapal perikanan sekaligus.

Perkembangan prasarana dan sarana perikanan di Indonesia sampai saat ini masih terkonsentrasi di wilayah Indonesia Bagian Barat. Data Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP, 2006) dan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan Indonesia (PIPP, 2006) menunjukkan bahwa lebih dari 50 % armada kapal dan pelabuhan perikanan terdapat di wilayah perairan Indonesia Bagian Barat, terutama di perairan Jawa dan Sumatera. Hal ini diduga kuat sebagai salah satu penyebab tingginya tingkat eksploitasi sumberdaya ikan di wilayah Indonesia Bagian Barat tersebut, terutama di perairan Jawa dan Sumatera. Oleh sebab itu dalam upaya pengembangan perikanan keberadaan prasaran dan sarana perikanan di wilayah Indonesia Bagian Timur hendaknya menjadi perhatian yang serius.

Pelabuhan perikanan merupakan sarana vital bagi perkembangan pembangunan perikanan nasional. Menurut catatan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan Indonesia (PIPP, 2006) sampai saat ini terdapat 670 unit pelabuhan di seluruh Indonesia, yang terdiri dari 5 unit Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS), 12 unit Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), 46 unit Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) dan 607 unit Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI).

2.2 Sumber Pertumbuhan Ekonomi

Menurut pandangan para ekonom klasik (Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus, dan John Stuart Mill), maupun ekonom neoklasik (Robert Solow dan Trevor Swan), ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu (1) jumlah penduduk, (2) jumlah stok barang modal, (3) luas tanah dan kekayaan alam, dan (4) tingkat teknologi yang digunakan (Sukirno, 1985). Smith mengatakan bahwa sumberdaya alam yang tersedia merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat (Arsyad, 1999). Todaro (1997) mengatakan bahwa proses pertumbuhan ekonomi mempunyai kaitan erat dengan perubahan struktural dan sektoral yang tinggi. Beberapa perubahan komponen utama struktural ini mencakup pergeseran secara perlahan-lahan aktivitas pertanian ke sektor nonpertanian dan dari sektor industri ke sektor jasa. Suatu wilayah yang sedang berkembang proses pertumbuhan ekonominya akan tercermin dari pergeseran sektor ekonomi tradisional yaitu sektor pertanian akan mengalami penurunan di suatu sisi dan peningkatan peran sektor nonpertanian di sisi lainnya.

Faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2004) adalah :

a. Tanah dan kekayaan alam lainnya

Kekayaan alam sesuatu negara meliputi luas dan kesuburan tanah, keadaan iklim dan cuaca, jumlah dan jenis hasil hutan dan hasil laut yang dapat diperoleh, jumlah dan jenis kekayaan barang tambang yang terdapat. Kekayaan alam akan dapat mempermudah usaha untuk mengembangkan perekonomian sesuatu negara, terutama pada masa-masa permulaan dari proses pertumbuhan ekonomi. Di dalam setiap negara dimana pertumbuhan ekonomi baru bermula terdapat banyak hambatan untuk mengembangkan berbagai kegiatan ekonomi di luar sektor utama (pertanian dan pertambangan) yaitu sektor di mana kekayaan alam terdapat. Kekurangan modal, kekuarangan tenaga ahli dan kekurangan pengetahuan para pengusaha untuk mengembangkan kegiatan ekonomi modern di satu pihak, dan terbatasnya pasar bagi berbagai jenis kegiatan ekonomi (sebagai akibat dari pendapatan

masyarakat yang sangat rendah) di lain pihak, membatasi kemungkinan untuk mengembangkan berbagai jenis kegiatan ekonomi.

Apabila negara tersebut mempunyai kekayaan alam yang dapat diusahakan dengan menguntungkan, hambatan yang baru saja dijelaskan akan dapat diatasi dan pertumbuhan ekonomi dipercepat. Kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan tersebut akan menarik pengusaha-pengusaha dari negara yang lebih maju untuk mengusahakan kekayaan alam tersebut. Modal yang cukup, teknologi dan teknik produksi yang modern, dan tenaga-tenaga ahli yang dibawa oleh pengusaha-pengusaha tersebut dari luar memungkinkan kekayaan alam itu diusahakan secara efisien dan menguntungkan.

b. Jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja

Penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu dapat menjadi pendorong maupun penghambat pada perkembangan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja, dan penambahan tersebut memungkinkan negara itu menambah produksi. Di samping itu sebagai akibat pendidikan, latihan dan pengalaman kerja, ketrampilan penduduk akan selalu bertambah tinggi. Hal ini akan menyebabkan produktivitas bertambah dan selanjutnya menimbulkan pertambahan produksi yang lebih cepat daripada pertambahan penduduk. Luasnya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara juga tergantung pada jumlah pengusaha dalam ekonomi.

Dorongan lain yang timbul dari perkembangan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi bersumber dari akibat pertambahan itu pada luas pasar. Perkembangan penduduk menyebabkan besarnya luas pasar dari barang-barang yang dihasilkan sektor perusahaan akan bertambah pula. Perkembangan penduduk akan menimbulkan dorongan pada penambahan produksi nasional dan tingkat kegiatan ekonomi. Akibat buruk pertambahan penduduk pada pertumbuhan ekonomi terutama dihadapi oleh masyarakat yang kemajuan ekonominya belum tinggi tetapi telah menghadapi masalah kelebihan penduduk.

Suatu negara dianggap menghadapi masalah kelebihan penduduk apabila jumlah penduduk tidak seimbang dengan faktor-faktor produksi lain yang tersedia, yaitu jumlah penduduk berlebihan. Akibat dari ketidakseimbangan

ini produktivitas marjinal penduduk rendah, yang berarti penambahan penggunaan tenaga kerja tidak akan menimbulkan penambahan dalam produk nasional, ataupun kalau ia bertambah, pertambahan tersebut terlalu lambat dan tidak dapat mengimbangi pertambahan penduduk. Apabila dalam perekonomian berlaku keadaan di mana pertambahan tenaga kerja tidak dapat menaikkan produksi nasional yang tingkatnya lebih cepat dari tingkat pertambahan penduduk, pendapatan per kapita akan menurun. Dengan demikian penduduk yang berlebihan akan menyebabkan kemakmuran masyarakat menurun.

c. Barang-barang modal dan tingkat teknologi

Barang-barang modal penting artinya dalam mempertinggi keefisienan pertumbuhan ekonomi. Dalam masyarakat yang belum maju sekalipun barang-barang modal besar peranannya dalam kegiatan ekonomi. Tanpa adanya alat-alat untuk menangkap ikan dan berburu, alat-alat untuk bercocok tanam dan mengambil hasil hutan, masyarakat yang belum maju akan menghadapi kesusahan yang lebih banyak lagi dalam mencari makanan sehari-hari. Pada masa kini pertumbuhan ekonomi dunia telah mencapai tingkat tinggi (jauh lebih modern daripada kemajuan yang dicapai oleh masyarakat yang belum berkembang). Barang-barang modal yang bertambah jumlahnya dan teknologi yang bertambah modern memegang peranan yang penting dalam mewujudkan kemajuan ekonomi yang tinggi tersebut.

Apabila hanya barang-barang modal saja yang bertambah, sedangkan teknologi tidak mengalami perkembangan, kemajuan yang tercapai jauh lebih rendah daripada yang dicapai sekarang. Tanpa adanya perkembangan teknologi, produktivitas barang-barang modal tidak akan mengalami perubahan dan tetap berada pada tingkat yang rendah. Oleh karena itu pendapatan per kapita hanya mengalami perkembangan yang sangat kecil. Kemajuan ekonomi yang berlaku di berbagai negara terutama ditimbulkan oleh kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi menimbulkan beberapa efek yang positif antara lain : dapat mempertinggi keefisienan kegiatan memproduksi suatu barang (menurunkan biaya produksi dan meningkatkan jumlah produksi), dapat menciptakan penemuan barang-barang baru yang

belum diproduksi sebelumnya (menambah barang dan jasa yang digunakan masyarakat), dan dapat meningkatkan mutu barang-barang yang diproduksi tanpa meningkatkan harganya.

Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau berkembang apabila tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi dibandingkan apa yang dicapai pada masa sebelumnya (Kuncoro, 2004). Artinya perkembangan baru tercipta apabila jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian tersebut menjadi bertambah besar pada tahun-tahun berikutnya.

Pertumbuhan ekonomi adalah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat.

Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan. Karena dengan harga konstan, pengaruh perubahan harga telah dihilangkan sehingga sekalipun angka yang muncul adalah nilai uang dari total output barang dan jasa, perubahan nilai PDB atau PDRB sekaligus menunjukkan perubahan jumlah kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan selama periode pengamatan (Rahardja dan Manurung, 2004). Adanya pertumbuhan ekonomi akan terjadi peningkatan kesejahteraan, kesempatan kerja, produktivitas dan distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi juga penting untuk mempersiapkan perekonomian menjalani kemajuan selanjutnya.

2.3 Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan Ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999). Tolok ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antarpenduduk, antardaerah dan antarsektor.

Masalah pokok dalam pembangunan daerah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal. Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses. Yaitu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru.

Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah -beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumberdaya-sumberdaya yang ada- harus mampu menaksir potensi sumberdaya-sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.

Perbedaan kondisi daerah membawa implikasi bahwa corak pembangunan yang diterapkan berbeda pula. Peniruan mentah-mentah pola kebijaksanaan yang

pernah diterapkan dan berhasil pada suatu daerah, belum tentu memberikan manfaat yang sama bagi daerah lainnya. Jika akan membangun suatu daerah, kebijakan yang diambil harus sesuai dengan dengan kondisi (masalah, kebutuhan, dan potensi) daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu, penelitian yang mendalam tentang keadaan tiap daerah harus dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang berguna bagi penentuan perencanaan pembangunan daerah yang bersangkutan.

2.4 Peranan Pemerintah Mendorong Investasi

Teori pembangunan yang ada sekarang ini tidak mampu untuk menjelaskan kegiatan-kegiatan pembangunan ekonomi daerah secara tuntas dan komprehensif. Oleh karena itu suatu pendekatan alternatif terhadap teori pembangunan yang dirumuskan di sini untuk kepentingan perencanaan pembangunan ekonomi. Pendekatan ini merupakan sintesis dan perumusan kembali konsep-konsep yang telah ada. Pendekatan ini memberikan dasar bagi kerangka pikir dan rencana tindakan yang akan diambil dalam konteks pembangunan ekonomi daerah (Kuncoro, 2004). Pendekatan baru ini disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.1 Perbedaan Konsep Lama dan Konsep Baru Pembangunan Ekonomi Daerah

Konsep	Konsep Lama	Konsep Baru
Kesempatan kerja	Semakin banyak perusahaan = semakin banyak peluang kerja	Perusahaan harus mengembangkan pekerjaan yang sesuai dengan penduduk daerah
Basis pembangunan	Pengembangan sektor ekonomi	Pengembangan lembaga-lembaga ekonomi baru
Aset-aset lokasi	Keunggulan komparatif didasarkan pada aset fisik	Keunggulan kompetitif didasarkan pada kualitas lingkungan
Sumber daya pengetahuan	Ketersediaan angkatan kerja	Pengetahuan dan inovasi sebagai penggerak ekonomi

Sumber : Dimodifikasi dari Blakely (1989) dalam Kuncoro (2004)

Peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah dapat mencakup antara lain :

2.4.1 Wirausaha

Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis, dapat memanfaatkan potensi tanah dan bangunan untuk tujuan bisnis. Tanah atau bangunan dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan konservasi atau alasan-alasan lingkungan lainnya, dapat juga sebagai alasan perencanaan pembangunan atau digunakan untuk tujuan-tujuan lain yang bersifat ekonomi. Pantai, jalan raya dan pusat hiburan rakyat dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam tujuan yang dapat menciptakan peluang kerja. Organisasi kemasyarakatan memainkan peran penting dalam menjalankan kewirausahaan sebagai pencipta peluang kerja yang tidak dapat dilakukan oleh perusahaan swasta, atau untuk menjamin tersedianya jasa yang tidak mampu disediakan oleh perusahaan swasta.

Dengan peran ini pemerintah daerah dituntut untuk jeli dan pro-aktif dalam mengembangkan bisnis daerah termasuk bagaimana memanfaatkan aset pemerintah daerah, mendorong pertumbuhan bisnis daerah dan pemberdayaan masyarakat marginal.

2.4.2 Koordinator

Pemerintah daerah dapat bertindak sebagai koordinator untuk menetapkan kebijakan atau strategi-strategi bagi pembangunan di daerahnya. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan kelompok-kelompok masyarakat dalam mengumpulkan dan mengevaluasi informasi-informasi ekonomi seperti tingkat ketersediaan pekerjaan, angkatan kerja, pengangguran dan jumlah perusahaan. Selain itu dapat juga bekerja sama dengan lembaga pemerintah, badan usaha dan kelompok masyarakat lain untuk menyusun tujuan, perencanaan dan strategi ekonomi.

Pendekatan regional biasanya lebih efektif karena perhatian pemerintah daerah dapat terpusat pada perekonomian daerah dan dapat menciptakan pengelolaan daerah yang lebih baik.

2.4.3 Fasilitator

Pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan perilaku di daerahnya. Peran ini meliputi pengefisienan proses pembangunan, perbaikan prosedur perencanaan dan penetapan peraturan. Kelompok masyarakat yang berbeda dapat membawa kepentingan yang berbeda dalam proses penentuan kebijakan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu yang diperlukan adalah tersedianya suatu tujuan yang jelas agar pemerintah daerah dapat terfokus dalam memanfaatkan sumber daya dan tenaga yang dimilikinya.

2.4.4 Stimulator

Pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan mempertahankan perusahaan-perusahaan yang ada. Berbagai fasilitas dapat disediakan untuk menarik pengusaha, misalnya dengan menyediakan bangunan-bangunan yang dapat disewa untuk menjalankan usaha.

2.5 Pentingnya Membangun *Economic Based*

Dalam menganalisis perekonomian suatu daerah banyak teori dan metode yang dapat digunakan adalah Teori Basis Ekonomi (*Economic Based*). John Glasson mengatakan bahwa perekonomian regional dapat dibagi menjadi dua sektor, yaitu kegiatan-kegiatan basis (*basic activities*) dan kegiatan-kegiatan bukan basis (*non basic activities*).

Kegiatan-kegiatan basis adalah kegiatan-kegiatan yang mengekspor barang-barang dan jasa-jasa ke tempat-tempat di luar batas-batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan, atau yang memasarkan barang-barang dan jasa-

jasa mereka kepada orang-orang yang datang dari luar perbatasan perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan kegiatan-kegiatan bukan basis, adalah kegiatan-kegiatan yang menyediakan barang-barang dan jasa-jasa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang bertempat tinggal di dalam batas-batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Kegiatan ini tidak mengekspor barang-barang dan jasa, maka ruang lingkup produksi dan pasar mereka bersifat lokal.

Apabila suatu kegiatan ekonomi dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri/daerah dan masih mempunyai kelebihan, sehingga dapat mengekspornya disebut dengan sektor/kegiatan basis, sedangkan apabila kegiatan perekonomian tersebut hanya dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri/daerah dan bahkan kurang sehingga perlu mengimpornya dari luar daerah, disebut kegiatan bukan basis.

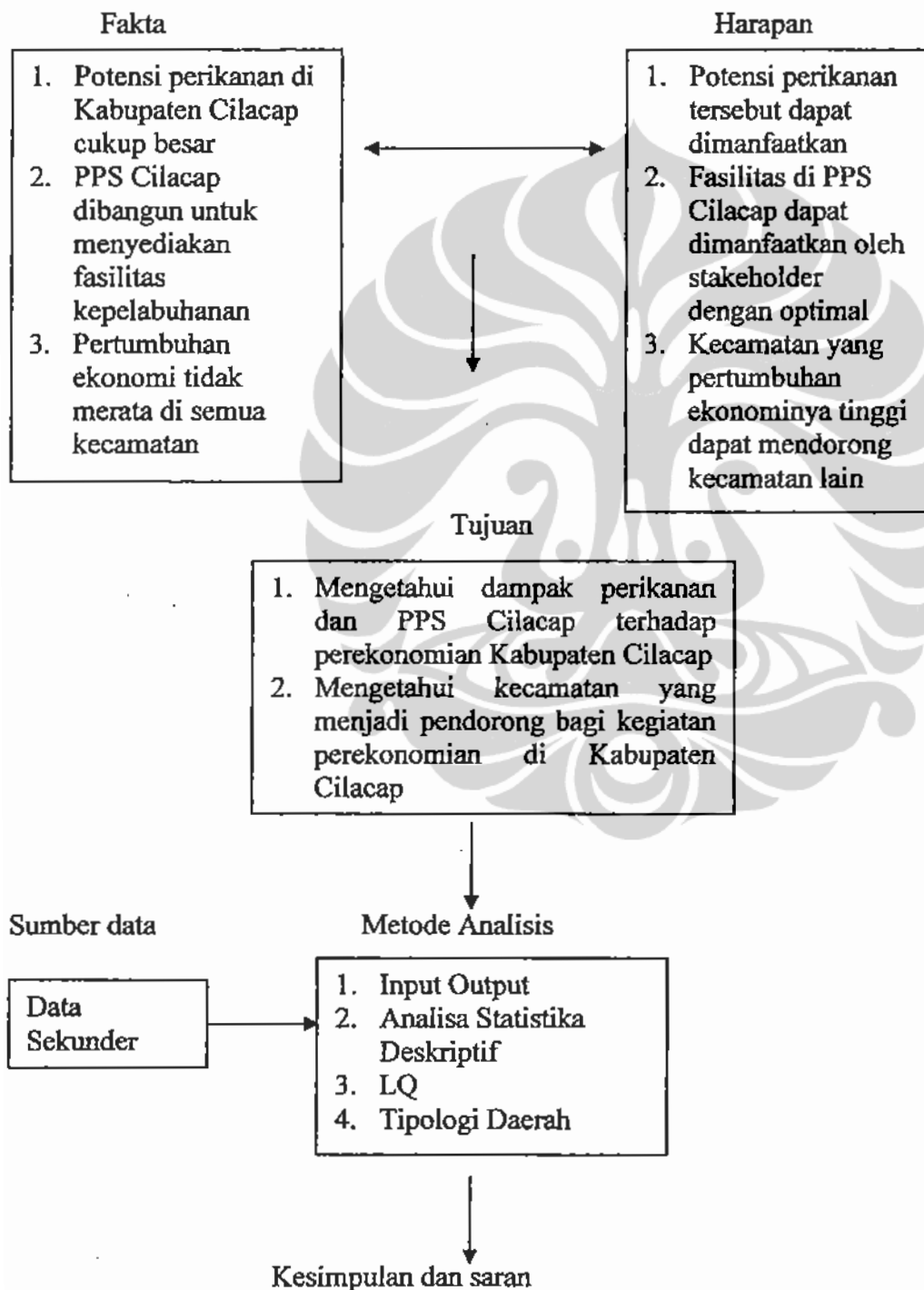
Teori basis ekonomi ini menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor, akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja (*job creation*).

Strategi pembangunan daerah yang muncul yang didasarkan pada teori ini adalah penekanan terhadap arti penting bantuan (*aid*) kepada dunia usaha yang mempunyai pasar secara nasional maupun internasional. Implementasi kebijakannya mencakup pengurangan hambatan/batasan terhadap perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor yang ada dan akan didirikan di daerah tersebut.

Kelemahan model ini adalah bahwa model ini didasarkan pada permintaan eksternal bukan internal. Pada akhirnya akan menyebabkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap kekuatan-kekuatan pasar secara nasional maupun global. Namun demikian, model ini sangat berguna untuk menentukan keseimbangan antara jenis-jenis industri dan sektor yang dibutuhkan masyarakat untuk mengembangkan stabilitas ekonomi.

BAB III METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan berdasarkan kerangka berpikir sebagai berikut :



Gambar 3.1 Kerangka Berpikir

Berdasarkan kerangka berpikir pada Gambar 3.1 di atas alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

3.1 Analisis Input Output

Analisis Input Output dikembangkan oleh Wassily Leontief pada tahun 1930an, merupakan suatu alat analisis yang mampu melihat hubungan antarsektor dalam suatu perekonomian. Hubungan antar sektor menjadi sangat penting karena pembangunan ekonomi tidak hanya mementingkan pertumbuhan ekonomi saja tetapi melihat pembagian pertumbuhan di antara faktor-faktor produksi dan sumber-sumber pertumbuhan itu sendiri.

Analisis Input Output (I-O) menunjukkan bahwa di suatu perekonomian terdapat keterkaitan antarsektoral. Pada akhirnya keterkaitan antarsektoral akan menyebabkan terjadinya keseimbangan antar penawaran dan permintaan dalam perekonomian tersebut. Analisis ini mengandung arti bahwa dalam keadaan keseimbangan, jumlah nilai output agregat (dalam unit moneter) dari perekonomian secara keseluruhan harus sama dengan jumlah nilai input antar industri dan jumlah nilai output antar industri. Sehingga analisis I-O ini menjadi alat analisis dalam bidang ilmu ekonomi pembangunan dan menjadi pionir dalam ilmu ekonomi perencanaan.

Analisis I-O merupakan varian terbaik dari keseimbangan umum, karena mempunyai tiga ciri utama :

1. memusatkan perhatian pada perekonomian dalam keadaan keseimbangan. Ini tidak ditemui dalam analisis parsial.
2. tidak memusatkan pada analisis permintaan tapi pada masalah teknis produksi.
3. didasarkan pada penelitian empiris.

Proses produksi merupakan suatu proses yang dilakukan dunia usaha untuk mengubah input menjadi output. Dunia usaha meliputi pengusaha besar, pengusaha kecil golongan ekonomi lemah dan pengusaha industri rumah tangga. Model I-O berisikan gambaran saling keterkaitan antara suatu sektor yang digunakan sebagai input, baik untuk menghasilkan output sektor itu sendiri

maupun sektor lain. Dalam proses produksi, untuk menghasilkan output memerlukan input baik barang, jasa dan faktor produksi lain.

Keterkaitan tersebut dapat digambarkan dalam tabel transaksi berikut :

Tabel 3.1 Tabel Transaksi Input Output

Input	Sektor	Permintaan antara				Permintaan akhir	Total output
		1	2	...	N		
Input antara	1	x_{11}	x_{12}	...	x_{1n}	F_1	X_1
	2	x_{21}	x_{22}	...	x_{2n}	F_2	X_2
		
	M	x_{m1}	x_{m2}	...	x_{mn}	F_m	X_m
Input Primer		V_1	V_2	...	V_n		
Total Input		X_1	X_2	...	X_n		

Pada tabel di atas kerangka I-O terdiri dari :

- a. Transaksi antara meliputi baris input antara (intermediate input) dan kolom permintaan antara (intermediate demand)

Input antara adalah semua barang dan jasa serta faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan output, sedangkan kolom menunjukkan sektor yang membutuhkan input (berasal dari output sektor lain atau sektornya sendiri). Nilai x_{ij} menunjukkan untuk menghasilkan sektor 1 (X_1) maka sektor ini membutuhkan input antara dari sektor 1 sendiri sebanyak x_{11} , dari sektor 2 sebanyak x_{21} , dari sektor 3 sebanyak x_{31} sampai sektor m sebanyak x_{m1} dan input primer sebanyak V_1 .

- b. Input primer

Input primer disebut juga sebagai nilai tambah bruto (NTB) atau gross value added yaitu balas jasa yang dihasilkan oleh faktor produksi yang terlibat dalam proses produksi. Terdiri dari 4 komponen : upah dan gaji, surplus usaha, pajak tak langsung dan depresiasi.

- c. Permintaan akhir (final demand)

Merupakan permintaan atas barang dan jasa bukan sebagai input untuk proses produksi lebih lanjut. Terdiri dari konsumsi rumah tangga (C), pembentukan modal tetap bruto atau investasi (I), pengeluaran pemerintah (G) dan ekspor netto (selisih antara ekspor dan impor = X-M). Komponen F_i menunjukkan nilai permintaan akhir terhadap output sektor i .

d. Total output.

Total Output sektor i (X_i) adalah jumlah output sektor i yang digunakan sebagai input oleh sektor j ($j = 1, 2, \dots, n$) ditambah dengan permintaan akhir, dapat dirumuskan dalam bentuk :

$$x_{11} + x_{12} + \dots + x_{1j} + F_1 = X_1$$

$$x_{21} + x_{22} + \dots + x_{2j} + F_2 = X_2$$

$$\dots + \dots + \dots + \dots + \dots = \dots$$

$$x_{i1} + x_{i2} + \dots + x_{ij} + F_i = X_i$$

Dapat ditulis dalam bentuk notasi matriks : $\sum x_{ij} + F_i = X_i$

dimana

x_{ij} = banyaknya output sektor i yang digunakan sebagai input oleh sektor j

F_i = permintaan akhir terhadap output sektor i

X_i = total output sektor i .

e. Total input

Di dalam tabel I-O biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang dan jasa identik dengan input antara, sedangkan upah dan gaji keuntungan dan pajak identik dengan input primer (nilai tambah bruto). Maka total input suatu sektor adalah jumlah seluruh input antara ditambah input primer, dirumuskan dengan :

$$x_{11} + x_{12} + \dots + x_{1n} + V_1 = X_1$$

$$x_{21} + x_{22} + \dots + x_{2n} + V_2 = X_2$$

$$\dots + \dots + \dots + \dots + \dots = \dots$$

$$x_{1j} + x_{2j} + \dots + x_{nj} + V_j = X_j$$

Dimana

x_{ij} = banyaknya output sektor i yang digunakan sebagai input oleh sektor j

V_i = input primer (nilai tambah) sektor j

X_j = total input sektor j.

3.1.1 Koefisien Input Output atau Koefisien Teknis

Proporsi input antara yang berasal dari sektor i terhadap total input sektot j disebut sebagai koefisien input-output atau koefisien teknis, dapat dihitung dengan :

$$a_{ij} = \frac{x_{ij}}{X_j} \quad (3.1)$$

Dimana :

a_{ij} = koefisien teknis

x_{ij} = banyaknya output sektor i yang digunakan sebagai input oleh sektor j

X_j = total input sektor j.

Matriks koefisien teknis merupakan dasar untuk perhitungan efek pengganda (multiplier effect) yang menjadi salah satu inti dari analisis I-O. Susunan matriks dapat disederhanakan menjadi

$$AX + F = X$$

$$AX - X = -F$$

$$(I - A)X = F$$

Sehingga diperoleh : $X = (I - A)^{-1} F$

Atau $\Delta X = (I - A)^{-1} \Delta F$ disebut matriks inverse Leontief

Dimana

X = matriks total output

I = matriks identitas

A = matriks koefisien teknis

F = matriks permintaan akhir

3.1.2 Analisis Input Output Regional

Analisis Input-Output digunakan tidak saja dalam lingkup ekonomi nasional, namun juga pada lingkup ekonomi regional di dalam suatu negara. Ada

Universitas Indonesia

dua hal yang menjadi motivasi bahwa analisis IO pada tingkat regional menjadi penting. Pertama, karakteristik dan ciri suatu perekonomian regional bisa jadi berbeda dengan karakteristik perekonomian nasional, meskipun perekonomian nasional tersebut terdiri dari perekonomian-perekonomian regional. Kedua, semakin kecil suatu perekonomian, semakin besar ketergantungannya kepada faktor-faktor eksogen dari luar perekonomian regional. Ketika membicarakan perekonomian regional (perekonomian propinsi, kabupaten/kota, kecamatan ataupun perekonomian yang lebih kecil), semakin kecil lingkup perekonomian tersebut maka semakin besar pengaruh faktor-faktor seperti ekspor ataupun impor terhadap lingkup perekonomian tersebut.

Teknologi yang digunakan di perekonomian suatu wilayah diasumsikan sama dengan teknologi yang digunakan oleh perekonomian nasional. Akan tetapi perlu dilakukan penyesuaian untuk mendapatkan koefisien regional karena adanya keterbatasan data. Salah satu faktor penyesuaian tersebut adalah dengan *Location Quotient* (LQ). Faktor penyesuaian ini digunakan untuk menyesuaikan koefisien IO nasional. Kriteria penyesuaian koefisien IO tersebut ialah sebagai berikut :

$$a_{ij}^R = \begin{cases} a_{ij} & \text{jika } LQ_i \geq 1 \\ a_{ij \cdot LQ} & \text{jika } LQ_i < 1 \end{cases} \quad (3.2)$$

Metode penyesuaian dengan LQ lebih banyak dipakai pada penyesuaian koefisien IO karena kebutuhan datanya tidak serumit kebutuhan data untuk menghitung persentase persediaan regional yang membutuhkan data ekspor dan impor dari region. Untuk setiap sektor, LQ hanya membutuhkan data nilai tambah sektoral dan total tingkat regional dan nasional. Data ini akan sulit didapat untuk tingkat agregasi regional yang semakin kecil seperti kecamatan ataupun kabupaten/kota.

3.2 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna (Walpole, 1995). Tabel merupakan kumpulan angka-angka yang disusun menurut kategori-kategori tertentu sehingga memudahkan pembuatan

analisis data (Supranto, 2000). Penyajian dengan tabel bisa memberikan angka-angka yang lebih teliti baik berupa hubungan satu arah, dua arah, ataupun lebih. Grafik merupakan gambar-gambar yang menunjukkan data berupa angka secara visual (mungkin juga dengan simbol-simbol) serta biasanya berasal dari tabel-tabel yang telah dibuat (Supranto, 2000). Walaupun angka-angka yang disajikan melalui grafik kurang teliti dibandingkan dengan tabel, namun grafik dapat membantu untuk mengambil kesimpulan yang cepat. Grafik garis digunakan untuk menyajikan data yang berbentuk tren, sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai perkembangan suatu obyek tertentu atau lebih.

3.3 Location Qoutient

Dalam teknik ini kegiatan ekonomi suatu daerah dibagi menjadi 2 golongan yaitu :

- a. Kegiatan industri yang melayani pasar di daerah itu sendiri maupun di luar daerah yang bersangkutan. Industri ini dinamakan *industry basic*.
- b. Kegiatan ekonomi atau industri yang melayani pasar di daerah tersebut. Jenis ini dinamakan *industry non basic* atau industri lokal.

Dasar teknik ini adalah economic base yang intinya adalah karena *industry basic* menghasilkan barang-barang dan jasa untuk pasar di daerah maupun di luar daerah yang bersangkutan, maka penjualan keluar daerah akan menghasilkan pendapatan bagi daerah tersebut. Terjadinya arus pendapatan dari luar daerah ini menyebabkan terjadinya kenaikan konsumsi dan investasi di daerah tersebut, dan pada gilirannya akan menaikkan pendapatan dan menciptakan kesempatan kerja baru. Peningkatan pendapatan tersebut tidak hanya menaikkan permintaan terhadap *industry basic*, tetapi juga menaikkan permintaan akan *industry non basic*(lokal). Kenaikan permintaan ini akan mendorong kenaikan investasi pada industri yang bersangkutan sehingga investasi modal dalam sektor industri lokal merupakan investasi yang didorong (*induced*) sebagai akibat dari kenaikan *industry basic*.

Oleh karena itulah *industry basic* patut dikembangkan di suatu daerah. Untuk menggolongkan setiap industri inilah digunakan Location Qoutient (LQ) yaitu usaha mengukur konsentrasi dari suatu kegiatan (industri) dalam suatu daerah dengan cara membandingkan peranannya dalam perekonomian daerah itu dengan peranan kegiatan atau industri sejenis dalam perekonomian regional atau nasional (Arsyad, 1999).

$$LQ_i = \frac{NTB'_i / NTB_i^p}{NTB' / NTB^p} \quad (3.3)$$

Keterangan :

NTB'_i = PDRB sektor i di Kabupaten

NTB_i^p = PDRB sektor i di propinsi

NTB' = Total PDRB kabupaten

NTB^p = Total PDRB propinsi

Kriteria untuk melakukan interpretasi hasil penghitungan LQ adalah sebagai berikut :

- Bila koefisien LQ > 1 artinya komoditas tersebut menjadi basis atau sumber pertumbuhan. Komoditas ini mempunyai keunggulan komparatif, hasilnya tidak saja dapat memenuhi kebutuhan daerah yang bersangkutan akan tetapi dapat juga diekspor ke luar wilayah.
- Bila koefisien LQ = 1 artinya komoditas tersebut tergolong non basis, tidak memiliki keunggulan komparatif. Produksinya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan wilayah sendiri atau tidak mampu untuk diekspor.
- Bila koefisien LQ < 1 artinya komoditas itu tergolong non basis. Produksi komoditas di suatu wilayah tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri sehingga perlu pasokan impor dari luar wilayah.

3.4 Tipologi Klassen atau Tipologi Daerah

Alat analisis tipologi daerah digunakan untuk mengetahui gambaran mengenai pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Tipologi daerah pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama yaitu pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita daerah. Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata pendapatan per kapita sebagai sumbu horizontal, maka daerah yang diamati dapat dibagi menjadi empat klasifikasi (tabel 3.2) yaitu :

- Daerah yang cepat maju dan cepat tumbuh (*high growth and high income*)
- Daerah maju tapi tertekan (*high income but low growth*)
- Daerah berkembang cepat (*high growth but low income*)
- Daerah relatif tertinggal (*low growth and low income*).

Tabel 3.2 Klasifikasi Daerah dengan Analisis Tipologi Daerah

PDRB per kapita (y) Laju pertumb(r)	$(y_i > y)$	$(y_i < y)$
	$(r_i > r)$	Pendapatan tinggi dan pertumbuhan tinggi (daerah yang cepat maju dan cepat tumbuh)
$(r_i < r)$	Pendapatan tinggi dan pertumbuhan rendah (daerah maju tapi tertekan)	Pendapatan rendah dan pertumbuhan rendah (daerah relatif tertinggal)

Keterangan : r = rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota

y = rata-rata PDRB per kapita kabupaten/kota

r_i = pertumbuhan ekonomi kecamatan yang diamati (i)

y_i = PDRB per kapita kecamatan yang diamati (i)

BAB IV

KONDISI EKONOMI DAN INFRASTRUKTUR KABUPATEN CILACAP

4.1 Keadaan Umum Kabupaten Cilacap

Secara geografis, kabupaten Cilacap berada pada 7°20' LS 108°4'3" - 109° 30' 30" BT dengan batas-batas administrasi sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Brebes
- Sebelah Timur : Kabupaten Kebumen
- Sebelah Barat : Propinsi Jawa Barat
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia / Lautan Indonesia.

Kabupaten Cilacap terletak di bagian selatan pulau Jawa dan merupakan kabupaten terluas di Propinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah mencapai 2138,5 Km² atau 6,69 % dari luas propinsi Jawa Tengah. Garis pantai terbagi dua yaitu Segara Anakan dengan panjang 96,6 Km dan garis pantai yang berhadapan dengan Samudera Hindia sepanjang 105 Km.

Kabupaten Cilacap terdiri atas 24 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah desa dan kelurahan. Desa-desa tersebar di 21 kecamatan, sedangkan kelurahan ada di 3 kecamatan eks kota administratif Cilacap. Kecamatan yang memiliki wilayah pantai mencapai 11 kecamatan. Hal ini menyebabkan Kabupaten Cilacap baik langsung maupun tidak langsung memiliki potensi pengembangan yang cukup besar di bidang perikanan tangkap maupun perikanan budidaya.

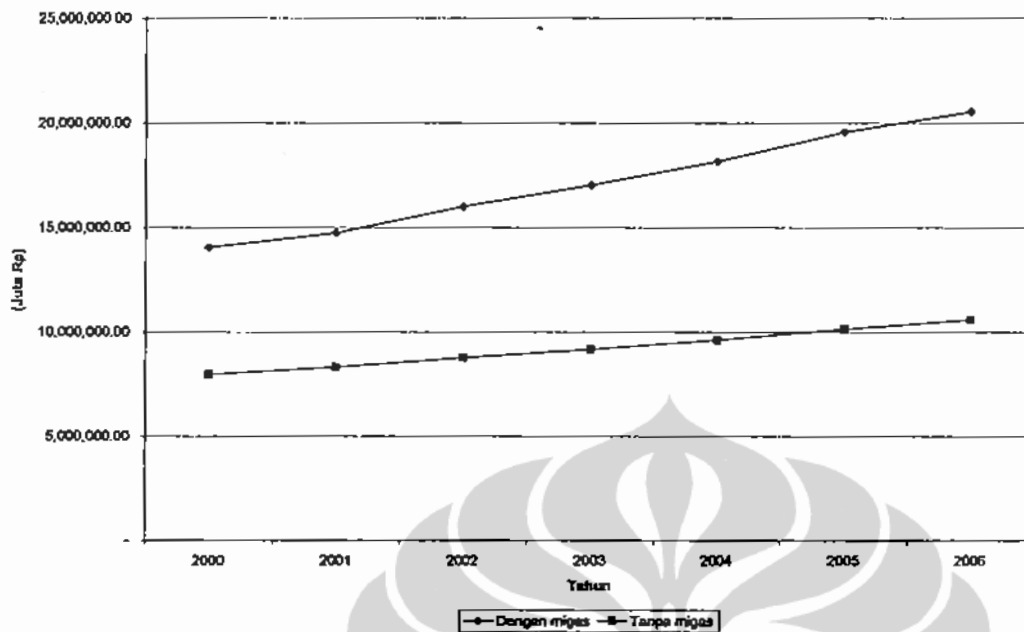
pelelangan ikan di Cilacap, selain PPSC tersebut yaitu Sentolokawat, Pandanarang, Lengkong, Tegal Katilayu, Sidakaya, Battery, Kemiren, Rawajarit, Jetis, Sentolo Kambang dan Kampung Laut. Pelabuhan Tanjung Intan adalah pelabuhan ekspor-impor terutama untuk komoditas pertanian. Beberapa perusahaan besar memiliki pelabuhan khusus tersendiri, seperti Pelabuhan Minyak Pertamina UP IV, pelabuhan Semen milik Holcim, dll.

4.2.2 Air bersih, Listrik dan Energi

Pemenuhan kebutuhan air bersih terjamin bagi masyarakat terjamin dengan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Cilacap dengan kapasitas produksi sebesar 3.899.991 m³. Pemenuhan kebutuhan listrik dan energi dipenuhi dengan adanya pelayanan PLN dengan kapasitas daya tersambung sementara sebesar 165.050.941 VA dan kapasitas terjual 230.474.432 KWH.

4.3 Perkembangan Perekonomian Kabupaten Cilacap

Perekonomian Kabupaten Cilacap secara umum menunjukkan kecenderungan selalu berkembang. Hal ini dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar Harga Konstan 2000, dari tahun 2000-2006 yang menunjukkan peningkatan, dari sekitar ± Rp. 14,049 triliun pada tahun 2000, menjadi ± Rp. 20,543 triliun tahun 2006. Secara lebih jelas dapat dilihat pada Grafik 4.2.



Grafik 4.2. Nilai PDRB Cilacap Tahun 2000-2006 (Atas Dasar Harga Konstan 2000)

Sumber : BPS Kabupaten Cilacap (data diolah)

Jika dilihat dari nilai PDRB kecamatan, menunjukkan bahwa pada tahun 2001 PDRB terbesar di kecamatan Cilacap Selatan (Rp. 569,9 milyar) dan terkecil di kecamatan Patimuan (Rp. 114,166 milyar). Posisi tersebut relatif tidak berubah pada tahun 2005, yaitu terbesar kecamatan Cilacap Selatan (Rp. 655,167 milyar) dan terkecil di kecamatan Patimuan (Rp. 107,914 milyar).

TABEL 4.1 Nilai PDRB Kecamatan Tahun 2001 dan 2005 Atas Dasar Harga Konstan 2000 (dalam juta Rp)

TAHUN 2001		TAHUN 2005	
Dayeuhluhur	242,306.03	Dayeuhluhur	352,378.78
Wanareja	375,552.81	Wanareja	481,340.15
Majenang	543,935.82	Majenang	636,358.48
Cimanggu	344,581.75	Cimanggu	448,985.95
Karangpucung	214,568.80	Karangpucung	236,691.92
Cipari	211,875.13	Cipari	242,564.93
Sidareja	263,150.13	Sidareja	332,030.09
Kedungreja	171,807.29	Kedungreja	138,781.74

TAHUN 2001		TAHUN 2005	
Patimuan	114,166.17	Patimuan	107,914.46
Gandrungmangu	222,693.73	Gandrungmangu	201,106.16
Bantarsari	156,047.81	Bantarsari	124,073.38
Kawunganten	260,244.30	Kawunganten	237,447.35
Jeruklegi	298,147.33	Jeruklegi	379,628.05
Kesugihan	391,504.24	Kesugihan	441,077.17
Adipala	245,039.83	Adipala	290,690.06
Maos	232,721.94	Maos	261,447.29
Sampang	178,156.99	Sampang	224,814.69
Kroya	316,387.03	Kroya	378,167.13
Binangun	196,624.01	Binangun	238,327.85
Nusawungu	237,636.19	Nusawungu	264,454.82
Cilacap Selatan	569,907.33	Cilacap Selatan	655,167.38
Cilacap Tengah	350,066.92	Cilacap Tengah	401,377.30
Cilacap Utara	440,704.42	Cilacap Utara	514,196.67

Sumber : BPS Cilacap 2005.

Dari tabel 4.1 di atas terlihat bahwa Kecamatan yang mengalami penurunan PDRB adalah Kecamatan Kedungreja, Patimuan, Gandrungmangu, Bantarsari dan Kawunganten.

4.4 Kondisi Perikanan di Kabupaten Cilacap

Letak kabupaten Cilacap (bagian selatan) yang berbatasan dengan laut yaitu Samudera Hindia dengan panjang garis pantai 105 Km merupakan potensi yang sangat besar di bidang perikanan terutama perikanan tangkap. Hal ini dikarenakan Kabupaten Cilacap memiliki *fishing ground* yang luas meliputi Teluk Penyus sampai wilayah ZEE yang berbatasan dengan Australia. Hasil tangkapan didominasi oleh udang dan tuna (Tabel 4.2). Jenis hasil tangkapan tersebut memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan memiliki pasar ekspor yang permintaannya semakin meningkat.

Tabel 4.2. Potensi Lestari dan Tingkat Pemanfaatan Sumberdaya Ikan di WPP Samudera Hindia (IX), 2000

Jenis ikan	Potensi (ton)	Pemanfaatan	
		Jumlah (ton)	%
Pelagis besar	297.750	152.460	51,20
Pelagis kecil	429.030	233.600	15,42
Demersal	135.130	89.170	15,76
Udang	10.700	6.660	62,21
Cumi	3.750	5.400	143,99
Jumlah	876.360	487.290	Rata-rata = 27,46

Sumber : PKSPL, 2001

Sedangkan potensi dan produksi perikanan untuk masing – masing WPP (Wilayah Pengelolaan Perikanan) di Indonesia disajikan dalam tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3 Potensi dan Produksi Perikanan Indonesia

Kelompok Sumberdaya	WPP									Perairan Indonesia
	Selat Malaka	Laut Cina Selatan	Laut Jawa	Selat Malabar	Laut Banda	Laut Arafura	Laut Seram	Laut Sulawesi & Samudera Pasifik	Samudera Hindia	
Ikan Pelagis Besar										
Potensi Total	27,67	66,08	55,00	183,60	104,12	50,86	108,51	175,26	386,26	1.145,38
Produksi	36,27	35,16	137,82	85,10	29,10	34,56	37,48	153,43	188,28	737,18
Prosentase Pemanfaatan	131,1%	53,2%	250,6%	44,0%	27,9%	68,0%	35,2%	87,5%	51,4%	64,4%
Pemanfaatan	OE	UE	OE	UE	UE	UE	UE	FE	UE	UE
JTB (80% x Potensi)	22,14	52,88	44,00	154,88	83,30	40,69	85,21	140,21	293,01	916,29
Sisa Potensi (JTB - Produksi)	-	17,70	-	69,78	54,20	6,13	47,75	-	104,73	300,28
Ikan Pelagis Kecil										
Potensi	147,30	621,50	340,00	605,44	132,00	468,66	379,44	384,75	526,57	3.605,66
Produksi	132,70	205,53	507,53	333,35	146,47	12,31	119,43	62,45	26,56	1.546,33
Prosentase Pemanfaatan	90,1%	33,1%	149,3%	55,1%	111,0%	2,6%	31,5%	16,2%	5,0%	42,9%
Pemanfaatan	FE	UE	OE	UE	OE	UE	UE	UE	UE	UE
JTB (80% x Potensi)	117,84	497,20	272,00	484,35	105,60	374,93	303,55	307,80	421,28	2884,53
Sisa Potensi (JTB - Produksi)	-	291,67	-	151,00	-	362,62	184,12	245,35	394,70	1629,46
Ikan Demersal										
Potensi	82,40	364,80	375,20	87,20	9,32	202,34	88,84	54,88	135,13	1.400,09
Produksi	146,29	54,69	334,92	167,38	43,20	156,60	32,14	15,31	134,83	1.085,36
Prosentase Pemanfaatan	177,5%	15,0%	89,3%	191,9%	463,5%	77,4%	36,2%	27,9%	99,8%	77,5%
Pemanfaatan	OE	UE	FE	OE	OE	UE	UE	UE	FE	UE
JTB (80% x Potensi)	65,92	291,84	300,16	69,76	7,46	161,87	71,07	43,89	108,10	1120,07
Sisa Potensi (JTB - Produksi)	-	237,15	-	-	-	5,27	38,99	28,58	-	309,93
Ikan Karang										
Potensi	5,00	21,57	9,50	34,10	32,10	3,10	12,50	14,50	12,88	145,25
Produksi	21,60	7,88	48,24	24,11	6,22	22,58	4,63	2,21	19,42	156,89
Prosentase Pemanfaatan	432,0%	36,5%	507,8%	70,7%	19,4%	728,4%	37,0%	15,2%	150,8%	108,0%
Pemanfaatan	OE	UE	OE	UE	UE	OE	UE	UE	OE	OE
JTB (80% x Potensi)	4,00	17,26	7,60	27,28	25,68	2,48	10,00	11,60	10,30	116,20
Sisa Potensi (JTB - Produksi)	-	9,38	-	3,17	19,46	-	5,37	9,39	-	46,77
Udang Penaeid										
Potensi	11,40	10,00	11,40	4,80	0,00	43,10	0,90	2,50	10,70	94,80
Produksi	49,46	70,51	52,8	36,91	0,00	36,67	1,11	2,18	10,24	259,68
Prosentase Pemanfaatan	433,9%	705,1%	463,2%	769,0%	-	85,1%	123,3%	87,2%	95,7%	274,1%
Pemanfaatan	OE	OE	OE	OE	-	FE	OE	FE	FE	OE
JTB (80% x Potensi)	9,12	8,00	9,12	3,84	0,00	34,48	0,72	2,00	8,56	75,84
Sisa Potensi (JTB - Produksi)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Lobster										
Potensi	0,40	0,40	0,50	0,70	0,40	0,10	0,30	0,40	1,60	4,80
Produksi	0,87	1,24	0,93	0,65	0,01	0,16	0,02	0,04	0,16	4,08
Prosentase Pemanfaatan	217,5%	310,0%	186,0%	92,9%	2,5%	160,0%	6,7%	10,0%	10,0%	85,0%
Pemanfaatan	OE	OE	OE	FE	UE	OE	UE	UE	UE	FE
JTB (80% x Potensi)	0,32	0,32	0,40	0,56	0,32	0,08	0,24	0,32	1,28	3,84
Sisa Potensi (JTB - Produksi)	-	-	-	-	0,31	-	0,22	0,28	1,12	1,93
Cumi-Cumi										
Potensi	1,86	2,70	5,04	3,88	0,05	3,39	7,13	0,45	3,75	28,25
Produksi	3,15	4,89	12,11	7,95	3,48	0,30	2,86	1,49	6,29	42,52
Prosentase Pemanfaatan	169,4%	181,1%	240,3%	204,9%	6960,0%	8,8%	40,1%	331,1%	167,7%	150,5%
Pemanfaatan	OE	OE	OE	OE	OE	UE	UE	OE	OE	OE
JTB (80% x Potensi)	1,49	2,16	4,03	3,10	0,04	2,71	5,70	0,36	3,00	22,60
Sisa Potensi (JTB - Produksi)	-	-	-	-	-	2,41	2,84	-	-	5,26
TOTAL										
Potensi	276,06	1.057,05	794,64	829,72	277,98	771,55	990,52	832,72	1.076,89	6.409,21
Produksi	389,28	379,90	1.094,41	655,45	228,48	263,37	197,54	297,11	623,78	4.068,42
Pemanfaatan	OE	UE	OE	UE	FE	UE	UE	UE	UE	UE

Keterangan : Potensi & Produksi (10^3 ton/tahun), sumber DKP, 2003.

Tabel 4.2 dan 4.3 di atas menunjukkan sumberdaya ikan yang ada di WPP IX masih besar peluangnya untuk dimanfaatkan. Tingkat pemanfaatan yang paling tinggi adalah jenis cumi – cumi (143,99%) dan kondisinya sudah *over fishing*. Sedangkan jenis ikan lain masih sedikit pemanfaatan (masih jauh dari *over fishing*). Tingkat pemanfaatan yang masih rendah memungkinkan untuk mengembangkan faktor-faktor yang berhubungan langsung dengan unit produksi. Faktor tersebut antara lain jumlah unit penangkapan (nelayan, alat tangkap dan kapal), prasarana pelabuhan dan kondisi usaha yang kondusif.

Kabupaten Cilacap termasuk penghasil perikanan terbesar, tetapi data yang ada menyebutkan bahwa tahun 2000 hingga sekarang produksi ikan menurun, hal ini dikarenakan beberapa faktor diantaranya :

- a. musim paceklik yang berkepanjangan.
- b. overfishing di pantura.
- c. lemahnya sumberdaya manusia yang ada.
- d. kurangnya teknologi pendukung.
- e. politik bangsa Indonesia.

Kabupaten Cilacap memiliki potensi dan prospek yang baik untuk dikembangkan, hal ini dapat dilihat dalam tabel 4.4 berikut ini:

Tabel 4.4 Usaha Pengkapan Ikan di Cilacap

Jenis ikan	Potensi (ton)	Pemanfaatan	
		Jumlah (ton)	%
Pelagis besar	22.000	2.607,200	11,85
Demersal	22.360	4.255,400	18,897
Udang	12.500	2.701,759	21,61
Cumi	3.700	189,123	5,11
Jumlah	60.560	9.723,482	57,467

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Cilacap 2004-2014

Prasarana pelabuhan yang ada di Kabupaten Cilacap (baik berupa Pelabuhan Perikanan maupun Pangkalan Pendaratan Ikan atau Tempat Pendaratan Ikan) dibagi pengelolaannya yaitu oleh pemerintah Propinsi (Sentolokawat, Pandanarang, Lengkong, Tegal Katilayu, Sidakaya dan PPS Cilacap), sedang yang dikelola pemerintah kabupaten meliputi Battery, Kemiren, Rawajarit, Jetis, Sentolo Kambang dan Kampung Laut. Jenis pengelolaan tersebut berdasar sumber dana pembangunannya yang akan berdampak pada pembagian penerimaan retribusi.

Dalam upaya menunjang peningkatan produksi perikanan pemerintah Kabupaten Cilacap (dan swasta) juga menyediakan sarana pendukung lainnya berupa:

- Pelabuhan Perikanan Nusantara Cilacap (PPNC), dengan fasilitas:
 - Dermaga Pendaratan Ikan dengan kapasitas 250 kapal ukuran 20-40 GT
 - Bengkel
 - TPI
 - Pasar
 - SPBU 1 unit
 - Docking
- Pelabuhan Tanjung Intan
- Galangan Kapal, sebanyak 3 unit, dengan kapasitas antara 10-20 unit
- Pabrik es, sebanyak 5 buah.
- Perusahaan Cold Storage, yang beroperasi di Cilacap berjumlah 2 buah, dengan kapasitas 25-50 ton/hari
- Pabrik Pengalengan Ikan, sebanyak 2 buah, dengan kapasitas 25-60 ton/ hari.
- Pengolahan Tepung Ikan, dengan kapasitas 10-15 ton/ bulan.

4.5 Kondisi Fisik dan Fasilitas di PPS Cilacap

Pembangunan Pelabuhan Perikanan Cilacap berasal dari gagasan pengembangan PPI Sentolokawat pada tahun 1980, namun gagasan ini menemui hambatan dalam pengembangannya karena keterbatasan areal PPI, lokasinya berdekatan dengan dermaga dan lalu lintas kapal tanker Pertamina. Kondisi ini

mengakibatkan lokasi pembangunan Pelabuhan Perikanan Cilacap dipindahkan ke Kelurahan Tegal Kamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan (PPS Cilacap, 2006).

Pembangunan Pelabuhan Perikanan Cilacap dimulai pada tahun 1991/1992 dan selesai pada tahun 1994. Uji coba operasional dilakukan pada tanggal 20 Mei 1994 sampai dengan 24 Mei 1995. Pada tanggal 18 November 1996 Pelabuhan Perikanan Cilacap diresmikan oleh Presiden RI. Pelabuhan Perikanan Cilacap pada awalnya ditetapkan dengan status pelabuhan tipe B dengan nama Pelabuhan Perikanan Nusantara Cilacap (PPNC). Sesuai dengan perkembangannya, pada tahun 2001 meningkat statusnya menjadi pelabuhan tipe A sehingga namanya Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (PPS Cilacap).

Sedimentasi yang terjadi di kolam pelabuhan dan alur masuk kapal adalah permasalahan yang harus dihadapi oleh PPS Cilacap yang mengakibatkan aktivitas pelabuhan menurun. Kondisi ini mengakibatkan pengerukan pasir menjadi program tahunan dan menghabiskan dana yang cukup besar.

Untuk mendukung operasional PPS Cilacap, fasilitas yang telah ada dan dibangun di PPS Cilacap dapat dilihat tabel 4.5 berikut.

Tabel 4.5 Fasilitas PPS Cilacap

No	Jenis Fasilitas	Ukuran	Jml/unit	Kapasitas/ keterangan
1	TPI selatan TPI utara	1.264 M ² 420 M ²	2 1	
2	Kolam Pelabuhan - Luas - Kedalaman	7,74 Ha - 3 LWS	1	370 Kapal > 10 GT
3	Kali Yasa - Luas - Kedalaman	5,5 Ha - 2 LWS	1	500 Kapal < 10 GT
4	Dermaga (terdiri dari dermaga pendaratan, tambatan dan laporan)	1.212,8 M ²	11	94 Kapal
5	Breakwater utara Breakwater selatan	756,57 M 370,64 M	1 1	

No	Jenis Fasilitas	Ukuran	Jml/unit	Kapasitas/ keterangan
6	Lahan industri	127.304 M ²	-	HPL
7	Lahan yang telah dimanfaatkan	42.949 M ²	-	HPL
8	Bengkel	75 M ²	1	
9	SPBU/SPBB	5000 M ²	1	95 KL (solar)
	Milik KUD : - tangki solar		2	
	- tangki bensin		1	16 KL (bensin)
10	Tempat parkir	196 M ²	1	Roda dua
11	Tangki air dan instalasi	89 M ³	1	Beton
12	Genset : - Kantor	25 KVA	2	Insidental
	- TPI	50 KVA	1	used
13	Listrik : - TPI	53 KVA	1	PLN
	- Kantor	22,5 KVA	1	PLN
14	Line telepon	-	6	16 Ext
15	Slipway/dock 5 rel	3.120 M ²	1	500 GT
16	Whinch house	18 M ²	1	200 GT
17	Kantor administrasi	993 M ²	1	72 pegawai
18	Gedung pertemuan	400 M ²	1	200 orang
19	MCK	66 M ²	6	6 ruang
20	Toko BAP	1.008 M ²	36	
21	Jalan	1.637 M	-	Kelas III b
22	Mushola	16 M ²	1	14 orang
23	Tempat pembuangan sampah	6 M ³	3	TPS
24	IPAL	140 M ³	2	Resapan
25	UBPT	190 M ²	1	Lembaga keuangan
26	Pos satpam A	50 M ²	1	
	Pos satpam B	14 M ²	1	15 orang
27	Kantor Waskan	200 M ²	1	9 orang
28	Pos pemeriksaan Terpadu kapal	96 M ²	1	- AL - Pol Air - Adpel - PPSC

No	Jenis Fasilitas	Ukuran	Jml/unit	Kapasitas/ keterangan
				- Waskan
29	Perbaikan dan penjemuran jaring	1.000 M ²	1	
30	Shelter nelayan	120 M ²	1	

Sumber : PPSC 2007

Keterangan :

a. Jalan

Jalan di lingkungan pelabuhan memiliki panjang 1.637 m dengan kapasitas kelas III b. Jalan di dalam kawasan PPS Cilacap rata-rata hanya dilalui oleh kendaraan roda 2 sampai roda 6 pengangkut orang, kebutuhan melaut dan hasil tangkapan. Sebagian jalan yang rusak disebabkan sering dilalui oleh kendaraan-kendaraan proyek pengangkut bahan-bahan bangunan.

b. Tangki air bersih dan instalasi

Air bersih merupakan kebutuhan pokok yang wajib ada di pelabuhan perikanan sebagai kebutuhan melaut, penanganan hasil tangkapan/pengolahan maupun kebutuhan perkantoran. Tangki dan instalasi air bersih memiliki kapasitas 89 m³. Air bersih ini hampir semuanya disuplai oleh PDAM dan penyalurannya dilakukan oleh KUD Mino Saroyo.

c. Jaringan listrik

Kebutuhan listrik di pelabuhan perikanan sangat penting untuk penerangan pada mesin-mesin perbaikan kapal dan industri. Jaringan listrik dipasang oleh PLN, dibedakan atas gedung TPI (53 KVA) dan perkantoran (22,5 KVA). Kebutuhan listrik untuk industri di PPS Cilacap disesuaikan dengan permintaan perusahaan tersebut.

d. Pengolahan limbah

Pengolahan limbah di PPS Cilacap dilakukan hanya pada limbah cair saja dan terbatas pada limbah yang berasal dari TPI atau fasilitas pelabuhan saja. Limbah yang berasal dari industri perikanan yang ada di pelabuhan wajib diolah sendiri oleh perusahaan.

BAB V
SEKTOR PERIKANAN, PPS CILACAP DAN PEMBANGUNAN
REGIONAL KABUPATEN CILACAP

5.1 Analisis Input Output Regional

Asumsi yang menyatakan bahwa teknologi yang digunakan di tingkat nasional adalah sama dengan teknologi yang digunakan di tingkat region adalah asumsi yang lemah. Akan tetapi perlu dilakukan penyesuaian untuk mendapatkan koefisien regional karena adanya keterbatasan data. Karena teknologi di tingkat regional dan tingkat nasional diasumsikan sama maka matriks A, yaitu matriks teknologi di tingkat nasional akan digunakan dalam analisis IO regional tetapi perlu disesuaikan dengan satu kondisi yang spesifik di daerah dengan menggunakan persamaan 3.3. (Nazara, 2005).

Dengan memakai IO Propinsi Jawa Tengah tahun 2004 untuk harga produsen (Lampiran 1) dan indeks LQ dari kabupaten Cilacap untuk tahun 2004 diperoleh matriks teknologi seperti Lampiran 3 (untuk koefisien teknis 13 sektor), Lampiran 4 (penyesuaian koefisien teknis), Lampiran 5 (*Output Multiplier*).

5.1.1 *Output Multiplier*

Output multiplier menghitung efek perubahan output akibat perubahan satu rupiah permintaan akhir. Perubahan output yang terjadi akibat perubahan output yang terjadi akibat peningkatan permintaan akhir sebesar satu rupiah di sektor i ditunjukkan oleh jumlah kolom ke-i tersebut pada matriks kebalikan Leontief (seperti pada lampiran 10).

Output multiplier untuk masing-masing sektor dapat dilihat pada total kolom pada lampiran 10. Terlihat bahwa sektor bangunan memiliki *output multiplier* yang paling tinggi. Setiap satu rupiah peningkatan permintaan akhir sektor ini akan meningkatkan output seluruh sektor sebesar 2,17 rupiah. Sub sektor bahan makanan hanya mempunyai *output multiplier* yang relatif kecil yaitu sebesar 1,14. Sub sektor perikanan hanya mempunyai *output multiplier* sebesar

1,38. Sedangkan sektor industri pengolahan mempunyai output multiplier yang cukup besar yaitu 2,12.

5.1.2 Keterkaitan Antarsektor

Analisis Input Output juga dapat digunakan untuk melihat keterkaitan antarsektor. Analisis ini untuk melihat dampak peningkatan output sektor tertentu akan mendorong peningkatan output sektor-sektor lainnya. Untuk itu digunakan keterkaitan ke belakang (*backward linkage/IBL*) dan keterkaitan ke muka (*forward linkage/IFL*) seperti dalam tabel 5.10 berikut.

Tabel 5.1 Keterkaitan ke Belakang dan Keterkaitan ke Muka

Sektor	Keterkaitan ke Belakang (IBL)	Keterkaitan ke Muka (IFL)
Tanaman Bahan Makanan	0.702385665	0.851566989
Tanaman Perkebunan	0.853937411	0.700068757
Peternakan dan Hasil-Hasilnya	1.040765786	0.653973972
Kehutanan	0.812500441	0.676543214
Perikanan	0.847845314	0.635026817
Pertambangan dan Penggalian	0.829954777	1.583763754
Industri Pengolahan	1.305117899	2.48224257
Listrik, Gas & Air Minum	1.183159142	0.722891414
Bangunan	1.337482233	0.82770085
Perdagangan, Hotel dan Restoran	1.043224438	1.527050202
Pengangkutan & Komunikasi	1.08544727	0.89631409
Keuangan, Persewaan & Js. Persh.	0.882742236	0.720654676
Jasa-jasa	1.075437387	0.722202694

Sumber : data diolah

Sektor yang mempunyai angka keterkaitan ke belakangnya lebih besar dari satu berarti bahwa keterkaitan ke belakang sektor tersebut lebih besar dari keterkaitan ke belakang rata-rata secara keseluruhan. Dari tabel 5.1 di atas dapat

dilihat sektor yang mempunyai angka keterkaitan ke belakang yang lebih dari satu adalah :

- a. Peternakan dan hasil-hasilnya = 1,0407 artinya jika terjadi kenaikan permintaan akhir sektor peternakan dan hasil-hasilnya satu unit, maka output perekonomian akan meningkat sebesar 1,0407 unit.
- b. Industri pengolahan = 1,305 artinya jika terjadi kenaikan permintaan akhir sektor industri pengolahan satu unit, maka output perekonomian akan meningkat sebesar 1,305 unit.
- c. Listrik, gas dan air minum = 1,183 artinya jika terjadi kenaikan permintaan akhir sektor listrik, gas dan air minum satu unit, maka output perekonomian akan meningkat sebesar 1,183 unit.
- d. Bangunan = 1,337 artinya jika terjadi kenaikan permintaan akhir sektor bangunan satu unit, maka output perekonomian akan meningkat sebesar 1,337 unit.
- e. Pengangkutan dan komunikasi = 1,085 artinya jika terjadi kenaikan permintaan akhir sektor pengangkutan dan komunikasi satu unit, maka output perekonomian akan meningkat sebesar 1,085 unit.
- f. Jasa-jasa = 1,075 artinya jika terjadi kenaikan permintaan akhir sektor jasa-jasa satu unit, maka output perekonomian akan meningkat sebesar 1,075 unit.

Sektor yang mempunyai angka keterkaitan ke mukanya lebih besar dari satu berarti bahwa keterkaitan ke muka sektor tersebut lebih besar dari keterkaitan ke muka rata-rata secara keseluruhan. Dari tabel 5.1 di atas dapat dilihat sektor yang mempunyai angka keterkaitan ke muka yang lebih dari satu adalah :

- a. Pertambangan dan penggalan = 1,584 artinya jika permintaan akhir seluruh sektor meningkat masing-masing satu unit, maka output sektor pertambangan dan penggalan akan meningkat sebesar 1,584 unit.
- b. Industri pengolahan = 2,482 artinya jika permintaan akhir seluruh sektor meningkat masing-masing satu unit, maka output sektor industri pengolahan akan meningkat sebesar 2,482 unit.

- c. Perdagangan, hotel dan restoran = 1,527 artinya jika permintaan akhir seluruh sektor meningkat masing-masing satu unit, maka output sektor perdagangan, hotel dan restoran akan meningkat sebesar 1,527 unit.

Analisis sektor kunci menunjukkan peran masing-masing sektor dalam Indeks Backward Linkage dan Indeks Forward Linkage. Suatu sektor termasuk sektor kunci jika nilai IBL > 1 dan IFL > 1. Dari tabel 5.1 yang memegang sektor kunci di Kabupaten Cilacap adalah sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan serta perdagangan, hotel dan restoran.

5.2 Input Output untuk Perikanan

Untuk mengetahui dampak perikanan terhadap perekonomian Kabupaten Cilacap digunakan Tabel Input Output Jawa Tengah tahun 2004 yang telah disesuaikan dengan Location Quotient (LQ). Dari Lampiran 6 (Tabel Transaksi Kabupaten Cilacap) diperoleh beberapa hal sebagai berikut :

5.2.1 Struktur Input Antara

Input antara adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk barang dan jasa yang digunakan habis dalam proses produksi. Komponen input antara terdiri dari barang tidak tahan lama dan jasa yang dapat berupa hasil produksi dalam Kabupaten Cilacap maupun diimpor dari luar daerah. Contoh dari input antara adalah bahan baku, bahan penolong, jasa perbankan dan sebagainya. Struktur input antara untuk sub sektor perikanan terdiri dari :

- a. Tanaman bahan makanan sebesar Rp. 271,51 juta atau sebesar 1,077 % dari total input antara untuk perikanan
- b. Tanaman perkebunan sebesar Rp. 0,27 juta atau sebesar 0,001 % dari total input antara untuk perikanan.
- c. Peternakan dan hasil-hasilnya sebesar Rp. 174,61 juta atau sebesar 0,69 % dari total input antara untuk perikanan.

- d. Kehutanan sebesar Rp. 33,92 juta atau sebesar 0,135 % dari total input antara untuk perikanan.
- e. Perikanan sebesar Rp. 956,11 juta atau sebesar 3,79 % dari total input antara untuk perikanan.
- f. Pertambangan dan penggalian tidak digunakan dalam proses produksi untuk sub sektor perikanan.
- g. Industri pengolahan sebesar Rp. 17.221,55 juta atau sebesar 68,33 % dari total input antara untuk perikanan.
- h. Listrik, gas dan air minum sebesar Rp. 25,37 juta atau sebesar 0,1 % dari total input antara untuk perikanan.
- i. Bangunan sebesar Rp. 148,65 juta atau sebesar 0,59 % dari total input antara untuk perikanan.
- j. Perdagangan, hotel dan restoran sebesar Rp. 5.125,14 juta atau sebesar 20,34 % dari total input antara untuk perikanan.
- k. Pengangkutan dan komunikasi sebesar Rp. 939,51 juta atau sebesar 3,73 % dari total input antara untuk perikanan.
- l. Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar Rp. 237,53 juta atau sebesar 0,94 % dari total input antara untuk perikanan.
- m. Jasa-jasa sebesar Rp. 67,99 juta atau 1,08 % dari total input antara untuk perikanan.

Dari struktur input antara tersebut terlihat bahwa sub sektor perikanan tergantung pada output dari sektor industri pengolahan; sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sub sektor perikanan sendiri untuk proses produksi sub sektor perikanan.

5.2.2 Struktur Permintaan Antara

Permintaan antara adalah permintaan atas barang dan jasa sebagai input untuk proses produksi lebih lanjut oleh sektor lain. Struktur permintaan antara untuk sub sektor perikanan adalah :

- a. Tanaman Bahan Makanan sebesar Rp. 3.616,72 juta atau 13,23 % dari total permintaan antara sub sektor perikanan.
- b. Tanaman perkebunan sebesar Rp. 472,23 juta atau 1,73 % dari total permintaan antara sub sektor perikanan.
- c. Peternakan dan hasil-hasilnya sebesar Rp. 65,65 juta atau 0,24 %
- d. Kehutanan sebesar Rp. 605,28 juta atau 2,21 % dari total permintaan antara sub sektor perikanan.
- e. Perikanan sebesar Rp. 956,11 juta atau 3,498 % dari total permintaan antara sub sektor perikanan.
- f. Pertambangan dan penggalian tidak membutuhkan output perikanan.
- g. Industri pengolahan sebesar Rp. 16.133,02 juta atau 59,03 % dari total permintaan antara sub sektor perikanan.
- h. Listrik, Gas dan air minum tidak membutuhkan output perikanan.
- i. Bangunan tidak membutuhkan output perikanan.
- j. Perdagangan, hotel dan restoran sebesar Rp. 5.077,02 juta atau 18,58 % dari total permintaan antara sub sektor perikanan.
- k. Pengangkutan dan komunikasi sebesar Rp. 26,04 juta atau 0,095 % dari total permintaan antara sub sektor perikanan.
- l. Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar Rp. 18,76 juta atau 0,069 % dari total permintaan antara sub sektor perikanan.
- m. Jasa-jasa sebesar Rp. 359,41 juta atau 1,13 % dari total permintaan antara sub sektor perikanan.

Dari struktur permintaan antara tersebut terlihat bahwa output perikanan dibutuhkan paling besar sebagai input untuk industri pengolahan diikuti perdagangan, hotel dan restoran, tanaman bahan makanan serta perikanan sendiri.

5.2.3 Struktur Output

Output merupakan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi di suatu wilayah. Dari struktur nilai output tiap-tiap sektor ekonomi dapat diketahui sektor-sektor yang memiliki sumbangan relatif besar

dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya bagi pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Struktur output dari kabupaten Cilacap terdiri dari :

- a. Tanaman Bahan Makanan sebesar 10,62 % dari total output.
- b. Tanaman perkebunan sebesar 0,78 % dari total output
- c. Peternakan dan hasil-hasilnya sebesar 1,52 % dari total output.
- d. Kehutanan sebesar 0,58 % dari total output.
- e. Perikanan sebesar 0,72 % dari total output.
- f. Pertambangan dan penggalian sebesar 1,11 % dari total output.
- g. Industri pengolahan sebesar 54,86 % dari total output.
- h. Listrik, Gas dan air minum sebesar 0,33 % dari total output.
- i. Bangunan sebesar 1,83 % dari total output.
- j. Perdagangan, hotel dan restoran sebesar 20,84 % dari output.
- k. Pengangkutan dan komunikasi 1,77 % dari total output.
- l. Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 1,84 % dari total output.
- m. Jasa-jasa sebesar 3,18 % dari total output.

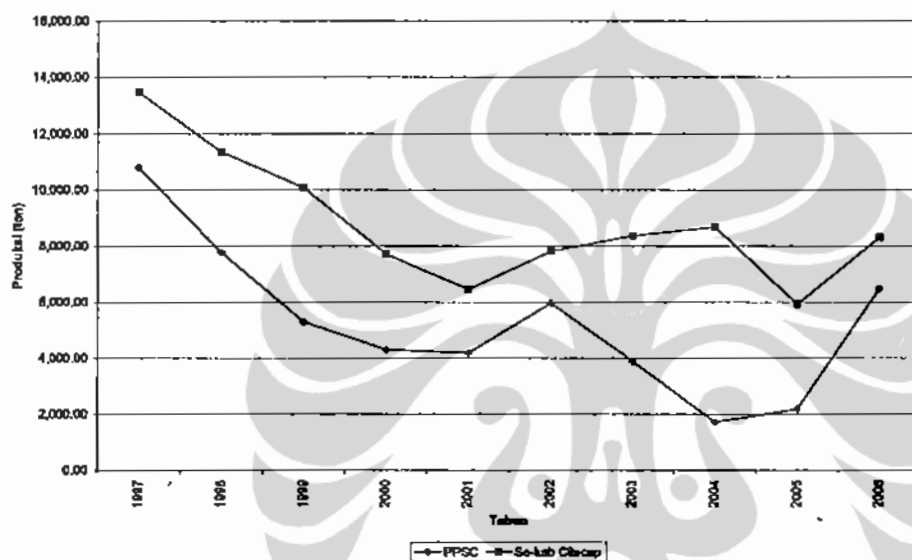
Dari struktur output tersebut terlihat bahwa kontribusi yang cukup besar dalam pembentukan total output adalah sektor industri pengolahan; perdagangan, hotel dan restoran, tanaman bahan makanan serta jasa-jasa. Sub sektor perikanan hanya memberi kontribusi sebesar 0,72 % dalam pembentukan output.

5.3 Keragaan Operasional PPS Cilacap

Keragaan operasional di pelabuhan perikanan meliputi produksi dan nilai produksi hasil tangkapan; armada penangkap ikan (kapal); alat tangkap; nelayan; banyaknya tenaga kerja yang terserap; perkembangan investasi pemerintah di PPS Cilacap; jenis produk, volume dan nilai ekspor komoditi perikanan Cilacap; kegiatan ekonomi dan pelaksanaan kebijakan di PPS Cilacap.

5.3.1 Produksi dan Nilai Produksi hasil tangkapan

Produksi hasil tangkapan merupakan salah satu indikasi tingkat aktivitas atau operasional suatu pelabuhan perikanan. Berdasarkan Lampiran 7, perbandingan antara produksi hasil tangkapan di PPS Cilacap dengan TPI se-Kabupaten Cilacap dapat disajikan dalam gambar berikut.



Grafik 5.1 Perbandingan produksi hasil tangkapan di PPS Cilacap dengan TPI se-Kabupaten Cilacap

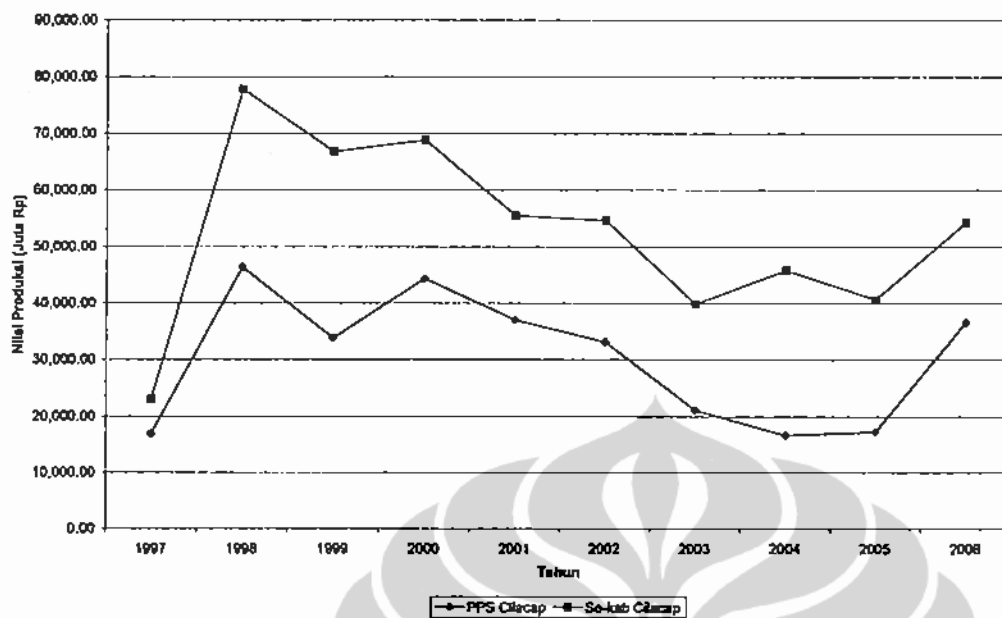
Sumber: PPS Cilacap, 2007 (data diolah)

Dari Gambar 5.1 di atas terlihat bahwa volume produksi di Kabupaten Cilacap mengalami penurunan. Demikian juga volume produksi di PPS Cilacap mengalami penurunan. Volume produksi tertinggi untuk PPS Cilacap terjadi pada tahun 1997 yaitu sebanyak 10.787,21 ton, sedangkan volume terendah terjadi pada tahun 2004 yaitu hanya sebanyak 1.721,74 ton. Volume produksi tertinggi di Kabupaten Cilacap terjadi pada tahun 1997 sebanyak 13.464,91 ton (kontribusi PPS Cilacap sebesar 80,11%) dan volume produksi terendah di Kabupaten Cilacap terjadi pada tahun 2005 sebanyak 5.918,31 ton (kontribusi PPS Cilacap sebesar 36,77%).

Volume tersebut terbagi dua yaitu volume produksi pra dan pasca peningkatan status pelabuhan. Volume produksi pra peningkatan status rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan pasca peningkatan status. Hal ini disebabkan oleh adanya pendangkalan pada alur masuk kolam pelabuhan, puncaknya terjadi pada pasca peningkatan status. Pendangkalan ini menyebabkan kapal-kapal besar tidak dapat mendaratkan hasil tangkapan di PPS Cilacap dan mengalihkan tempat pendaratannya ke tempat lain seperti Pelabuhan Niaga Tanjung Intan dan TPI Battery. Selain adanya pendangkalan, kenaikan harga BBM juga mengakibatkan penurunan volume produksi. Hal ini dikarenakan banyak kapal yang tidak melaut karena biaya untuk melaut meningkat sedang harga dan jumlah hasil tangkapan tidak berubah.

Nilai produksi hasil tangkapan ikan di pelabuhan perikanan dipengaruhi oleh jumlah, komposisi jenis ikan hasil tangkapan dan harga hasil tangkapan (berdasarkan mutu dan jenis). Jumlah hasil tangkapan akan berbanding lurus dengan nilai produksi hasil tangkapan dengan asumsi komposisi jenis hasil tangkapan tetap, misal jumlah hasil tangkapan naik maka nilainya pun secara langsung akan naik.

Nilai produksi hasil tangkapan per tahun dari 1997-2006 secara umum mengalami fluktuatif. Nilai produksi tertinggi terjadi pada tahun 1998 yaitu sebesar Rp. 46.370.000.000,00 dan terendah terjadi tahun 2004 sebesar Rp. 16.588.330.000,00. Berdasarkan Lampiran 1, perbandingan nilai produksi PPS Cilacap dengan TPI se-Kabupaten Cilacap dapat disajikan pada gambar 5.2 berikut.



Grafik 5.2 Perbandingan nilai produksi di PPS Cilacap dengan TPI se-Kabupaten Cilacap

Sumber: PPS Cilacap, 2007 (data diolah)

Perbandingan nilai dan volume produksi hasil tangkapan per tahunnya secara umum mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh peningkatan harga ikan hasil tangkapan atau peningkatan komposisi hasil tangkapan ikan ekonomis tinggi. Peningkatan harga ikan adalah yang paling memungkinkan karena harga ikan dipengaruhi oleh inflasi barang-barang lain dan adanya peningkatan permintaan barang dari produk substitusi ikan seperti daging sapi, daging ayam dan daging kambing.

5.3.2 Armada Penangkap Ikan (Kapal)

Kapal merupakan bagian unit penangkapan yang berfungsi sebagai kendaraan atau transportasi laut untuk menjangkau *fishing ground* dan membawa hasil tangkapan ke *fishing base*. Kapal di PPS Cilacap memiliki ukuran dari 5 GT sampai di atas 100 GT. Keadaan alam *fishing ground* menuntut kapal-kapal di Laut Selatan Jawa harus memiliki ukuran yang besar. Perkembangan masuk dan keluarnya kapal dari tahun 1997-2006 dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5.2 Perkembangan masuk dan keluarnya kapal di PPS Cilacap

Tahun	Kapal masuk					Kapal keluar				
	< 10 GT	10-20 GT	21-30 GT	> 30 GT	Jml	< 10 GT	10-20 GT	21-30 GT	> 30 GT	Jml
1997	287	3.565	2.346	1.632	7.830	280	3.305	2.092	1.466	7.143
1998	570	4.591	2.570	1.690	9.421	513	4.182	2.243	1.536	8.474
1999	383	3.821	2.448	1.542	8.195	358	3.666	2.308	1.409	7.741
2000	324	3.451	2.153	1.361	7.289	306	3.434	2.138	1.348	7.226
2001	208	2.877	1.981	1.474	6.540	192	2.831	1.981	1.468	6.472
2002	81	1.881	1.679	560	4.201	72	1.415	1.479	759	3.725
2003	36	1.163	1.222	329	2.750	39	1.021	1.244	302	2.606
2004	258	1.096	948	352	2.654	2	779	859	148	1.788
2005	31.387	802	1.049	254	33.492	31.387	502	1.129	94	33.412
2006	23.167	9.925	21.369	14.936	69.397	22.090	645	1.789	229	24.753

Sumber: PPS Cilacap, 2007

Perkembangan masuk dan keluarnya kapal dari tahun 1997-2006 dapat menunjukkan perkembangan aktivitas pelabuhan perikanan tiap tahunnya. Kapal masuk yang paling sedikit terjadi pada tahun 2004 yaitu hanya sebanyak 2.654 unit, hal ini berpengaruh pada volume produksi dimana pada tahun ini merupakan volume produksi terkecil. Masuknya kapal ke pelabuhan perikanan bisa melakukan beberapa aktivitas antara lain bongkar/mendaratkan hasil tangkapan, memuat perbekalan untuk melaut (solar, air dan es) maupun docking/perbaikan kapal. Hal ini mengakibatkan walaupun banyak kapal masuk belum tentu produksi yang didaratkan di PPS Cilacap akan besar. Contohnya pada tahun 2005 kapal masuk sebanyak 33.492 unit tetapi volume produksi hanya sebanyak 2.176,26 ton, pada tahun 2006 kapal masuk sebanyak 69.397 unit tetapi volume produksi sebanyak 6.475,15 ton. Selain itu banyaknya volume produksi juga dipengaruhi oleh ukuran kapal yang masuk ke pelabuhan perikanan. Hal ini bisa dilihat pada tahun 2005 didominasi oleh kapal kurang dari 10 GT.

5.3.3 Alat tangkap

Alat tangkap yang efektif merupakan alat tangkap yang dapat menyesuaikan dengan keadaan alam *fishing ground* baik fisik maupun sumberdaya hayatinya. Kondisi fisik berhubungan dengan konstruksi dari alat tangkap tersebut baik ukuran dan jenis bahan yang digunakan. Kondisi sumberdaya hayati berhubungan dengan target hasil tangkapan dan konstruksi alat tangkap. Jenis alat tangkap berhubungan dengan jenis ikan yang tertangkap dan didaratkan di PPS Cilacap.

Tabel 5.3 Jenis dan Jumlah Alat Tangkap di PPS Cilacap

Jenis Alat Tangkap	Jumlah Alat Tangkap/Tahun anggaran				
	2002	2003	2004	2005	2006
Long Line	155	147	62	161	128
Gill net	158	152	121	147	201
Trammelnet	461	446	396	294	297
Payang	0	0	0	6	8
Arad	24	30	35	39	40
Bubu	0	0	0	0	0
Jumlah	798	775	614	647	674

Sumber: PPS Cilacap, 2007

Diversifikasi jenis alat tangkap dari tahun ke tahun tidak berkembang, alat tangkap jenis purseine belum ada, sementara jenis ikan pelagis kecil potensinya cukup besar. Alat tangkap Trammel Net terus berkurang, karena hasil tangkapan cenderung semakin menurun (*gejala over fishing*).

5.3.4 Nelayan

Nelayan di PPS Cilacap merupakan salah satu kelompok nelayan dari tujuh kelompok nelayan yang ada di Kabupaten Cilacap. Adapun jumlah nelayan yang ada di PPS Cilacap adalah sebagai berikut :

Tabel 5.4 Perkembangan jumlah nelayan di PPS Cilacap

Tahun	Jumlah nelayan (orang)
2002	5.380
2003	5.188
2004	2.580
2005	3.875
2006	4.914

Sumber: PPS Cilacap 2007

Jumlah nelayan yang terdapat di PPS Cilacap mengalami fluktuasi, hal ini sesuai dengan jumlah kapal yang masuk ke pelabuhan. Pada tahun 2004 dan 2005 terjadi penurunan jumlah nelayan yang disebabkan oleh menurunnya jumlah kapal yang beraktivitas karena adanya pendangkalan. Umumnya nelayan adalah sebagai ABK (Anak Buah Kapal). Jumlah ABK di setiap kapal berbeda, tergantung dari jenis alat tangkapnya seperti Long Line 14 orang, Gill Net dan Payang 12 orang, Trammel Net 9 orang, Arad dan Bubu masing-masing 3 orang.

5.3.5 Tenaga Kerja yang Terserap

Tenaga kerja yang terserap di PPS Cilacap meliputi tenaga kerja yang terserap di Pelabuhan Perikanan, di Perusahaan dan juga merupakan tenaga lepas. Adapun perkembangan jumlah tenaga kerja yang terserap dapat dilihat pada tabel 5.5 berikut.

Tabel 5.5 Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Terserap di PPS Cilacap

Tahun Anggaran	Jumlah tenaga kerja terserap (orang)			
	Di PP	Di Perusahaan	Tenaga Lepas	Jumlah
2002	70	320	136	526
2003	69	327	134	530
2004	67	467	132	666
2005	68	523	140	731
2006	81	585	142	808

Jumlah tenaga kerja lingkup pelabuhan perikanan mengalami peningkatan rata-rata 14,24%. Tenaga kerja terserap terbanyak pada perusahaan (76%), disusul tenaga lepas (15%) dan pegawai pelabuhan 9%. Tenaga kerja di perusahaan sebagian besar pada industri pengolahan (53%), sisanya 47% pada kegiatan usaha lainnya (pergudangan, bengkel dan dock, pertokoan, SPBU, TPI).

5.3.6 Perkembangan Investasi Pemerintah di PPS Cilacap

Investasi pemerintah di PPS Cilacap digunakan untuk pembangunan fasilitas yang mendukung operasional PPS Cilacap. Sumber dana yang digunakan berasal dari APBN maupun dari pinjaman. Adapun perkembangan investasi pemerintah di PPS Cilacap dapat disajikan pada tabel 5.6 berikut.

Tabel 5.6 Perkembangan Investasi Pemerintah di PPS Cilacap

No	Tahun	Nilai (rupiah)	Sumber Dana
1	1990/1991	400.000.000	Pertamina
2	1991/1992	500.000.000	Pertamina
3	1992/1993	12.950.000.000	Pertamina
4	1993/1994	7.900.000.000	Pertamina
		277.640.000	APBN
5	1994/1995	342.960.000	APBN
		700.000.000	ZEEI/DIKS
6	1995/1996	153.920.000	APBN

No	Tahun	Nilai (rupiah)	Sumber Dana
		212.500.000	ZEEI/DIKS
7	1996/1997	1.693.201.000	APBN
		1.610.635.000	ZEEI/DIKS
8	1997/1998	374.390.000	APBN
		990.876.000	ZEEI/DIKS
9	1998/1999	305.482.000	APBN
	1998/1999	405.828.000	APBN
10	1999/2000	167.000.000	APBN
11	2000	9.803.720.000	SPL-OECF
12	2001	400.000.000	APBN
13	2002	500.000.000	APBN
14	2003	12.900.000.000	APBN
15	2004	7.900.000.000	APBN
16	2005	29.864.139.000	APBN
17	2006	35.261.816.000	APBN
	Jumlah	90.352.291.000	

Sumber : PPS Cilacap, 2007

Dari tabel 5.6 terlihat pada awal pembangunannya, PPS Cilacap mendapat dana pembangunan dari Pertamina. Baru pada tahun keempat pemerintah mulai menginvestasikan dana untuk pembangunan PPS Cilacap melalui APBN.

5.3.7 Jenis Produk, Volume dan Nilai Ekspor Komoditi Perikanan Cilacap

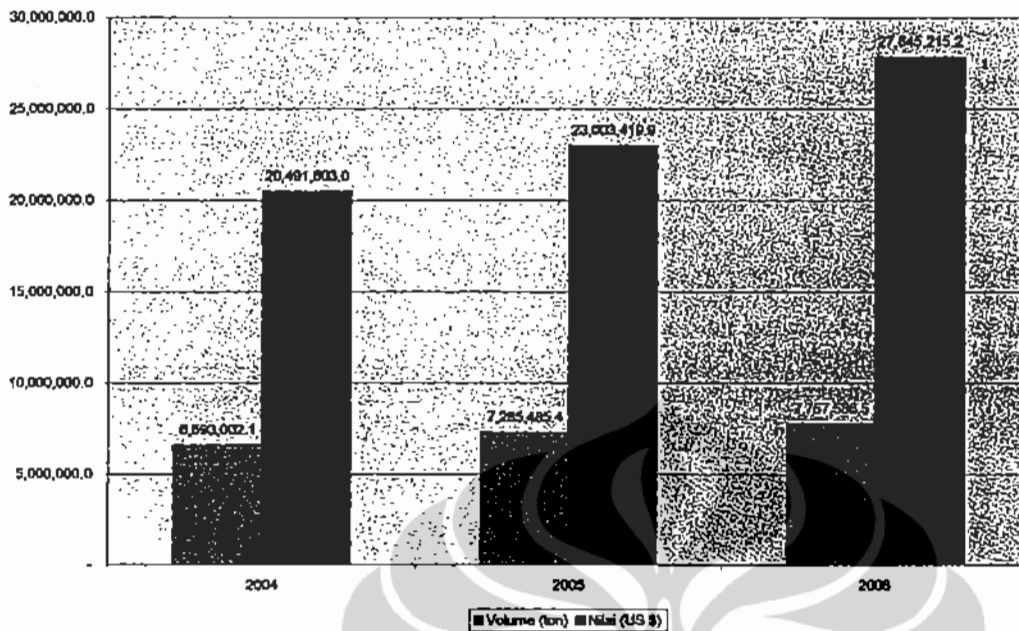
Produksi hasil perikanan di PPS Cilacap selain untuk pasar domestik juga untuk tujuan ekspor. Jenis produk yang di ekspor antara lain : tuna dalam kaleng, udang beku, tuna pouch, frozen cooked, lobster beku, bawal beku, ubur-ubur asin, tuna loyn beku, ikan teri dan udang kering (seperti dalam Tabel 5.7).

Tabel 5.7 Jenis Produk, Volume dan Nilai Ekspor Perikanan

Jenis Produk	2004		2005		2006	
	Volume (ton)	Nilai (US \$)	Volume (ton)	Nilai (US \$)	Volume (ton)	Nilai (US \$)
Bawal beku	1,754.0	13,456.8	5,590.0	25,340.4	41,504.5	198,472.6
Frozen cooked	24,013.0	69,429.9			175,000.0	357,000.0
Ikan teri			7,038.0	70,341.0	7,482.0	50,955.6
Keong beku	17,277.0	8,638.5				
Kerapu beku					992.0	3,566.2
Layur beku	11,121.5	39,834.4	28,780.5	88,641.2	23,274.0	89,110.8
Lobster	2,642.0	32,740.8	505.0	6,918.9	69,931.0	937,376.0
Tuna beku	29,640.0	81,270.0	40,000.0	40,100.0		
Tuna kaleng	5,020,239.3	15,067,514.0	5,906,855.1	17,621,281.2	6,611,802.0	21,074,904.7
Tuna Loyn beku			38,640.0	136,272.0	10,320.0	63,984.0
Tuna pouch	83,212.8	339,166.0	122,821.2	478,150.2	193,027.2	684,707.0
Ubur-ubur asin			308,736.0	207,111.5	139,898.0	79,261.3
Ubur-ubur kering	970,810.0	820,525.0	435,595.0	894,013.7	10.0	
Udang beku	432,292.5	4,019,227.6	390,924.6	3,435,249.8	474,345.8	4,255,877.0
Udang kering					10,000.0	50,000.0
Jumlah	6,593,002.1	20,491,803.0	7,285,485.4	23,003,419.9	7,757,586.5	27,845,215.2

Sumber : PPS Cilacap, 2007

Dari tabel 5.7 di atas terlihat bahwa produk perikanan yang selalu diekspor tiap tahun (produknya selalu tersedia setiap tahun) adalah bawal beku, layur beku, lobster, tuna beku, tuna kaleng, tuna pouch dan udang beku. Adapun perkembangan volume dan nilai ekspornya dapat dilihat pada grafik 5.3 berikut.



Grafik 5.3 Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor

Sumber : PPS Cilacap (data diolah)

Jenis penanganan ikan setelah didaratkan di PPS Cilacap antara lain dengan pengolahan modern (bahan baku pengalengan, beku), pengolahan tradisional (pindang, asin, asap) dan bentuk segar/utuh. Untuk produk beku tujuannya adalah PT. Toxindo Prima, sedang bahan baku pengalengan untuk PT. Juifa dan PT. ATI yang hasilnya untuk diekspor. Sedangkan produk pengolahan tradisional (pindang dan asin) dipasarkan di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Untuk produk yang diasap tujuan pemasaran ke lokal Banyumas. Untuk produk utuh atau segar tujuan pemasarannya adalah Jawa dan diekspor.

5.3.8 Kegiatan Ekonomi

Kegiatan ekonomi yang ada di PPS Cilacap mendukung operasional PPS Cilacap sendiri. Kegiatan ekonomi ini dilakukan oleh pengusaha besar, pengusaha kecil dan jenis usaha di luar kawasan PPS Cilacap. Adapun kegiatan ekonomi yang dimaksud berdasar jenis usahanya dapat disajikan pada tabel 5.8 berikut.

Tabel 5.8 Kegiatan Ekonomi di PPS Cilacap

No	Jenis Usaha	Jumlah Pelaku Usaha
A. Pengusaha Besar		
1	SPBU	1
2	Pabrik Es	1
3	Gudang dan Bengkel	12
4	Pengolahan dan Cold Storage	15
5	Toko BAP	3
6	Dock/Slipway	1
B. Pengusaha Kecil		
1	Pujasera	16
2	Kios Permanen	36
C. Di luar Area Kawasan PPSC		
1	Pengalengan ikan tuna dan cakalang	1
2	Pabrik Es kapasitas masing-masing 80 ton/hari	3

Sumber : PPS Cilacap, 2007

Dari tabel 5.8 di atas terlihat bahwa kegiatan ekonomi di PPS Cilacap masih didominasi oleh pengusaha kecil terutama untuk jenis usaha Pusat Jajan Serba Ada (Pujasera) dan kios permanen untuk Unit Bisnis Perikanan Terpadu (UBPT). Sedangkan pengusaha besar mempunyai jenis usaha yang membutuhkan modal cukup besar seperti SPBU, pabrik es, pengolahan dan cold storage, gudang dan bengkel serta docking/slipway.

5.3.9 Pelaksanaan Kebijakan

PPS Cilacap merupakan UPT Pusat yang berada di daerah dalam wilayah administratif Jawa Tengah, sehingga arah pengembangannya selalu berupaya menjembatani kepentingan pusat dan daerah. Untuk mewujudkan hal ini maka perlu mengakomodir berbagai aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat, agar

terwujud sinergi program bagi kemajuan dan kemandirian masyarakat nelayan dan pengusaha perikanan (Laporan Tahunan PPS Cilacap, 2007). Untuk mewujudkannya maka kebijakan yang diambil adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas pelayanan terhadap seluruh pengguna jasa, melalui peningkatan sumberdaya manusia, perencanaan pengembangan dan pemeliharaan serta optimalisasi pemanfaatan fasilitas pokok, fasilitas fungsional serta fasilitas penunjang.
- b. Peningkatan kesejahteraan nelayan dan pemberdayaan masyarakat perikanan melalui pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) baik terhadap nelayan penangkap ikan maupun pengolah hasil tangkapan. Termasuk pemasarannya melalui Unit Bisnis Perikanan Terpadu (UBPT).
- c. Pemanfaatan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan melalui pengembangan sistem ketaatan kapal, peningkatan kesadaran hukum di bidang perikanan, peningkatan sarana dan prasarana pengawasan.
- d. Pengembangan sistem informasi perikanan yang dapat diakses secara luas dan mudah oleh berbagai pihak yang berkepentingan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

5.4 Analisis Location Qoutient

Dari hasil penghitungan menggunakan Location Qoutient (LQ) dari PDRB kabupaten Cilacap dengan Propinsi Jawa Tengah dari tahun 2000 sampai 2006 dapat dijelaskan sektor-sektor yang menjadi basis dan non basis. Adapun sektor yang menjadi basis dan non basis di Kabupaten Cilacap (dengan menggunakan persamaan 3.1) terdapat pada Tabel 5.9 berikut.

Tabel 5.9 Nilai Location Quotient Kabupaten Cilacap

LAPANGAN USAHA	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1. PERTANIAN	0.72	0.74	0.68	0.71	0.68	0.64	0.64
a. Tanaman Bahan Makanan	0.76	0.79	0.70	0.73	0.70	0.67	0.66
b. Tanaman Perkebunan	0.36	0.36	0.40	0.41	0.40	0.43	0.42
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	0.58	0.62	0.61	0.66	0.67	0.63	0.62
d. Kehutanan	1.21	1.42	1.37	2.22	1.67	1.02	1.27

LAPANGAN USAHA	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
e. Perikanan	0.87	0.76	0.83	0.66	0.56	0.55	0.55
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	1.07	1.07	1.14	1.14	1.14	1.09	1.01
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	1.69	1.67	1.68	1.69	1.69	1.73	1.75
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	0.45	0.46	0.47	0.46	0.42	0.42	0.41
5. BANGUNAN	0.40	0.40	0.37	0.35	0.33	0.32	0.32
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	0.89	0.94	0.96	0.96	1.00	0.99	0.99
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	0.44	0.42	0.39	0.37	0.37	0.37	0.40
8. KEUANGAN, PERSEWAAN, & JS. PRSH.	0.55	0.56	0.54	0.53	0.52	0.53	0.52
9. JASA-JASA	0.40	0.36	0.38	0.33	0.32	0.30	0.28

Dari tabel 5.9 diatas dapat dijelaskan beberapa hal berikut :

- a. Dasar pertimbangan suatu sektor menjadi sektor basis apabila *Location Quotient* (LQ) >1 dan sebaliknya jika LQ < 1 maka sektor tersebut menjadi sektor non basis.
- b. Pada tahun 2000 – 2006 sektor-sektor yang menjadi basis di kabupaten Cilacap adalah :
 - Pertambangan dan Penggalian.
 - Industri pengolahan. Hal ini disebabkan di Cilacap terdapat beberapa BUMN dan perusahaan seperti Pertamina Unit Pengolahan IV dan PT. Holcim.
- c. Sedangkan sektor yang menjadi non basis pada tahun 2000-2006 di kabupaten Cilacap adalah : sektor pertanian; listrik, gas dan air bersih; bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta jasa-jasa.
- d. Pada tahun 2004 perdagangan, hotel dan restoran menjadi sektor basis di Kabupaten Cilacap.

Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertambangan dan penggalian serta industri pengolahan merupakan sektor utama yang menggerakkan perekonomian kabupaten Cilacap. Untuk sektor industri pengolahan sesuai dengan tabel transaksi dari penyesuaian Tabel IO Jawa Tengah tahun 2004.

5.5 Kontribusi Sektor-sektor ekonomi dalam PDRB Cilacap

Sektor-sektor yang memegang peranan penting dalam perekonomian Kabupaten Cilacap sesuai dengan Lampiran 10 antara lain :

- a. Industri pengolahan memberi kontribusi sebesar 52,51% pada tahun 2000 dan meningkat menjadi 55,89% pada tahun 2006, terutama sub sektor industri migas (pengilangan minyak bumi).
- b. Perdagangan, hotel dan restoran memberi kontribusi 20,32% pada tahun 2000 dan meningkat menjadi 20,96% pada tahun 2006, terutama sub sektor perdagangan besar dan eceran.
- c. Pertanian memberi kontribusi 16,39% pada tahun 2000 tetapi menurun menjadi 13,11% pada tahun 2006. Sub sektor yang mengalami penurunan antara lain tanaman bahan makanan, peternakan dan hasil-hasilnya, kehutanan dan perikanan. Hanya tanaman perkebunan yang kontribusinya meningkat.

Dengan melihat kontribusi sektor-sektor dalam PDRB, terlihat bahwa sektor industri pengolahan terutama sub sektor industri migas memegang peranan terpenting dalam PDRB Kabupaten Cilacap. Hal ini disebabkan oleh adanya Pertamina Unit Pengolahan IV di Cilacap.

5.6 Kawasan Andalan/Proritas di Kabupaten Cilacap

Konsep kawasan andalan memiliki relevansi yang erat dengan konsep dan teori pembangunan regional. Dilihat dari kriteria penetapannya, konsep kawasan andalan didukung oleh teori pertumbuhan ekonomi, teori basis ekonomi, teori pusat pertumbuhan dan teori spesialisasi.

Penciptaan peluang investasi dapat dilakukan dengan memberdayakan potensi sektor unggulan yang dimiliki oleh kawasan bersangkutan. Sektor/subsektor unggulan yang diukur dengan Location Quotient (LQ) memiliki kesamaan dengan sektor ekonomi basis, dimana pertumbuhannya menimbulkan dan menentukan pembangunan menyeluruh daerah itu, sedangkan aktivitas-

aktivitas lain (non basis) merupakan konsekuensi pembangunan menyeluruh tersebut (Soepono, 2000 dalam Kuncoro, 2002).

Penempatan kriteria pertumbuhan sebagai dasar penetapan kawasan andalan relevan dengan teori pusat pertumbuhan Perroux (1975) yang mengatakan bahwa pertumbuhan tidak muncul di berbagai daerah pada waktu yang sama. Pertumbuhan hanya terjadi di berbagai tempat yang disebut pusat pertumbuhan dengan intensitas berbeda. Dalam kaitannya dengan sektor unggulan, Perroux mengatakan bahwa industri unggulan merupakan penggerak utama dalam pembangunan daerah dan adanya sektor/industri unggulan memungkinkan dilakukan pemusatan industri yang akan mempercepat pertumbuhan ekonomi, karena pemusatan industri akan menciptakan pola konsumsi yang berbeda antar daerah sehingga perkembangan industri di suatu daerah akan mempengaruhi perkembangan daerah lainnya. Perekonomian merupakan gabungan dari sistem industri yang relatif aktif (industri unggulan) dengan industri-industri yang relatif pasif yaitu industri yang tergantung dari industri unggulan atau pusat pertumbuhan. Daerah yang relatif maju atau aktif akan mempengaruhi daerah-daerah yang relatif pasif (Arsyad, 1999).

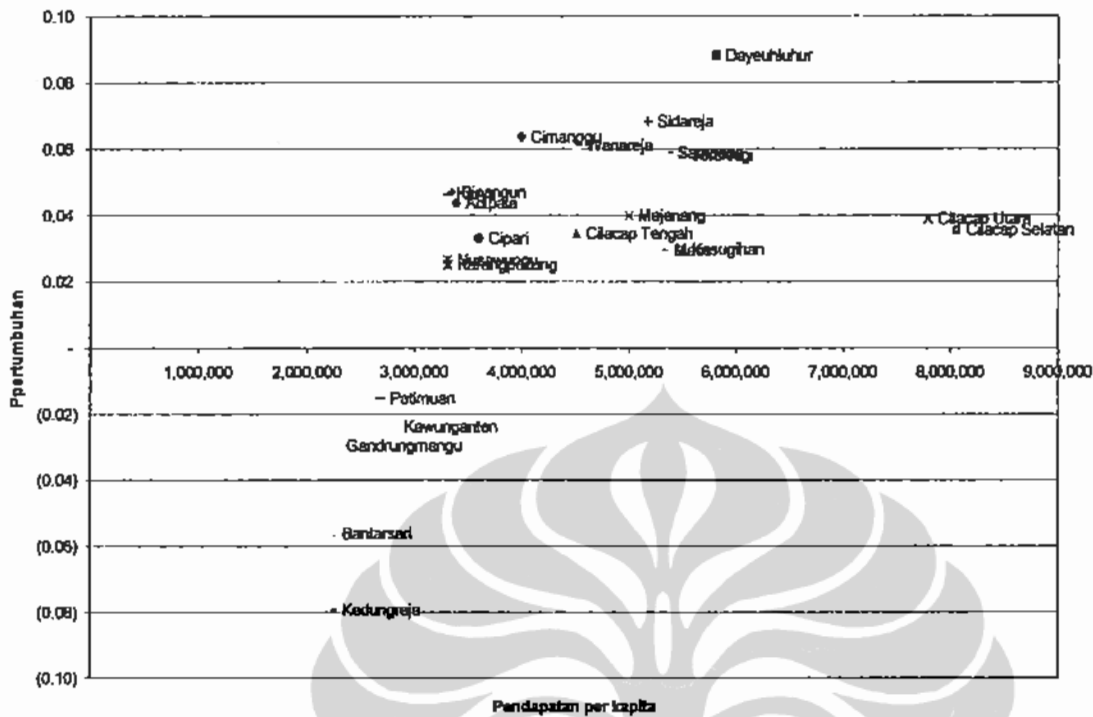
Keterkaitan perekonomian kawasan andalan dengan daerah sekitar sebagai salah satu kriteria penetapannya relevan dengan konsep spesialisasi. Adanya spesialisasi komoditas sesuai dengan sektor/subsektor unggulan yang dimiliki, memungkinkan dilakukan pemusatan kegiatan sektoral pada masing-masing daerah yang akan mempercepat pertumbuhan di daerah. Ekonomi spesialisasi telah memungkinkan terbentuknya jaringan perdagangan antarindividu dan antarnegara. Adanya keterkaitan ekonomi (spesialisasi) antar daerah yang mendorong proses pertukaran sesuai kebutuhan masing-masing, memungkinkan Bergeraknya perekonomian masing-masing daerah secara bersama-sama menuju proses pertumbuhan.

Kawasan andalan/prioritas Kabupaten Cilacap mengacu pada RT/RW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten Cilacap 2004-2014, terdiri dari kota Cilacap (kecamatan Cilacap Selatan, Kecamatan Cilacap Tengah dan Kecamatan Cilacap Utara), Kecamatan Dayeuhluhur, Majenang, Patimuan, Sidareja, Kroya, Sampang, dan Nusawungu.

5.7 Analisis Tipologi Daerah

Alat analisis Tipologi Daerah digunakan untuk mengetahui tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Menurut Tipologi Daerah, daerah dibagi menjadi empat klasifikasi, yaitu daerah yang cepat maju dan cepat tumbuh, daerah maju tapi tertekan, daerah berkembang cepat, dan daerah relatif tertinggal (Sjafrizal, 1997). Kriteria yang digunakan untuk mengklasifikasikan daerah berdasarkan empat klasifikasi tersebut adalah :

- a. Daerah cepat maju dan cepat tumbuh adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Cilacap.
- b. Daerah maju tapi tertekan adalah daerah yang memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan Kabupaten Cilacap.
- c. Daerah berkembang cepat adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi, tetapi tingkat pendapatan per kapita lebih rendah dibandingkan Kabupaten Cilacap.
- d. Daerah relatif tertinggal adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Cilacap.



Grafik 5.4 Posisi Perekonomian Kecamatan di Kabupaten menurut Tipologi Daerah

Sumber : BPS Cilacap 2006 (Data diolah)

Dari Grafik 5.4 menunjukkan bahwa Kecamatan Dayeuhluhur merupakan satu-satunya daerah yang termasuk dalam kategori daerah cepat maju dan cepat tumbuh. Kecamatan yang termasuk kategori daerah maju tapi tertekan adalah Cilacap Selatan dan Cilacap Utara. Kecamatan yang termasuk kategori daerah berkembang cepat meliputi Sidareja dan Sampang. Sedangkan Kecamatan Majenang, Kroya, Patimuan, Nusawungu dan Cilacap Tengah termasuk kategori daerah relatif tertinggal.

Kecamatan pada kawasan di luar kawasan prioritas terbagi dalam tiga klasifikasi yang terdiri dari 3 (tiga) kecamatan berada pada klasifikasi daerah berkembang cepat yaitu Kecamatan Cimanggu, Wanareja dan Jeruklegi. Sedangkan 10 (sepuluh) kecamatan berada pada klasifikasi daerah relatif tertinggal yaitu kecamatan Karangpucung, Cipari, Kedungreja, Gandrungmangu, Bantarsari, Kawunganten, Kesugihan, Adipala, Maos dan Binangun.

Kecamatan Dayeuhluhur sebagai satu-satunya daerah cepat maju dan cepat tumbuh memiliki tingkat pertumbuhan dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibanding dengan Kabupaten Cilacap. Berdasarkan Lampiran 36 terlihat bahwa Kecamatan Dayeuhluhur mempunyai sektor basis pertanian, bangunan, keuangan dan jasa-jasa.

Kecamatan yang termasuk kategori daerah maju tapi tertekan adalah Cilacap Selatan (mempunyai sektor basis pertambangan dan penggalian; listrik, gas dan air bersih; bangunan; pengangkutan; keuangan dan jasa-jasa) dan Cilacap Utara (mempunyai sektor basis pertambangan dan penggalian; listrik, gas dan air bersih; bangunan; pengangkutan; keuangan dan jasa-jasa).

Kecamatan yang termasuk kategori daerah berkembang cepat meliputi Sidareja (mempunyai sektor basis pertanian, perdagangan, pengangkutan, keuangan dan jasa-jasa), Sampang (mempunyai sektor basis pertanian, bangunan, pengangkutan, keuangan dan jasa-jasa).

Kecamatan pada kawasan di luar kawasan prioritas yang berada pada klasifikasi daerah berkembang cepat yaitu Cimanggu (mempunyai sektor basis pertanian, bangunan, perdagangan, pengangkutan, keuangan dan jasa-jasa), Wanareja (mempunyai sektor basis pertanian, bangunan, perdagangan, pengangkutan, keuangan dan jasa-jasa) dan Jeruklegi (mempunyai sektor basis pertanian, pertambangan dan penggalian, pengangkutan, keuangan dan jasa-jasa).

Kecamatan yang termasuk kategori relatif tertinggal dalam kawasan prioritas adalah Majenang (hampir semua sektor menjadi sektor basis kecuali industri pengolahan dan bangunan), Kroya (mempunyai sektor basis pertanian, perdagangan, pengangkutan, keuangan dan jasa-jasa), Patimuan (hampir semua sektor menjadi sektor basis kecuali industri pengolahan, listrik, gas dan air minum serta perdagangan), Nusawungu (hampir semua sektor menjadi sektor basis kecuali industri pengolahan, listrik, gas dan air minum serta perdagangan) dan Cilacap Tengah (mempunyai sektor basis pertambangan dan penggalian; listrik, gas dan air bersih; bangunan; pengangkutan; keuangan dan jasa-jasa).

Kecamatan di luar kawasan prioritas yang termasuk kategori relatif tertinggal adalah Karangpucung, Cipari, Kedungreja, Gandrungmangu, Bantarsari, Kawunganten, Kesugihan, Adipala, Maos dan Binangun. Dari kecamatan-

kecamatan tersebut yang mempunyai banyak sektor basis adalah Kedungreja (pertanian, pertambangan, bangunan, pengangkutan, keuangan dan jasa-jasa), Kesugihan (hampir semua sektor adalah sektor basis kecuali industri pengolahan; listrik, gas dan air minum), Adipala (hampir semua sektor adalah sektor basis kecuali industri pengolahan; listrik, gas dan air minum serta perdagangan), dan Maos (hampir semua sektor adalah sektor basis kecuali industri pengolahan; listrik, gas dan air minum serta perdagangan).

Kecamatan dalam kawasan prioritas maupun di luar kawasan prioritas termasuk kategori relatif tertinggal (walaupun hampir semua sektor adalah sektor basis) disebabkan karena 1) jumlah penduduk yang relatif banyak dibandingkan kecamatan lain sehingga PDRB per kapitanya akan kecil, 2) laju pertumbuhan rata-rata yang kecil, 3) sektor yang bukan basis justru sektor yang mempunyai pengaruh cukup besar bagi perekonomian yaitu sektor industri pengolahan.

Kecamatan yang dapat dijadikan pendorong untuk peningkatan pembangunan ekonomi Kabupaten Cilacap adalah kecamatan Dayeuhluhur, Sidareja, Sampang, Cilacap Selatan, Cilacap Utara, Cimanggu, Wanareja dan Jeruklegi.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap berdampak pada pembinaan dan pemberdayaan nelayan melalui KUB dan UPBT yang berada di kawasan PPS Cilacap. Kebijakan dalam meningkatkan kualitas pelayanan PPS Cilacap diharapkan dapat menarik pengguna jasa untuk memanfaatkan fasilitas yang ada di PPS Cilacap.

Kontribusi sub sektor perikanan di kabupaten Cilacap masih rendah, hal ini disebabkan perhatian pemerintah terhadap sub sektor ini masih kurang, padahal potensi yang ada di Cilacap masih cukup besar untuk dikembangkan.

Sektor yang memegang sektor kunci di Kabupaten Cilacap adalah sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan serta perdagangan, hotel dan restoran. Sektor yang menjadi basis (dengan menggunakan Location Quotient) dalam menggerakkan perekonomian di Kabupaten Cilacap adalah pertambangan dan penggalian serta industri pengolahan. Sedangkan sektor yang memberi kontribusi cukup besar terhadap perekonomian Kabupaten Cilacap adalah industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran serta pertanian. Dengan memakai IO, LQ dan kontribusi tiap sektor terlihat bahwa sektor industri pengolahan memegang peranan penting dalam perekonomian Kabupaten Cilacap.

Kecamatan yang dapat dijadikan pendorong untuk peningkatan pembangunan ekonomi Kabupaten Cilacap adalah kecamatan Dayeuhluhur, Sidareja, Sampang, Cilacap Selatan, Cilacap Utara, Cimanggu, Wanareja dan Jeruklegi. PPS Cilacap yang berada di Cilacap Selatan diharapkan dapat menjadi pendorong pembangunan ekonomi di kecamatan Cilacap Selatan maupun kecamatan di sekitarnya.

Penetapan kawasan prioritas belum sepenuhnya tepat, untuk itu dalam menetapkan kawasan harus didasarkan pada kajian yang mendukung agar hasilnya sesuai yang diharapkan. Dengan demikian diharapkan terjadi peningkatan

pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di kabupaten Cilacap.

6.2 Saran

Pemerintah baik pusat maupun daerah dalam setiap kegiatan pembangunan menerapkan konsep pemberdayaan nelayan dengan mempertimbangkan potensi dan kebutuhan sehingga sub sektor perikanan dapat menjadi pendorong kegiatan perekonomian di Kabupaten Cilacap pada umumnya dan Kecamatan Cilacap Selatan.

Dalam menetapkan kebijakan pembangunan dan pengembangan sektoral perekonomian daerah, hendaknya lebih diprioritaskan sektor unggulan/basis yang dimiliki oleh masing-masing kecamatan. Meskipun demikian, sektor lainnya tetap mendapat perhatian secara proporsional sesuai dengan potensi dan peluang pengembangannya.

Perlu adanya pemantauan dan evaluasi terhadap berjalannya fungsi kawasan pricritas sebagai *prime mover* dan penggerak bagi pertumbuhan perekonomian wilayah, sehingga keberadaannya benar-benar dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan daerah sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin. 2004. *Ekonomi Pembangunan*, Edisi Keempat. Bagian Penerbit STIE YKPN.
- Azis, Iwan Jaya. 1984. *Ilmu Ekonomi Regional dan beberapa Aplikasinya di Indonesia*, Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi-Universitas Indonesia.
- Dahuri, R., J. Rais, S.P. Ginting dan J. Sitepu. 1996. *Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta .
- Kamarijah, S. 2003. *Analisis Dampak Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu terhadap Tingkat Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir*. Program Pascasarjana IPB.
- Khadafi, I. 2002. *Peranan Perikanan Laut dalam Mendukung Perekonomian Daerah di Kota Pekalongan 1993-2000*. Tesis S2 Program Pascasarjana UGM, Yogyakarta.
- Kuncoro, M. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Lubis, E. 2002. *Pengantar Pelabuhan Perikanan (Buku I)*. Laboratorium Pelabuhan Perikanan Jurusan PSP. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. IPB. Bogor.
- Mulyadi, 2007. *Ekonomi Kelautan*. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Nazara, Suahasil 2005. *Analisis Input Output*, Lembaga Penerbit FE UI Jakarta.
- PPN Brondong, 2006. *Laporan Kualitas Pelayanan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong dan Manfaatnya bagi Masyarakat*.
- PPS Cilacap, 2007. *Laporan Tahunan 2006*.
- Priyanto, N. 2007. *Potensi Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap untuk Pengembangan Industri Pengolahan Ikan*. Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan – FPIK IPB. Skripsi IPB.
- Rahardja, P dan Manurung, M. 2004. *Teori Ekonomi Makro*, Lembaga Penerbit FE UI Jakarta.
- Rahayu, MG Ana Budi. 2006. *Analisis Kesenjangan Wilayah Pesisir dan Non Pesisir dan Pengaruhnya terhadap PDRB di Propinsi Jawa Tengah*. FE-UI Jakarta. Tesis.

- Soemokaryo, Soepanto. 2001. Model Ekonometrika Perikanan Indonesia : Analisis dan Simulasi Kebijakan pada Era Liberalisasi Perdagangan. Penerbit Agritek, Malang.
- Suara Pembaruan, Cilacap Bercita-cita menjadi Kota Nelayan Terbesar di Indonesia. 2000. <http://cilacap-online.tripod.com/kotanelayan.htm>
- Sukirno, S. 1985. Ekonomi Pembangunan, Masalah dan Dasar Kebijaksanaan, LPFE UI dengan Bima Grafika, Jakarta.
- Sukirno, S. 2004. Makroekonomi Teori Pengantar, Edisi Ketiga, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Suparmoko, M. 1997. Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan. Suatu Pendekatan Teoritis, Edisi Ketiga, BPFE Yogyakarta.
- Suwandi, R. 2007. Analisis Pengembangan Kawasan Pelabuhan Perikanan Kamal Muara dan Dadap dalam Konteks Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu. Sekolah Pascasarjana IPB.
- Todaro, M. 1997. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Edisi Keenam (diterjemahkan oleh Haris Munandar), Erlangga, Jakarta.
- Woworoentoe, W. J. 1992. Unsur Dasar Ruang : Darat, Laut, Udara. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Edisi Khusus.
- Yusri, 2004. Analisis Kawasan Sentra Produksi (KSP) Kopi dalam Mendukung Perekonomian Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat. *Kajian Ekonomi*. Vol. 3 No. 2 Tahun 2004.



Lampiran 1. Transaksi Total Atas Dasar Harga Produsen
Prop. Ia wa Tengah (Jutaan Rupiah)
19 x 19

Sektor	1	2	3	4	5	6
Padi	1,166,672.84	-	4,186.57	158,844.65	-	3,371.01
Tanaman Bahan Makanan Lainnya	-	571,641.74	538.41	43,866.01	-	1,692.74
Tanaman Pertanian Lainnya	2,681.26	1,213.30	75,723.68	1,072.39	-	5.11
Peternakan dan Hasil-Hasilnya	42,972.75	226,545.10	50,773.27	18,497.38	-	3,256.45
Kehutanan	53.91	474.57	2,304.19	469.59	8,351.83	632.67
Perikanan	52,504.30	4,107.10	14,997.50	1,924.79	5,154.50	31,634.06
Pertambangan dan Penggalian	-	-	0.65	47.66	-	-
Industri Makanan, Minuman & Tembakau	-	-	15,166.06	2,241,730.43	-	186,422.64
Industri Lainnya	307,536.19	243,688.71	458,888.43	8,039.07	14,448.22	34,869.52
Industri Pengilangan Minyak	305.64	4,794.21	25,752.36	1,984.03	27,844.71	99,891.01
Listrik, Gas & Air Minum	-	81.80	2,957.86	1,158.65	2,731.91	473.23
Bangunan	7,704.84	16,856.15	80,831.65	1,772.39	35,247.14	2,772.38
Perdagangan	64,446.03	474,130.94	119,230.36	280,240.37	13,803.49	82,334.01
Restoran & Hotel	-	8,132.76	15,064.17	220.35	17,263.72	13,250.15
Pengangkutan & Komunikasi	35,435.97	42,605.99	53,636.82	42,341.38	11,070.77	17,521.89
Lembaga Keuangan, Real Estate & Js. Persh.	11,788.02	2,499.19	4,964.52	1,390.63	4,545.68	4,429.86
Pemerintahan Umum & Pertahanan	-	229.49	1,761.46	172.09	-	543.55
Jasa-jasa	2,583.20	1,804.30	7,960.66	494.33	9,132.08	724.44
Kegiatan yang Tidak Jejas Batasannya	-	-	-	-	-	-
Jumlah Input Antara	1,694,684.95	1,598,805.35	934,738.62	2,804,266.19	149,594.05	483,824.72
Jumlah Input	-	-	-	-	-	-
Upah dan Gaji	1,460,935.85	2,601,476.50	943,361.85	1,794,601.41	153,160.77	377,068.15
Surplus Usaha	8,110,125.20	14,169,619.37	2,429,414.93	3,335,101.04	530,765.62	1,475,595.53
Penyusutan	184,867.25	73,725.54	132,229.23	106,894.80	41,069.55	81,255.24
Pajak Tak Langsung	150,316.68	160,598.96	69,518.39	56,730.49	14,971.96	38,717.29
Subsidi	-	-	-	-	-	-
Nilai Tambah Bruto	9,906,244.98	17,005,420.37	3,574,524.40	5,293,327.74	739,967.90	1,972,636.21
Jumlah Input	11,600,929.93	18,604,225.72	4,509,263.02	8,097,593.93	889,561.95	2,456,460.93

Sektor	7	8	9	10	11	12	13
Padi	-	10,221,309.60	26,785.13	-	-	-	4,173.59
Tanaman Bahan Makanan Lainnya	-	2,453,796.71	3,955.17	-	-	-	10,292.41
Tanaman Pertanian Lainnya	-	4,684,873.63	1,334,323.62	0.08	-	-	1,422.84
Peternakan dan Hasil-Hasilnya	-	172,525.39	93,119.50	-	-	-	-
Kehutanan	1,062.61	445.01	2,504,087.62	-	0.16	730,689.95	727.23
Perikanan	-	545,579.06	6,644.83	-	-	-	-
Pertambangan dan Penggalian	34,493.09	650,171.76	3,650,598.12	32,396,878.05	3,821,928.99	2,471,528.83	1,469.87
Industri Makanan, Minuman & Tembakau	-	6,475,973.82	2,205,765.60	201.31	54,439.06	8,263,868.54	41,809.01
Industri Lainnya	47,637.91	5,795,610.22	26,260,532.98	268.23	232,037.78	2,116,349.07	2,168,926.27
Industri Pengilangan Minyak	89,775.30	2,122,376.38	1,735,926.43	-	235,147.00	36,049.08	1,863,085.24
Listrik, Gas & Air Minum	825.54	213,915.20	1,253,346.46	35.11	235,147.00	36,049.08	2,142,973.69
Bangunan	66,279.17	31,934.75	69,359.67	43.17	18,614.28	23,641.69	766,675.34
Perdagangan	52,567.91	7,560,367.22	7,181,424.79	642.61	187,367.47	3,092,110.60	1,153,606.02
Restoran & Hotel	55,010.47	2,938,700.77	567,421.80	47.29	2,248.79	491,334.88	3,205,163.08
Pengangkutan & Komunikasi	56,426.32	2,571,139.74	2,039,926.11	15,281.60	53,824.96	627,842.30	3,154,813.50
Lembaga Keuangan, Real Estate & Js. Persh.	5,651.36	447,055.86	238,918.74	23.13	111,179.66	298,107.94	1,933,246.99
Pemerintahan Umum & Pertahanan	359.03	34,071.73	26,686.13	3.16	541.17	47,774.97	7,603.77
Jasa-jasa	9,090.73	489,522.07	81,591.26	23.05	8,496.34	177,904.37	444,544.14
Kegiatan yang Tidak Jelas Butasannya	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Input Antara	419,179.44	47,409,368.92	49,280,413.96	32,413,446.79	4,625,825.66	18,377,202.22	16,900,532.99
Jumlah Impor	-	-	-	-	-	-	-
Upah dan Gaji	628,740.38	4,687,778.25	6,599,590.50	4,038,935.92	640,438.82	5,098,311.55	7,220,385.39
Surplus Usaha	990,870.63	8,531,625.69	9,532,329.57	9,815,874.08	1,386,839.01	3,736,349.38	21,071,565.30
Penyusutan	177,297.72	2,232,111.15	2,249,015.89	3,594,797.86	1,240,486.04	1,256,131.90	1,793,730.19
Pajak Tak Langsung	58,220.88	10,575,384.32	995,285.83	329,886.24	63,830.71	808,338.83	2,214,756.10
Subsidi	-	-	-46,031.91	-	-969,681.23	-	-
Nilai Tambah Bruto	1,855,129.61	26,026,899.41	19,330,189.88	17,779,494.10	2,361,913.35	10,899,131.66	32,300,436.98
Jumlah Input	2,274,309.05	73,436,268.33	68,610,603.84	50,192,940.89	6,987,739.01	29,276,333.88	49,200,969.97

Sektor	14	15	16	17	18	19
Padi	-	-	-	6,958.72	847.36	-
Tanaman Bahan Makanan Lainnya	417,593.62	5,151.10	0.40	340,382.14	24,091.21	-
Tanaman Peranian Lainnya	46,558.95	878.24	18.86	7,368.80	11,103.29	-
Peternakan dan Hasil-Hasilnya	597,781.11	16,598.82	4.60	82,434.33	11,244.24	-
Kehutanan	998.11	349.83	3.29	665.23	863.30	-
Perikanan	149,167.12	2,770.41	935.06	31,426.19	4,137.05	-
Pertambangan dan Pengalihan	8.16	14,530.92	-	124,828.29	59,498.30	-
Industri Makanan, Minuman & Tembakau	3,093,659.02	337,385.82	111,408.98	1,000,455.94	148,946.43	-
Industri Lainnya	19,303.03	1,203,386.39	123,031.43	1,856,358.78	1,081,466.04	-
Industri Pengilangan Minyak	22,434.96	2,279,784.99	80,346.99	542,783.92	32,372.16	-
Listrik, Gas & Air Minum	29,252.07	150,104.09	64,544.08	323,553.75	108,440.29	-
Bangunan	4,986.11	304,484.33	761,345.35	670,203.34	21,958.96	-
Perdagangan	2,336,010.73	1,364,670.21	129,491.86	1,455,614.64	600,225.88	-
Restoran & Hotel	7,639.27	524,405.79	133,169.46	2,384,730.61	85,969.17	-
Pengangkutan & Komunikasi	106,349.79	1,145,845.35	209,688.54	602,850.55	114,877.55	-
Lembaga Keuangan, Real Estate & Js. Persh.	8,412.63	295,554.64	303,099.27	95,611.40	63,160.04	-
Pemerintahan Umum & Pertahanan	7,138.27	126,099.23	223,630.03	139,909.75	18,935.31	-
Jasa-jasa	7,637.84	599,773.63	112,555.28	351,379.31	135,463.65	-
Kegiatan yang Tidak Jelas Batasannya	-	-	-	-	-	-
Jumlah Input Antara	6,854,930.79	8,371,773.79	2,253,273.48	10,017,515.69	2,523,600.23	-
Jumlah Impor	-	-	-	-	-	-
Upah dan Gaji	1,874,664.22	2,748,959.28	636,184.20	14,608,232.07	2,337,692.18	-
Surplus Usaha	3,823,743.02	4,450,331.66	5,608,393.56	-	1,444,455.60	-
Penyusutan	447,341.32	3,401,034.93	585,897.41	737,005.91	383,670.52	-
Pajak Tak Langsung	496,802.50	368,476.94	310,060.79	-	136,473.75	-
Subsidi	-	-9,473.40	-	-	-	-
Nilai Tambah Bruto	6,642,551.06	10,959,329.41	7,140,533.96	15,345,237.98	4,302,292.05	-
Jumlah Input	13,497,481.85	19,331,103.20	9,393,809.44	25,362,753.67	6,825,892.28	-

Sektor	180	301	302	303	304	305
1 Padi	11,593,149.47	-	-	-	2,087.40	5,693.06
2 Tanaman Bahan Makanan Lainnya	3,873,001.66	10,954,591.82	-	-	313,470.12	4,396,934.14
3 Tanaman Pertanian Lainnya	6,167,244.05	1,519,070.73	-	-	-885,349.06	334,883.37
4 Peternakan dan Hasil-Hasilnya	1,315,752.94	5,122,255.59	-	504,512.40	-220,075.83	1,545,240.89
5 Kehutanan	3,252,179.10	278,557.45	-	-	-314,799.24	87,114.54
6 Perikanan	850,981.97	1,450,347.01	-	-	-	262,434.47
7 Pertambangan dan Penggalian	43,225,982.69	1,427.88	-	-	-817,827.61	219,962.16
8 Industri Makanan, Minuman & Tembakau	15,858,723.75	38,567,660.79	-	-	-3,601,887.30	26,396,666.13
9 Industri Lainnya	47,942,232.10	20,351,477.22	-	4,468,366.16	-461,046.29	25,181,026.36
10 Industri Pengilangan Minyak	11,278,113.41	10,915,540.84	-	-	5,800,780.40	22,203,465.25
11 Listrik, Gas & Air Minum	4,565,589.81	2,422,149.20	-	-	-	-
12 Bangunan	2,884,710.71	-	-	26,391,623.17	-	-
13 Perdagangan	26,148,285.14	10,338,607.44	-	709,732.87	-2,065,826.87	14,070,171.39
14 Restoran & Hotel	10,449,772.53	3,047,709.32	-	-	-	-
15 Pengangkutan & Komunikasi	10,901,479.13	6,655,786.58	-	158,949.34	-525,863.84	2,140,751.99
16 Lembaga Keuangan, Real Estate & Js. Persh.	3,729,639.56	5,664,169.88	-	-	-	-
17 Pemerintahan Umum & Pertahanan	635,459.14	5,277,071.60	19,450,222.93	-	-	-
18 Jasa-jasa	2,440,680.68	4,015,217.55	-	369,994.05	-	-
19 Kegiatan yang Tidak Jelas Batasannya	-	-	-	-	-	-
200 Jumlah Input Antara	207,112,977.84	126,581,640.90	19,450,222.93	32,603,177.99	-2,776,338.12	96,844,343.75
201 Jumlah Impor	-	-	-	-	-	-
202 Upah dan Geji	58,450,517.29	-	-	-	-	-
203 Surplus Usaha	100,442,999.19	-	-	-	-	-
204 Penyusutan	18,718,562.45	-	-	-	-	-
205 Pajak Tak Langsung	16,848,370.66	-	-	-	-	-
209 Subsidi	-1,025,186.54	-	-	-	-	-
210 Nilai Tambah Bruto	193,435,263.05	-	-	-	-	-
Jumlah Input	400,548,240.89	-	-	-	-	-

	Sektor	309	310	409	509	600	700
Padi	1	7,780.46	11,600,929.93	-	-	11,600,929.93	11,600,929.93
Tanaman Bahan Makanan Lainnya	2	15,664,996.08	19,537,997.74	933,772.02	-	18,604,225.72	19,537,997.74
Tanaman Pertanian Lainnya	3	968,605.04	7,135,849.09	2,626,586.07	-	4,509,263.02	7,135,849.09
Peternakan dan Hasil-Hasilnya	4	6,951,933.05	8,267,685.99	170,092.06	-	8,097,593.93	8,267,685.99
Kehutanan	5	50,872.75	3,303,051.85	2,413,489.90	-	889,561.95	3,303,051.85
Perikanan	6	1,712,781.48	2,563,763.45	107,302.52	-	2,456,460.93	2,563,763.45
Pertambangan dan Penggalian	7	-596,437.57	42,629,545.12	40,355,236.07	-	2,274,309.05	42,629,545.12
Industri Makanan, Minuman & Tembakau	8	61,362,439.62	77,221,163.37	3,784,895.04	-	73,436,268.33	77,221,163.37
Industri Lainnya	9	49,539,823.45	97,482,055.55	28,871,451.71	-	68,610,603.84	97,482,055.55
Industri Pengilangan Minyak	10	38,919,786.49	50,197,899.90	4,959.01	-	50,192,940.89	50,197,899.90
Listrik, Gas & Air Minum	11	2,422,149.20	6,987,739.01	-	-	6,987,739.01	6,987,739.01
Bangunan	12	26,391,623.17	29,276,333.88	-	-	29,276,333.88	29,276,333.88
Perdagangan	13	23,052,684.83	49,200,969.97	-	-	49,200,969.97	49,200,969.97
Restoran & Hotel	14	3,047,709.32	13,497,481.85	-	-	13,497,481.85	13,497,481.85
Pengangkutan & Komunikasi	15	8,429,624.07	19,331,103.20	-	-	19,331,103.20	19,331,103.20
Lembaga Keuangan, Real Estate & Js. Persh.	16	5,664,169.88	9,393,809.44	-	-	9,393,809.44	9,393,809.44
Pemerintahan Umum & Pertahanan	17	24,727,294.53	25,362,753.67	-	-	25,362,753.67	25,362,753.67
Jasa-jasa	18	4,385,211.60	6,825,892.28	-	-	6,825,892.28	6,825,892.28
Kegiatan yang Tidak Jelas Batasannya	19	-	-	-	-	-	-
Jumlah Input Antara	190	272,703,047.45	479,816,025.29	79,267,784.40	-	400,548,240.89	479,816,025.29
Jumlah Impor	200	-	-	-	-	-	-
Upah dan Gaji	201	-	-	-	-	-	-
Surplus Usaha	202	-	-	-	-	-	-
Penyusutan	203	-	-	-	-	-	-
Pajak Tak Langsung	204	-	-	-	-	-	-
Subsidi	205	-	-	-	-	-	-
Nilai Tambah Bruto	209	-	-	-	-	-	-
Jumlah Input	210	-	-	-	-	-	-

Lampiran 2. Transaksi Total Atas Dasar Harga Produsen Jawa Tengah

	Sektor	I perkeb	I petern	I kehut	1	2
Tanaman Bahan Makanan	1	1,738,314.58	4,724.98	202,710.66	5,063.75	-
Tanaman Perkebunan	1	3,894.56	75,723.68	1,072.39	5.11	-
Peternakan dan Hasil-Hasilnya	1	269,517.85	50,773.27	18,497.38	3,256.45	-
Kehutanan	1	528.48	2,304.19	469.59	8,351.83	1,062.61
Perikanan	1	56,611.40	14,997.50	1,924.79	5,154.50	31,634.06
Pertambangan dan Penggalian	2	-	0.65	47.66	-	34,493.09
Industri Pengolahan	3	556,324.75	499,806.85	2,251,753.53	42,292.93	137,413.21
Listrik, Gas & Air Minum	4	81.80	2,957.86	1,158.65	2,731.91	825.54
Bangunan	5	24,560.99	80,831.65	1,772.39	35,247.14	66,279.17
Perdagangan, Hotel dan Restoran	6	546,709.73	134,294.53	280,460.72	31,067.21	107,578.38
Pengangkutan & Komunikasi	7	78,041.96	53,636.82	42,341.38	11,070.77	56,426.32
Keuangan, Persewaan & Js. Pershi	8	14,287.21	4,964.52	1,390.63	4,545.68	5,651.36
Jasa-jasa	9	4,616.99	9,722.12	666.42	9,132.08	9,449.76
Jumlah Input Antara		3,293,490.30	934,738.62	2,804,266.19	149,594.05	483,824.72
Jumlah Impor		-	-	-	-	-
Upah dan Gaji		4,062,412.35	943,361.85	1,794,601.41	153,160.77	628,740.38
Surplus Usaha		22,279,744.57	2,429,414.93	3,335,101.04	530,765.62	1,475,595.53
Penyusutan		258,592.79	132,229.23	106,894.80	41,069.55	81,255.24
Pajak Tak Langsung		310,915.64	69,518.39	56,730.49	14,971.96	38,717.29
Subsidi		-	-	-	-	-
Nilai Tambah Bruto		26,911,665.35	3,574,524.40	5,293,327.74	739,967.90	1,972,636.21
Jumlah Input		30,205,155.65	4,509,263.02	8,097,593.93	889,561.95	2,456,460.93
						2,274,309.05

	3	4	5	6	7	8	9
Tanaman Bahan Makanan	12,705,846.61	-	-	432,059.62	5,151.10	0.40	372,279.43
Tanaman Perkebunan	6,019,197.33	-	-	47,981.79	878.24	18.86	18,472.09
Peternakan dan Hasil-Hasilnya	265,644.89	-	-	597,781.11	16,598.82	4.60	93,678.57
Kehutanan	2,504,532.63	0.16	730,689.95	1,725.34	349.83	3.29	1,528.53
Perikanan	552,223.89	-	-	149,167.12	2,770.41	935.06	35,563.24
Pertambangan dan Penggalian	36,697,647.93	3,821,928.99	2,471,528.83	1,478.03	14,530.92	-	184,326.59
Industri Pengolahan	44,596,654.97	286,476.84	10,380,217.61	7,209,217.53	3,820,557.20	314,787.40	4,662,383.27
Listrik, Gas & Air Minum	1,467,296.77	235,147.00	36,049.08	2,172,225.76	150,104.09	64,544.08	431,994.04
Bangunan	101,337.59	18,614.28	23,641.69	771,661.45	304,484.33	761,345.35	1,340,406.68
Perdagangan, Hotel dan Restoran	18,248,604.48	189,616.26	3,583,445.48	6,702,419.10	1,889,076.00	262,661.32	4,526,540.30
Pengangkutan & Komunikasi	4,626,347.45	53,824.96	627,842.30	3,261,163.29	1,145,845.35	209,688.54	717,728.10
Keuangan, Persewaan & Js. Persh	685,997.73	11,179.66	298,107.94	1,941,659.62	295,554.64	303,099.27	158,771.44
Jasa-jasa	631,897.40	9,037.51	225,679.34	466,924.02	725,872.86	336,185.31	645,688.02
Jumlah Input Antara	129,103,229.67	4,625,825.66	18,377,202.22	23,755,463.78	8,371,773.79	2,253,273.48	12,541,115.92
Jumlah Impor	-	-	-	-	-	-	-
Upah dan Gaji	15,326,304.67	640,438.82	5,098,311.55	9,095,049.61	2,748,959.28	636,184.20	16,945,924.25
Surplus Usaha	27,879,829.34	1,386,839.01	3,736,349.38	24,895,308.32	4,450,331.66	5,608,393.56	1,444,455.60
Penyusutan	8,075,924.90	1,240,486.04	1,256,131.90	2,241,071.51	3,401,034.93	585,897.41	1,120,676.43
Pajak Tak Langsung	11,900,556.39	63,830.71	808,338.83	2,711,558.60	368,476.94	310,060.79	136,473.75
Subsidi	(46,031.91)	(969,681.23)	-	-	(9,473.40)	-	-
Nilai Tambah Bruto	63,136,583.39	2,361,913.35	10,899,131.66	38,942,988.04	10,959,329.41	7,140,535.96	19,647,530.03
Jumlah Input	192,239,813.06	6,987,739.01	29,276,333.88	62,698,451.82	19,331,103.20	9,393,809.44	32,188,645.95

Lampiran 3. Koefisien Teknis

Sektor	1	1	1	1	1	1	1	2
Tanaman Bahan Makanan	0.06	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tanaman Perkebunan	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Peternakan dan Hasil-Hasilnya	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kehutanan	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Perikanan	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00
Pertambangan dan Penggalan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
Industri Pengolahan	0.02	0.11	0.28	0.05	0.13	0.06	0.06	0.06
Listrik, Gas & Air Minum	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bangunan	0.00	0.02	0.00	0.04	0.00	0.03	0.03	0.03
Perdagangan, Hotel dan Restoran	0.02	0.03	0.03	0.03	0.04	0.05	0.05	0.05
Pengangkutan & Komunikasi	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02
Keuangan, Persewaan & Js. Persh	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
Jasa-jasa	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00

Lampiran 4. Penyesuaian Koefisien teknis

Sektor	1 bahn mak	1perkebunan	1Peternakan	1Kehutanan	1 Perikanan	2
Tanaman Bahan Makanan	0.04	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
Tanaman Perkebunan	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Peternakan dan Hasil-Hasilnya	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Kehutanan	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
Perikanan	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
Pertambangan dan Penggalan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
Industri Pengolahan	0.02	0.11	0.28	0.05	0.13	0.06
Listrik, Gas & Air Minum	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bangunan	0.00	0.02	0.00	0.04	0.00	0.03
Perdagangan, Hotel dan Restoran	0.02	0.03	0.03	0.03	0.04	0.05
Pengangkutan & Komunikasi	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02
Keuangan, Persewaan & Js. Persh	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
Jasa-jasa	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00

Lampiran 3. Koefisien Teknis

	3	4	5	6	7	8	9
Tanaman Bahan Makanan	0.07	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01
Tanaman Perkebunan	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Peternakan dan Hasil-Hasilnya	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
Kehutanan	0.01	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Perikanan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pertambangan dan Penggalian	0.19	0.55	0.08	0.00	0.00	0.00	0.01
Industri Pengolahan	0.23	0.04	0.35	0.11	0.20	0.03	0.14
Listrik, Gas & Air Minum	0.01	0.03	0.00	0.03	0.01	0.01	0.01
Bangunan	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.08	0.04
Perdagangan, Hotel dan Restoran	0.09	0.03	0.12	0.11	0.10	0.03	0.14
Pengangkutan & Komunikasi	0.02	0.01	0.02	0.05	0.06	0.02	0.02
Keuangan, Persewaan & Js. Persh	0.00	0.00	0.01	0.03	0.02	0.03	0.00
Jasa-jasa	0.00	0.00	0.01	0.01	0.04	0.04	0.02

Lampiran 4. Penyesuaian Koefisien

	3	4	5	6	7	8	9
Tanaman Bahan Makanan	0.07	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01
Tanaman Perkebunan	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Peternakan dan Hasil-Hasilnya	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
Kehutanan	0.01	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Perikanan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pertambangan dan Penggalian	0.19	0.55	0.08	0.00	0.00	0.00	0.01
Industri Pengolahan	0.23	0.04	0.35	0.11	0.20	0.03	0.14
Listrik, Gas & Air Minum	0.01	0.01	0.00	0.03	0.01	0.01	0.01
Bangunan	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.08	0.04
Perdagangan, Hotel dan Restoran	0.09	0.03	0.12	0.11	0.10	0.03	0.14
Pengangkutan & Komunikasi	0.02	0.01	0.02	0.05	0.02	0.02	0.02
Keuangan, Persewaan & Js. Persh	0.00	0.00	0.01	0.03	0.02	0.02	0.00
Jasa-jasa	0.00	0.00	0.01	0.01	0.04	0.04	0.01

Lampiran 5. Output Multiplier

	Sektor	I bahan mak	I perkebunan	I Peternakan	I Kehutanan	I Perikanan	2
Tanaman Bahan Makanan	1 bahan mak	1.04479352	0.014418341	0.054214785	0.007892246	0.016229516	0.009056523
Tanaman Perkebunan	1 perkebunan	0.001303166	1.012577173	0.012720803	0.00337037	0.00621705	0.003896111
Peternakan dan Hasil-Hasilnya	1 Peternakan	0.009669896	0.012432754	1.003616402	0.000924694	0.002522848	0.001094253
Kehutanan	1 Kehutanan	0.000546192	0.003462199	0.005460578	1.011972629	0.00296547	0.002928151
Perikanan	1 Perikanan	0.002079169	0.003827557	0.00119203	0.006200568	1.007799116	0.000359397
Pertambangan dan Penggalian	2	0.00792296	0.03950581	0.081153044	0.027851654	0.040720124	1.044352123
Industri Pengolahan	3	0.036311359	0.181092759	0.396724726	0.105056664	0.195262778	0.121446749
Listrik, Gas & Air Minum	4	0.001307256	0.004568523	0.006748666	0.006615438	0.004438967	0.004514944
Bangunan	5	0.001737589	0.021243876	0.005358573	0.043414526	0.004371997	0.033056777
Perdagangan, Hotel dan Restoran	6	0.027039889	0.062508755	0.091339595	0.063551765	0.07081793	0.078526414
Pengangkutan & Komunikasi	7	0.005486006	0.021983136	0.022791019	0.021153031	0.017437921	0.034846497
Keuangan, Persewaan & Js. Persh	8	0.00162528	0.004486095	0.005206682	0.008585164	0.005258558	0.006505551
Jasa-jasa	9	0.000807999	0.004633836	0.003611476	0.012861022	0.002805356	0.007211029
Output Multiplier		1.14063028	1.386740814	1.69013838	1.319449771	1.37684763	1.34779452
Backward		0.702385665	0.853937411	1.040765786	0.812500441	0.847845314	0.829954777

Lampiran 5. Output Multiplier

	3	4	5	6	7	8	9
Tanaman Bahan Makanan	0.097071385	0.010080409	0.039206895	0.024113432	0.024459585	0.009028784	0.032325976
Tanaman Perkebunan	0.043869614	0.004350097	0.017271224	0.007892626	0.010440393	0.00374817	0.009210971
Peternakan dan Hasil-Hasilnya	0.005049956	0.001188046	0.003482842	0.011830301	0.003390032	0.001089738	0.005720963
Kehutanan	0.018777968	0.002642915	0.032785879	0.003533136	0.004968355	0.003751792	0.004868494
Perikanan	0.002953087	0.000392919	0.001519577	0.002045733	0.000977414	0.000420271	0.001476896
Pertambangan dan Penggalan	0.280041446	0.594318745	0.199254591	0.06921392	0.075773979	0.036550781	0.075273856
Industri Pengolahan	1.386608978	0.135695002	0.541973924	0.221404979	0.324720769	0.116323283	0.268384327
Listrik, Gas & Air Minum	0.017789701	1.019148185	0.012874568	0.043694654	0.017351583	0.011284377	0.023593467
Bangunan	0.015000098	0.022707166	1.01393527	0.021774245	0.025004779	0.087225345	0.049304041
Perdagangan, Hotel dan Restoran	0.177027707	0.08524305	0.219343903	1.163909947	0.165420153	0.06906421	0.206040463
Pengangkutan & Komunikasi	0.05269679	0.031907252	0.05397802	0.071420856	1.043623989	0.033808662	0.044424703
Keuangan, Persewaan & Js. Persh	0.012568664	0.007125951	0.02102767	0.039157973	0.023362615	1.021364278	0.014023526
Jasa-jasa	0.009974241	0.006576525	0.015332922	0.014139275	0.043204662	0.039858349	1.011795202
Output Multiplier	2.119429636	1.921376262	2.171987285	1.694131077	1.762698309	1.433518043	1.746442886
Backward	1.305117899	1.183159142	1.337482233	1.043224438	1.08544727	0.882742236	1.075437387

Lampiran 6. Tabel transaksi kabupaten Cilacap

	Sektor	1 bahan mak	Iperkebunan	IPeternakan	IKehutanan	1 Perikanan	2	3
Tanaman Bahan Makanan	1	77,478.22	148.78	6,914.19	0.00	271.51	0.00	658,522.63
Tanaman Perkebunan	1	248.81	960.79	36.58	0.00	0.27	0.00	311,964.86
Peternakan dan Hasil-Hasilnya	1	17,218.61	1,598.71	423.45	0.00	174.61	0.00	13,767.93
Kehutanan	1	33.76	72.55	16.02	980.73	33.92	94.70	129,805.71
Perikanan	1	3,616.72	472.23	65.65	605.28	956.11	0.00	16,133.02
Perimbangan dan Penggalan	2	0.00	0.02	1.63	0.00	0.00	3,074.07	1,901,977.29
Industri Pengolahan	3	35,541.75	15,737.58	76,804.31	4,966.32	17,221.55	12,246.46	2,311,369.52
Listrik, Gas & Air Minum	4	5.23	93.14	39.52	320.80	25.37	73.57	76,047.52
Bangunan	5	1,569.12	2,545.17	60.45	4,138.95	148.65	5,906.89	5,252.16
Perdagangan, Hotel dan Restoran	6	34,927.48	4,228.57	9,566.14	3,648.12	5,125.14	9,587.54	945,794.44
Pengangkutan & Komunikasi	7	4,985.84	1,688.88	1,444.21	1,300.00	939.51	5,028.79	239,775.80
Keuangan, Persewaan & Js. Persh.	8	912.76	156.32	47.43	533.78	237.53	503.66	35,554.11
Jasa-jasa	9	294.96	306.12	22.73	1,072.35	67.99	842.18	32,750.18
input antara		176,833.26	28,008.87	95,442.31	17,566.32	25,202.17	37,357.87	6,678,715.14
NTB		1,752,874.50	113,975.73	180,755.82	86,891.94	106,511.05	165,331.79	3,284,750.60
total input		1,929,707.76	141,984.60	276,198.13	104,458.26	131,713.22	202,689.66	9,963,465.74
proporsi input antara perikanan		13,233.871	1,727,705.44	0,240217559	2,214673908	3,498360074	0	59,0299418
proporsi permintaan antara perikanan		2,745901746	0,358529733	0,04984467	0,459540472	0,725902822	0	12,24859661

	4	5	6	7	8	9	total permintaan antara	total	proporsi
Tanaman Bahan Makanan	0.00	0.00	26,088.30	85.89	0.01	6,674.61	776,184.13	1,929,707.76	10.624741
Tanaman Perkebunan	0.00	0.00	2,897.20	14.64	0.67	331.19	316,455.02	141,984.60	0.7817503
Peternakan dan Hasil-Hasilnya	0.00	0.00	36,094.77	276.76	0.16	1,679.56	71,234.56	276,198.13	1.520714
Kehutanan	0.00	8,288.79	104.18	5.83	0.12	27.41	139,453.71	104,458.26	0.5751347
Perikanan	0.00	0.00	5,077.02	26.04	18.76	359.41	27,330.23	131,713.22	0.7251973
Pertambangan dan Penggalian	33,051.26	28,036.48	89.25	242.28	0.00	3,304.80	1,969,777.06	202,689.66	1.1159851
Industri Pengolahan	2,477.39	117,750.90	435,301.53	63,701.01	11,206.26	83,591.96	3,187,916.54	9,963,465.74	54.857656
Listrik, Gas & Air Minum	862.55	0.06	131,161.69	2,502.72	2,297.73	7,745.23	221,175.13	60,428.54	0.3327123
Bangunan	160.97	89.40	46,593.88	5,076.74	27,103.47	24,032.18	122,678.04	332,104.29	1.8285267
Perdagangan, Hotel dan Restoran	1,639.76	40,649.82	404,700.41	31,496.99	9,350.60	81,156.43	1,581,871.43	3,785,810.54	20.844222
Pengangkutan & Komunikasi	465.47	7,122.10	196,913.10	7,071.40	7,464.80	12,868.16	487,068.06	322,311.82	1.7746105
Keuangan, Persewaan & Js. Persh.	96.68	3,381.67	117,239.82	4,927.85	5,589.48	2,846.62	172,027.71	334,414.42	1.841246
Jasa-jasa	78.15	2,560.06	28,193.45	12,102.64	11,968.01	3,655.73	93,914.56	577,110.87	3.1775037
input antara	38,832.24	207,879.27	1,430,454.58	127,530.77	75,000.08	228,273.27		18,162,397.85	
NTB	21,596.30	124,225.02	2,355,355.96	194,781.05	259,414.34	348,837.60			
total input	60,428.54	332,104.29	3,785,810.54	322,311.82	334,414.42	577,110.87			
proporsi input antara perikanan	0	0	18.5765573	0.095269461	0.068655099	1.315067167			
proporsi permintaan antara perikanan	0	0	3.854599035	0.019768225	0.014245798	0.272873846			

Lampiran 7. Produksi dan Nilai Produksi PPS Cilacap dan TPI se-Kabupaten Cilacap

Tahun	Volume (ton)			Nilai (juta rupiah)		
	PPSC	Se-Kab Cilacap	%	PPSC	Se-Kab Cilacap	%
1997	10,787.21	13,464.91	80.11	16,830.00	22,990.00	73.21
1998	7,780.71	11,352.71	68.54	46,370.00	77,780.00	59.62
1999	5,302.07	10,082.86	52.58	33,860.00	66,830.00	50.67
2000	4,308.56	7,714.63	55.85	44,370.00	68,870.00	64.43
2001	4,187.89	6,454.65	64.88	37,040.00	55,500.00	66.74
2002	5,955.17	7,814.69	76.20	33,130.00	54,620.00	60.66
2003	3,897.61	8,365.28	46.59	21,060.31	39,854.89	52.84
2004	1,721.74	8,671.83	19.85	16,588.33	45,837.48	36.19
2005	2,176.26	5,918.31	36.77	17,235.12	40,650.31	42.40
2006	6,475.15	8,307.30	77.95	36,622.58	54,318.49	67.42



Lampiran 8. PDRB Jawa Tengah Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2000-2006

LAPANGAN USAHA	TAHUN						
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
2. Angkutan Jalan Raya	3,308,255.49	3,577,137.55	3,750,518.13	3,944,692.63	4,090,640.82	4,405,386.93	4,628,423.46
3. Angkutan Laut	495,534.08	519,270.17	556,448.65	578,779.74	597,313.71	614,735.33	632,070.87
4. Angk. Sungai, Danau & Penyebr.	145.48	144.07	144.79	144.83	145.55	154.56	159.59
5. Angkutan Udara	36,786.16	46,677.65	55,027.06	67,278.72	79,997.49	99,818.46	106,905.57
6. Jasa Penunjang Angkutan	228,621.06	240,684.12	248,875.21	258,470.64	275,052.34	285,504.33	294,326.41
b. Komunikasi	984,000.87	1,084,930.76	1,163,937.52	1,272,842.32	1,372,733.41	1,484,744.25	1,682,809.14
1. Pos dan Telekomunikasi	792,848.32	885,990.47	936,075.81	1,035,728.20	1,117,084.22	1,214,047.13	0.00
2. Jasa Penunjang Komunikasi	191,152.55	198,940.29	227,861.71	237,114.12	255,649.19	270,697.12	0.00
8. KEUANGAN, PERSEWAAN, & JS. PRSH.	4,340,625.96	4,420,388.39	4,524,128.37	4,650,861.80	4,826,541.38	5,067,665.70	5,399,608.70
a. Bank	396,943.52	398,567.42	413,160.55	437,541.97	509,464.41	588,482.34	646,683.24
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	581,300.74	595,639.58	623,544.13	646,966.33	673,493.34	694,169.58	752,179.88
c. Jasa Penunjang Keuangan	100,918.03	108,649.06	114,184.97	119,391.83	131,702.54	137,022.94	143,278.02
d. Sewa Bangunan	3,085,999.23	3,099,635.20	3,185,337.53	3,253,378.81	3,314,259.78	3,441,219.66	3,641,044.03
e. Jasa Perusahaan	175,464.44	217,897.13	187,901.19	193,582.86	197,621.31	206,771.18	216,423.53
9. JASA-JASA	10,070,554.46	11,828,159.77	11,112,677.79	12,941,524.67	13,663,399.59	14,312,739.85	15,442,467.71
a. Pemerintahan Umum	7,645,950.27	9,321,685.56	8,523,867.32	10,316,786.54	10,972,181.01	11,480,098.70	12,362,540.29
1. Adm. Pemerintahan & Pertahanan	7,645,950.27	9,321,685.56	8,523,867.32	10,316,786.54	10,972,181.01	11,480,098.70	12,362,540.29
2. Jasa Pemerintah lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,862,575.63
b. Swasta	2,424,604.19	2,506,474.21	2,588,810.47	2,624,738.13	2,691,218.58	2,832,641.15	4,499,964.67
1. Sosial Kemasyarakatan	842,626.41	866,948.90	879,304.54	897,800.31	924,881.52	981,865.32	1,052,166.88
2. Hiburan & Rekreasi	92,764.29	93,203.66	93,361.01	93,764.88	95,257.54	98,648.95	102,565.31
3. Perorangan & Rumah tangga	1,489,213.49	1,546,321.65	1,616,144.92	1,633,172.94	1,671,079.52	1,752,126.88	1,925,195.22
PDRB DENGAN MIGAS	114,701,304.81	118,816,400.29	123,038,541.13	129,166,462.45	135,789,872.31	143,051,213.88	150,682,654.74
PDRB TANPA MIGAS	108,567,502.66	112,343,861.66	115,762,928.14	121,271,927.90	127,212,002.64	133,578,035.62	140,681,441.24

Lampiran 9. PDRB Kabupaten Cilacap Atas Dasar Harga Konstan 2000
Menurut Lapangan Usaha tahun 2000-2006 (Juta Rupiah)

LAPANGAN USAHA	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1. PERTANIAN	2,303,059.28	2,425,391.99	2,470,733.10	2,529,953.85	2,584,061.97	2,636,952.30	2,694,008.84
a. Tanaman Bahan Makanan	1,726,916.56	1,815,696.03	1,784,975.08	1,881,027.27	1,929,707.76	1,966,454.64	1,986,946.37
b. Tanaman Perkebunan	111,290.78	116,802.82	131,183.78	133,082.79	141,984.60	161,919.13	165,187.26
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	208,985.27	228,023.10	258,688.16	263,889.03	276,198.13	284,199.84	302,298.32
d. Kehutanan	86,267.78	99,512.69	106,404.35	103,107.15	104,458.26	97,091.66	100,246.34
e. Perikanan	169,598.89	165,357.35	189,481.73	148,847.61	131,713.22	127,287.03	139,330.55
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	144,397.32	158,580.87	181,415.35	194,347.61	202,689.66	217,307.50	232,204.69
a. Minyak dan Gas Bumi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b. Pertambangan tanpa Migas	7,789.18	7,008.51	6,588.22	5,078.20	0.00	0.00	0.00
c. Penggalian	136,608.14	151,572.36	174,827.13	189,269.41	202,689.66	217,307.50	232,204.69
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	7,377,525.81	7,703,346.25	8,548,864.51	9,231,399.14	9,963,465.74	10,904,122.01	11,481,971.23
a. Industri Migas	6,089,596.75	6,426,910.01	7,235,863.53	7,850,375.59	8,530,939.31	9,420,076.63	9,941,006.87
1. Pengilangan Minyak Bumi	6,089,596.75	6,426,910.01	7,235,863.53	7,850,375.59	8,530,939.31	9,420,076.63	9,941,006.87
2. Gas Alam Cair	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b. Industri Tanpa Migas **)	1,287,929.06	1,276,436.24	1,313,000.98	1,381,023.55	1,432,526.43	1,484,045.38	1,540,964.36
1. Makanan, Minuman dan Tembaku	552,609.46	603,761.88	565,765.86	622,029.77	631,609.58	710,433.77	725,766.34
2. Tekstil, Byg. Kulit & Aias kaki	41,306.96	43,579.98	46,495.40	43,372.93	40,319.85	43,394.12	43,570.33
3. Byg. Kayu & Hasil Hutan lainnya	98,507.18	92,928.47	93,066.98	101,031.09	101,983.80	108,704.40	110,376.61
4. Kertas dan Barang Cetakun	2,274.37	2,108.62	2,202.92	2,391.37	2,444.70	2,604.41	2,614.99
5. Pupuk, Kimia & Brg. dari Karet	187,440.73	157,959.07	257,574.83	217,457.11	213,107.65	224,068.86	244,652.22
6. Semen & Brg. Galian bukan logam	388,333.17	360,033.09	331,111.46	376,521.97	424,435.24	374,772.70	393,835.26
7. Logam Dasar Besi & Baja	1,516.25	1,405.75	1,468.61	1,594.25	1,629.80	1,736.28	1,743.33
8. Alat Angk., Mesin & Peralatannya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Barang lainnya	15,940.94	14,659.38	15,314.92	16,625.06	16,995.81	18,330.84	18,405.28
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	47,405.28	49,465.64	59,455.48	58,851.98	60,428.54	67,121.06	71,083.30
a. Listrik	45,455.75	47,362.29	56,934.20	56,205.44	57,749.23	64,253.69	67,969.36
b. Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c. Air Bersih	1,949.53	2,103.35	2,521.28	2,646.54	2,679.31	2,867.37	3,113.94
5. BANGUNAN	255,400.83	273,690.35	294,296.73	318,654.45	332,104.29	348,709.05	368,671.43
6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN	2,854,731.36	3,007,050.91	3,299,325.09	3,498,045.88	3,785,810.54	4,082,746.41	4,305,916.97

a. Perdagangan Besar & Eceran	2,701,329.10	2,814,139.53	3,098,063.57	3,298,682.55	3,586,016.66	3,862,564.33	4,089,160.92
b. Hotel	5,569.90	4,826.70	5,035.62	6,195.91	6,199.91	6,917.06	7,098.26
c. Restoran	147,832.36	188,084.68	196,225.90	193,167.42	193,593.97	213,265.02	209,657.79
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	281,203.56	290,263.96	296,088.66	302,301.43	322,311.82	356,269.75	408,733.99
a. Pengangkutan	258,263.81	264,104.12	269,591.31	276,399.16	294,455.68	325,261.21	374,283.88
1. Angkutan Rel	12,158.58	12,550.15	12,832.45	13,519.41	14,374.74	16,929.65	20,547.33
2. Angkutan Jalan Raya	133,621.49	149,212.13	154,619.75	163,812.81	176,857.03	198,952.86	241,809.46
3. Angkutan Laut	111,635.22	101,481.36	101,291.71	98,039.89	102,181.85	107,913.60	110,169.67
4. Angk. Sungai, Danau & Penyabr.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Angkutan Udara	21.96	28.20	13.18	163.55	102.76	441.19	720.10
6. Jasa Penunjang Angkutan	826.56	832.28	834.22	863.50	939.30	1,023.91	1,037.32
b. Komunikasi	22,939.75	26,159.84	26,497.35	25,902.27	27,856.14	31,008.54	34,450.11
1. Pos dan Telekomunikasi	22,939.75	26,159.84	26,497.35	25,902.27	27,856.14	31,008.54	34,450.11
2. Jasa Penunjang Komunikasi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
8. KEU. PERSEWAAN, & JASA PERUSAHAAN	294,827.71	305,340.45	316,068.80	326,384.05	334,414.42	364,553.23	386,112.20
a. Bank	12,453.00	9,924.19	13,775.07	17,360.22	20,525.71	22,522.85	24,830.83
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	15,358.05	17,056.72	20,425.50	22,289.16	23,124.06	23,354.27	25,465.10
c. Jasa Penunjang Keuangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
d. Sewa Bangunan	263,294.18	274,108.13	277,159.12	282,016.44	285,893.59	313,780.94	330,410.09
e. Jasa Perusahaan	3,722.48	4,251.41	4,709.11	4,718.23	4,871.06	4,895.17	5,406.18
9. JASA-JASA	491,333.39	535,537.30	549,689.60	569,226.66	577,110.87	587,439.75	594,641.85
a. Pemerintahan Umum	373,255.12	409,135.71	415,470.41	427,687.62	431,910.97	440,386.11	444,563.58
1. Adm. Pemerintah & Pertahanan	373,255.12	409,135.71	415,470.41	427,687.62	431,910.97	440,386.11	444,563.58
2. Jasa Pemerintah lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
b. Swasta	118,078.27	126,401.59	134,219.19	141,539.04	145,199.90	147,053.64	150,078.27
1. Sosial Kemasyarakatan	53,913.81	55,942.80	59,835.49	64,027.60	65,023.50	65,227.69	65,818.26
2. Hiburan & Rekreasi	4,396.85	3,678.53	3,792.85	3,621.67	3,845.39	3,747.87	3,793.37
3. Perorangan & Rumah tangga	59,767.61	66,780.26	70,590.85	73,889.77	76,331.01	78,078.08	80,466.64
PDRB DENGAN MIGAS	14,049,884.54	14,748,667.72	16,015,937.32	17,029,165.05	18,162,397.85	19,565,221.06	20,543,344.49
PDRB TANPA MIGAS	7,960,287.79	8,321,757.71	8,780,073.79	9,178,789.46	9,631,458.54	10,145,144.43	10,602,337.62

Lampiran 10. Kontribusi Sektor pada PDRB Kabupaten Cilacap

Lapangan Usaha	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1. PERTANIAN	16.39	16.44	15.43	14.86	14.23	13.48	13.11
a. Tanaman Bahan Makanan	12.29	12.31	11.14	11.05	10.62	10.05	9.67
b. Tanaman Perkebunan	0.79	0.79	0.82	0.78	0.78	0.83	0.80
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	1.49	1.55	1.62	1.55	1.52	1.45	1.47
d. Kehutanan	0.61	0.67	0.66	0.61	0.58	0.50	0.49
e. Perikanan	1.21	1.12	1.18	0.87	0.73	0.65	0.68
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	1.03	1.08	1.13	1.14	1.12	1.11	1.13
a. Minyak dan Gas Bumi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b. Pertambangan tanpa Migas	0.06	0.05	0.04	0.03	0.00	0.00	0.00
c. Penggalian	0.97	1.03	1.09	1.11	1.12	1.11	1.13
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	52.51	52.23	53.38	54.21	54.86	55.73	55.89
a. Industri Migas	43.34	43.58	45.18	46.10	46.97	48.15	48.39
1. Pengilangan Minyak Bumi	43.34	43.58	45.18	46.10	46.97	48.15	48.39
2. Gas Alam Cair	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b. Industri Tanpa Migas **)	9.17	8.65	8.20	8.11	7.89	7.59	7.50
1. Makanan, Minuman dan Tembakau	3.93	4.09	3.53	3.65	3.48	3.63	3.53
2. Tekstil, Brg. Kulit & Alas kaki	0.29	0.30	0.29	0.25	0.22	0.22	0.21
3. Brg. Kayu & Hasil Hutan lainnya	0.70	0.63	0.58	0.59	0.56	0.56	0.54
4. Kertas dan Barang Cetakan	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
5. Pupuk, Kimia & Brg. dari Karet	1.33	1.07	1.61	1.28	1.17	1.15	1.19
6. Semen & Brg. Galian bukan logam	2.76	2.44	2.07	2.21	2.34	1.92	1.92
7. Logam Dasar Besi & Baja	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
8. Alat Angk., Mesin & Peralatannya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Barang lainnya	0.11	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09

Lampiran 10. Kontribusi Sektor pada PDRB Kabupaten Cilacap

Lapangan Usaha	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	0.34	0.34	0.37	0.35	0.33	0.34	0.35
a. Listrik	0.32	0.32	0.36	0.33	0.32	0.33	0.33
b. Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c. Air Bersih	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02
5. BANGUNAN	1.82	1.86	1.84	1.87	1.83	1.78	1.79
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	20.32	20.39	20.60	20.54	20.84	20.87	20.96
a. Perdagangan Besar & Eceran	19.23	19.08	19.34	19.37	19.74	19.74	19.91
b. Hotel	0.04	0.03	0.03	0.04	0.03	0.04	0.03
c. Restoran	1.05	1.28	1.23	1.13	1.07	1.09	1.02
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	2.00	1.97	1.85	1.78	1.77	1.82	1.99
a. Pengangkutan	1.84	1.79	1.68	1.62	1.62	1.66	1.82
1. Angkutan Rel	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.10
2. Angkutan Jalan Raya	0.95	1.01	0.97	0.96	0.97	1.02	1.18
3. Angkutan Laut	0.79	0.69	0.63	0.58	0.56	0.55	0.54
4. Angk. Sungai, Danau & Penyebr.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Angkutan Udara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b. Jasa Penunjang Angkutan	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
b. Komunikasi	0.16	0.18	0.17	0.15	0.15	0.16	0.17
1. Pos dan Telekomunikasi	0.16	0.18	0.17	0.15	0.15	0.16	0.17
2. Jasa Penunjang Komunikasi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. KEUANGAN, PERSEWAAN, & JS. PRSH.	2.10	2.07	1.97	1.92	1.84	1.86	1.88
a. Bank	0.09	0.07	0.09	0.10	0.11	0.12	0.12
b. Lembaga Keuangan tanpa Bank	0.11	0.12	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12
c. Jasa Penunjang Keuangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d. Sewa Bangunan	1.87	1.86	1.73	1.66	1.57	1.60	1.61
e. Jasa Perusahaan	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
9. JASA-JASA	3.50	3.63	3.43	3.34	3.18	3.00	2.89
a. Pemerintahan Umum	2.66	2.77	2.59	2.51	2.38	2.25	2.16
1. Adm. Pemerintahan & Pertahanan	2.66	2.77	2.59	2.51	2.38	2.25	2.16
2. Jasa Pemerintah lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b. Swasta	0.84	0.86	0.84	0.83	0.80	0.75	0.73
1. Sosial Kemasyarakatan	0.38	0.38	0.37	0.38	0.36	0.33	0.32
2. Hiburan & Rekreasi	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
3. Perorangan & Rumah tangga	0.43	0.45	0.44	0.43	0.42	0.40	0.39

Lampiran 11. PDRB dan LQ Kecamatan Dayeuhluhur

sektor	PDRB					LQ					
	2001	2002	2003	2004	2005	2001	2002	2003	2004	2005	rata-rata
Pertanian	203,577.57	208,391.97	211,167.73	232,574.32	304,099.71	5.11	5.42	5.62	5.90	6.40	5.69
Pertambangan dan Penggalian	337.25	385.82	423.31	541.53	591.41	0.13	0.14	0.15	0.18	0.15	0.15
Industri Pengolahan	1,902.13	1,956.62	2,071.81	2,230.87	2,316.25	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01
Listrik, Gas dan Air bersih	178.08	212.65	211.77	222.74	253.57	0.22	0.23	0.24	0.24	0.21	0.23
Bangunan	7,180.96	7,706.31	8,388.42	8,996.76	9,473.20	1.60	1.68	1.77	1.78	1.51	1.67
Perdagangan, Hotel dan Restoran	5,875.28	6,156.50	6,213.77	7,185.45	9,463.07	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.12
Pengangkutan dan komunikasi	4,075.32	4,157.10	4,212.18	4,456.18	4,981.82	0.85	0.90	0.94	0.91	0.78	0.88
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	6,656.07	6,906.15	7,187.02	7,289.61	7,833.08	1.33	1.40	1.48	1.43	1.19	1.37
Jasa-jasa	12,523.37	13,373.62	12,868.32	13,367.73	13,366.67	1.42	1.56	1.52	1.52	1.26	1.46
PDRB (juta rupiah)	242,306.03	249,246.73	252,744.32	276,865.20	352,378.78						
penduduk pertengahan tahun (jiwa)	46,623	46,942	47,207	47,434	47,703						
PDRB per kapita	5,197,135.10	5,309,674.28	5,353,958.52	5,836,851.20	7,386,931.22						

Lampiran 12. PDRB dan LQ Kecamatan Wanareja

sektor	PDRB					LQ					rata-rata
	2001	2002	2003	2004	2005	2001	2002	2003	2004	2005	
Pertanian	198,547.94	204,656.95	207,615.69	220,183.21	255,291.29	3.21	3.39	3.48	3.63	3.94	3.53
Pertambangan dan Penggalian	1,686.30	1,929.11	2,046.21	1,537.61	1,631.25	0.42	0.40	0.39	0.40	0.40	0.40
Industri Pengolahan	29,732.24	30,583.94	32,650.62	33,566.25	34,696.21	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.15
Listrik, Gas dan Air bersih	479.82	563.28	560.36	570.21	628.00	0.38	0.34	0.37	0.38	0.37	0.37
Bangunan	15,922.58	16,797.96	18,133.15	19,703.76	21,019.79	2.28	2.31	2.27	2.32	2.38	2.31
Perdagangan, Hotel dan Restoran	77,934.05	82,385.37	86,594.26	95,517.92	109,895.37	1.02	1.01	1.01	1.00	0.99	1.01
Pengangkutan dan komunikasi	9,160.03	9,343.85	9,536.91	10,140.43	11,149.00	1.24	1.32	1.37	1.37	1.34	1.33
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	14,692.25	14,985.99	15,466.10	15,893.01	17,635.48	1.89	1.98	2.04	2.12	2.10	2.03
Jasa-jasa	27,397.62	29,571.13	28,407.57	29,259.25	29,393.76	2.01	2.20	2.12	2.16	2.03	2.11
PDRB (juta rupiah)	375,552.81	390,817.58	401,010.87	426,371.64	481,340.15						
penduduk pertengahan tahun (jiwa)	90,867.00	91,584.00	92,118.00	92,506.00	92,852.00						
PDRB per kapita (rupiah)	4,132,994.54	4,267,312.82	4,353,230.28	4,609,124.15	5,183,950.24						

Lampiran 13. PDRB dan LQ Kecamatan Majenang

sektor	PDRB					LQ					rate-rata
	2001	2002	2003	2004	2005	2001	2002	2003	2004	2005	
Pertanian	147,495.53	151,435.71	155,531.05	177,758.78	173,477.83	1.86	1.72	1.76	2.01	2.02	1.83
Pertambangan dan Penggalian	23,592.39	26,989.53	29,611.38	14,149.25	15,536.33	4.03	4.17	4.37	2.04	2.20	3.36
Industri Pengolahan	128,700.97	132,387.75	144,157.96	149,213.55	154,408.18	0.45	0.43	0.45	0.44	0.44	0.44
Listrik, Gas dan Air bersih	2,567.25	3,109.28	3,110.25	3,330.68	3,836.19	1.41	1.47	1.61	1.61	1.76	1.56
Bangunan	3,920.30	4,277.05	4,601.39	5,162.58	5,686.53	0.39	0.41	0.41	0.45	0.50	0.43
Perdagangan, Hotel dan Restoran	161,665.40	172,861.43	177,341.80	186,618.31	193,408.35	1.48	1.47	1.45	1.45	1.46	1.46
Pengangkutan dan komunikasi	22,876.72	23,335.78	23,446.31	25,940.92	28,592.08	2.14	2.21	2.22	2.35	2.47	2.28
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	23,396.50	24,679.18	25,383.71	26,932.72	29,454.28	2.08	2.19	2.23	2.36	2.48	2.27
Jasa-jasa	29,720.75	32,018.58	31,063.67	31,637.18	31,958.73	1.60	1.63	1.66	1.60	1.67	1.59
PDRB (juta rupiah)	543,935.82	571,994.30	594,247.50	622,743.96	636,358.48						
penduduk pertengahan tahun (jiwa)	117,603.00	117,747.00	117,803.00	120,110.00	120,461.00						
PDRB per kapita	4,625,186.58	4,850,181.29	5,044,417.39	5,184,780.31	5,282,692.99						

Lampiran 14. PDRB dan LQ Kecamatan Cimanggu

sektor	PDRB					LQ					rata-rata
	2001	2002	2003	2004	2005	2001	2002	2003	2004	2005	
Pertanian	152,868.34	157,996.31	162,041.98	162,863.32	206,136.78	2.70	2.86	2.93	2.99	3.41	2.98
Pertambangan dan Penggalian	57.91	66.23	80.73	44.81	47.54	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01
Industri Pengolahan	68,252.14	70,207.30	74,366.30	76,497.21	79,163.77	0.38	0.37	0.37	0.36	0.32	0.36
Listrik, Gas dan Air bersih	64.31	74.06	73.32	73.24	82.63	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06
Bangunan	13,285.48	14,490.81	15,810.75	17,021.17	17,989.93	2.08	2.20	2.27	2.43	2.26	2.26
Perdagangan, Hotel dan Restoran	72,373.42	76,648.22	79,493.12	84,509.04	100,631.38	1.03	1.04	1.04	1.08	1.07	1.06
Pengangkutan dan komunikasi	10,658.10	10,871.97	11,121.06	11,926.83	13,247.12	1.67	1.84	1.88	1.76	1.62	1.65
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	13,788.68	14,540.92	15,168.10	15,442.48	16,993.23	1.93	2.05	2.13	2.16	2.03	2.07
Jasa-jasa	13,233.39	14,375.77	13,965.12	14,082.21	14,693.57	1.08	1.17	1.12	1.16	1.09	1.12
PDRB (juta rupiah)	344,581.75	359,271.59	372,140.49	382,480.32	448,985.95						
penduduk pertengahan tahun (Iiwa)	93,496.00	94,217.00	94,937.00	97,245.00	97,504.00						
PDRB per kapita	3,685,445.18	3,813,235.27	3,919,867.76	3,939,161.76	4,604,795.20						

Lampiran 15. PDRB dan LQ Kecamatan Karangpucung

sektor	PDRB					LQ					rata-rata
	2001	2002	2003	2004	2005	2001	2002	2003	2004	2005	
Pertanian	85,609.60	87,195.86	90,348.36	91,659.75	81,942.09	2.43	2.52	2.64	2.66	2.57	2.56
Pertambangan dan Penggalian	12,478.75	14,275.59	15,662.37	18,859.67	20,006.95	5.41	5.61	5.96	6.98	7.61	6.31
Industri Pengolahan	13,869.19	14,266.48	15,495.39	16,694.21	17,353.32	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.12
Listrik, Gas dan Air bersih	64.31	75.53	75.31	76.39	83.88	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09
Bangunan	382.83	404.06	435.15	468.42	495.02	0.10	0.10	0.10	0.11	0.12	0.10
Perdagangan, Hotel dan Restoran	29,707.42	31,696.41	32,014.79	35,511.84	34,174.11	0.68	0.69	0.68	0.70	0.69	0.69
Pengangkutan dan komunikasi	1,978.97	2,018.67	2,045.54	2,335.71	2,618.53	0.47	0.49	0.50	0.54	0.61	0.52
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	12,094.86	12,954.71	13,338.22	13,578.01	15,350.29	2.86	2.92	3.02	3.05	3.48	3.07
Jasa-jasa	57,782.86	61,606.35	60,744.70	62,974.83	64,667.72	7.42	8.00	7.90	8.18	9.10	8.12
PDRB (juta rupiah)	214,568.80	224,493.67	230,159.83	242,158.83	236,691.92						
penduduk pertengahan tahun (jiwa)	67,804.00	68,199.00	68,750.00	71,011.00	71,380.00						
PDRB per kapita	3,164,544.84	3,291,744.27	3,347,779.32	3,410,159.37	3,315,941.68						

Lampiran 16. PDRB dan LQ Kecamatan Cipari

sektor	PDRB					LQ					rata-rata
	2001	2002	2003	2004	2005	2001	2002	2003	2004	2005	
Pertanian	137,953.90	159,483.39	162,286.72	161,441.94	175,999.28	4.53	4.80	4.95	5.09	5.38	4.95
Pertambangan dan Penggalian	267.63	306.16	341.81	385.04	411.26	0.12	0.13	0.14	0.15	0.15	0.14
Industri Pengolahan	11,586.13	11,918.03	13,080.86	14,122.16	14,732.72	0.10	0.10	0.11	0.12	0.11	0.11
Listrik, Gas dan Air bersih	197.52	233.27	236.67	241.44	266.56	0.28	0.29	0.31	0.33	0.32	0.31
Bangunan	608.06	645.31	698.18	749.52	789.95	0.15	0.16	0.17	0.18	0.18	0.17
Perdagangan, Hotel dan Restoran	22,682.09	23,496.90	24,195.76	25,476.42	27,950.37	0.53	0.53	0.53	0.55	0.55	0.54
Pengangkutan dan komunikasi	3,264.20	3,329.72	3,512.59	3,714.43	4,162.42	0.78	0.84	0.90	0.94	0.94	0.88
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	8,193.49	8,407.05	8,696.28	8,828.61	10,034.16	1.87	1.98	2.06	2.15	2.22	2.05
Jasa-jasa	7,122.10	7,731.69	7,613.20	7,854.63	8,218.21	0.93	1.05	1.03	1.11	1.13	1.05
PDRB (juta rupiah)	211,875.13	215,551.52	220,662.08	222,814.19	242,564.93						
penduduk pertengahan tahun (jiwa)	63,415.00	63,593.00	63,989.00	59,365.00	59,879.00						
PDRB per kapita	3,341,088.51	3,389,547.96	3,448,437.77	3,753,292.24	4,050,918.22						

Lampiran 17. PDRB dan LQ Kecamatan Sidareja

sektor	PDRB					LQ					
	2001	2002	2003	2004	2005	2001	2002	2003	2004	2005	rata-rata
Pertanian	106,544.64	107,026.62	110,323.28	165,358.33	133,700.33	2.46	2.57	2.65	3.10	2.99	2.75
Pertambangan dan Penggalian	36.49	41.76	45.81	55.16	58.52	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01
Industri Pengolahan	31,935.24	32,850.04	35,174.26	36,012.08	37,224.38	0.23	0.23	0.23	0.18	0.20	0.21
Listrik, Gas dan Air bersih	401.01	470.14	484.49	511.50	575.47	0.45	0.47	0.50	0.41	0.51	0.47
Bangunan	1,374.41	1,450.75	1,561.39	1,725.68	1,872.42	0.28	0.29	0.30	0.25	0.32	0.29
Perdagangan, Hotel dan Restoran	82,356.85	85,466.24	88,190.77	125,050.87	108,995.36	1.53	1.54	1.53	1.60	1.57	1.56
Pengangkutan dan komunikasi	20,241.11	20,647.28	21,989.62	23,122.05	24,871.74	3.91	4.13	4.43	3.48	4.11	4.01
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	7,576.51	7,732.07	7,956.07	8,315.55	9,383.78	1.39	1.45	1.48	1.20	1.52	1.41
Jasa-jasa	12,683.87	14,416.61	14,141.36	14,674.72	15,348.09	1.33	1.56	1.51	1.23	1.54	1.43
PDRB (juta rupiah)	263,150.13	270,101.51	279,867.05	374,825.94	332,030.09						
penduduk pertengahan tahun (jiwa)	56,298.00	56,610.00	56,758.00	56,485.00	56,521.00						
PDRB per kapita	4,674,235.91	4,771,268.59	4,930,882.95	6,635,849.16	4,874,455.30						

Lampiran 18. PDRB dan LQ Kecamatan Kedungreja

sektor	PDRB					LQ					rata-rata
	2001	2002	2003	2004	2005	2001	2002	2003	2004	2005	
Pertanian	80,134.78	81,292.21	83,922.25	107,294.36	36,581.63	2.84	2.97	3.08	3.44	1.96	2.86
Pertambangan dan Penggalian	9,826.83	11,241.82	12,333.89	14,925.04	16,003.38	5.32	5.59	5.89	6.11	10.38	6.66
Industri Pengolahan	21,508.85	22,124.98	23,427.55	23,985.57	24,793.03	0.24	0.23	0.24	0.20	0.32	0.25
Listrik, Gas dan Air bersih	164.62	192.61	192.33	194.90	213.78	0.29	0.29	0.30	0.27	0.45	0.32
Bangunan	6,891.63	7,246.74	7,826.83	8,613.48	9,306.23	2.16	2.22	2.28	2.15	3.76	2.52
Perdagangan, Hotel dan Restoran	25,307.47	26,882.29	27,176.23	34,481.97	20,426.27	0.72	0.74	0.72	0.76	0.71	0.73
Pengangkutan dan komunikasi	3,743.65	3,818.76	3,830.32	4,068.60	4,473.27	1.11	1.16	1.18	1.05	1.77	1.25
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	13,554.59	13,274.01	13,706.39	14,264.74	15,674.04	3.81	3.79	3.90	3.54	6.06	4.22
Jasa-jasa	10,674.87	11,416.40	10,966.34	11,213.74	11,310.11	1.71	1.87	1.79	1.61	2.71	1.94
PDRB (juta rupiah)	171,807.29	177,489.83	183,382.14	219,042.40	138,781.74						
penduduk pertengahan tahun (jiwa)	79,445.00	79,732.00	80,008.00	79,536.00	79,759.00						
PDRB per kapita	2,162,594.15	2,226,080.19	2,292,047.53	2,754,003.21	1,740,013.55						

Lampiran 19. PDRB dan LQ Kecamatan Patimuan

sektor	PDRB					LQ					rata-rata
	2001	2002	2003	2004	2005	2001	2002	2003	2004	2005	
Pertanian	60,412.65	60,885.69	62,538.62	60,879.27	49,520.04	3.22	3.35	3.49	3.58	3.40	3.41
Pertambangan dan Penggalan	5,128.97	5,867.50	5,869.49	4,858.72	5,237.08	4.18	4.40	4.26	3.64	4.37	4.17
Industri Pengolahan	5,552.74	5,711.80	6,048.08	6,192.13	6,413.54	0.09	0.09	0.09	0.09	0.11	0.10
Listrik, Gas dan Air bersih	151.96	180.23	177.15	179.50	196.86	0.40	0.41	0.42	0.45	0.53	0.44
Bangunan	5,027.62	5,358.50	5,784.64	6,230.90	6,589.12	2.37	2.48	2.56	2.85	3.43	2.74
Perdagangan, Hotel dan Restoran	14,240.64	14,945.54	15,318.36	15,469.90	13,491.52	0.61	0.62	0.62	0.62	0.60	0.61
Pengangkutan dan komunikasi	5,837.00	5,954.12	6,236.12	6,544.42	6,277.72	2.60	2.74	2.91	3.09	3.19	2.91
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	7,593.60	7,824.98	8,075.95	8,226.53	9,135.50	3.21	3.37	3.49	3.74	4.54	3.67
Jasa-jasa	10,220.99	10,920.83	10,631.38	10,863.45	11,053.07	2.47	2.70	2.64	2.86	3.41	2.82
PDRB (juta rupiah)	114,166.17	117,649.20	120,679.78	119,444.84	107,914.46						
penduduk pertengahan tahun (jiwa)	43,145.00	43,187.00	43,312.00	43,300.00	43,290.00						
PDRB per kapita	2,646,104.31	2,724,180.96	2,786,289.82	2,758,541.32	2,492,826.53						

Lampiran 20. PDRB dan LQ Kecamatan Gandrungmangu

sektor	PDRB					LQ					
	2001	2002	2003	2004	2005	2001	2002	2003	2004	2005	rata-rata
Pertanian	115,095.38	117,227.94	120,888.63	118,178.31	84,297.26	3.14	3.28	3.43	3.45	3.11	3.28
Pertambangan dan Penggalian	6,986.18	7,992.14	9,003.39	10,840.67	11,553.76	2.92	3.04	3.33	4.03	5.17	3.70
Industri Pengolahan	7,225.90	7,432.89	7,870.51	8,057.98	8,358.52	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06
Listrik, Gas dan Air bersih	128.60	153.08	152.38	155.38	171.46	0.17	0.18	0.19	0.19	0.25	0.20
Bangunan	1,654.74	1,770.10	1,905.29	2,135.21	2,349.25	0.40	0.42	0.43	0.48	0.66	0.48
Perdagangan, Hotel dan Restoran	45,412.96	47,886.17	47,746.22	50,195.22	39,431.77	1.00	1.00	0.98	1.00	0.94	0.98
Pengangkutan dan komunikasi	5,156.26	5,259.73	5,472.23	5,817.37	6,519.83	1.18	1.23	1.30	1.36	1.78	1.37
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	16,160.99	16,714.55	17,200.05	18,228.97	20,206.45	3.51	3.65	3.78	4.11	5.39	4.09
Jasa-jasa	24,872.73	27,389.50	26,981.15	27,468.59	28,217.86	3.08	3.44	3.40	3.59	4.67	3.64
PDRB (juta rupiah)	222,693.73	231,826.11	237,219.85	241,077.68	201,106.16						
penduduk pertengahan tahun (jiwa)	99,068.00	99,341.00	100,005.00	99,836.00	100,187.00						
PDRB per kapita	2,247,887.66	2,333,639.81	2,372,079.85	2,414,736.99	2,007,307.96						

Lampiran 21. PDRB dan LQ Kecamatan Bantarsari

sektor	PDRB					LQ					rata-rata
	2001	2002	2003	2004	2005	2001	2002	2003	2004	2005	
Pertanian	106,733.11	107,366.57	108,583.23	90,095.76	78,319.28	4.16	4.39	4.58	4.59	4.68	4.48
Pertambangan dan Penggalian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Industri Pengolahan	1,560.45	1,605.14	1,730.54	1,797.08	1,864.30	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02
Listrik, Gas dan Air bersih	0.00	30.55	30.38	29.84	31.72	0.00	0.05	0.06	0.06	0.07	0.05
Bangunan	301.66	318.28	342.30	380.88	416.06	0.10	0.11	0.11	0.15	0.19	0.13
Perdagangan, Hotel dan Restoran	30,583.71	31,494.68	31,419.20	27,494.66	24,259.47	0.96	0.96	0.96	0.96	0.94	0.96
Pengangkutan dan komunikasi	2,087.94	2,129.82	2,209.12	2,347.42	2,590.10	0.68	0.73	0.78	0.96	1.15	0.86
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	5,742.10	5,857.36	6,022.75	6,337.52	6,918.78	1.78	1.87	1.97	2.49	2.99	2.22
Jasa-jasa	9,038.85	9,687.21	9,347.85	9,512.69	9,673.66	1.60	1.78	1.75	2.17	2.60	1.98
PDRB (juta rupiah)	156,047.81	158,489.62	159,685.37	137,995.84	124,073.38						
penduduk pertengahan tahun (jiwa)	65,602.00	65,717.00	66,184.00	65,956.00	65,968.00						
PDRB per kapita	2,378,705.01	2,411,699.01	2,412,748.82	2,092,240.93	1,880,811.60						

Lampiran 22. PDRB dan LQ Kecamatan Kawunganten

sektor	PDRB					LQ					
	2001	2002	2003	2004	2005	2001	2002	2003	2004	2005	rata-rata
Pertanian	189,747.73	190,858.81	193,165.33	182,730.87	162,065.28	4.43	4.68	4.83	4.94	5.06	4.79
Pertambangan dan Penggalian	64.24	73.49	80.64	97.08	107.90	0.02	0.02	0.03	0.03	0.04	0.03
Industri Pengolahan	2,067.73	2,126.97	2,307.93	2,385.37	2,474.06	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
Listrik, Gas dan Air bersih	64.31	46.73	46.48	47.29	52.05	0.07	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06
Bangunan	354.12	380.09	408.85	445.54	476.66	0.07	0.08	0.08	0.09	0.11	0.09
Perdagangan, Hotel dan Restoran	35,535.81	36,589.00	38,594.35	38,381.31	34,490.45	0.67	0.67	0.70	0.71	0.70	0.69
Pengangkutan dan komunikasi	4,239.11	4,324.18	4,514.82	4,908.98	5,430.92	0.83	0.88	0.94	1.06	1.26	1.00
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	12,780.75	13,263.41	13,639.49	14,056.20	15,029.39	2.37	2.54	2.64	2.94	3.40	2.78
Jasa-jasa	15,390.49	16,783.81	16,398.04	16,990.98	17,320.63	1.63	1.85	1.82	2.06	2.43	1.96
PDRB (juta rupiah)	260,244.30	264,446.49	269,155.95	260,043.62	237,447.35						
penduduk pertengahan tahun (jwrg)	91,000.00	91,207.00	92,893.00	91,953.00	92,081.00						
PDRB per kapita	2,859,827.52	2,899,410.02	2,897,483.63	2,828,005.66	2,578,679.07						

Lampiran 23. PDRB dan LQ Kecamatan Jeruklegi

sektor	PDRB					LQ					rata-rata
	2001	2002	2003	2004	2005	2001	2002	2003	2004	2005	
Pertanian	150,479.69	150,339.29	154,583.05	143,723.85	178,802.48	3.07	3.18	3.23	3.09	3.49	3.21
Pertambangan dan Penggalian	20,123.39	23,021.01	28,038.57	36,516.18	39,530.28	6.28	6.64	7.63	10.02	9.38	7.99
Industri Pengolahan	40,278.07	41,431.88	45,474.49	47,157.89	48,745.39	0.26	0.25	0.26	0.26	0.23	0.25
Listrik, Gas dan Air bersih	64.31	94.11	100.07	101.83	148.71	0.06	0.08	0.09	0.09	0.11	0.09
Bangunan	750.77	788.42	848.02	915.94	971.30	0.14	0.14	0.14	0.15	0.14	0.14
Perdagangan, Hotel dan Restoran	54,169.77	56,965.20	59,418.90	63,216.18	74,292.01	0.89	0.90	0.90	0.93	0.94	0.91
Pengangkutan dan komunikasi	7,970.84	8,130.79	8,202.37	8,941.94	10,327.73	1.36	1.44	1.44	1.54	1.49	1.45
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	8,103.19	8,227.26	8,460.20	8,641.80	9,313.28	1.31	1.36	1.37	1.44	1.32	1.36
Jasa-jasa	16,207.31	17,292.64	16,765.63	17,452.61	17,496.87	1.50	1.64	1.56	1.68	1.54	1.58
PDRB (juta rupiah)	298,147.33	306,290.60	321,891.29	326,668.22	379,628.05						
penduduk pertengahan tahun (jwa)	58,970.00	59,208.00	58,281.00	60,126.00	60,203.00						
PDRB per kapita	5,055,915.43	5,173,128.61	5,523,091.38	5,433,060.88	6,305,799.52						

sektor	PDRB					LQ					rata-rata
	2001	2002	2003	2004	2005	2001	2002	2003	2004	2005	
Pertanian	89,271.71	90,925.80	93,903.10	72,344.25	80,616.33	1.39	1.44	1.48	1.24	1.36	1.38
Pertambangan dan Penggalian	15,690.79	17,950.16	20,822.95	21,214.91	22,936.75	3.73	3.87	4.29	4.64	4.68	4.24
Industri Pengolahan	100,534.75	103,414.68	108,604.94	112,348.67	116,008.76	0.49	0.47	0.47	0.50	0.47	0.48
Listrik, Gas dan Air bersih	385.82	447.39	458.49	452.78	472.72	0.29	0.29	0.31	0.33	0.31	0.31
Bangunan	9,319.03	9,849.31	10,595.09	11,793.07	13,520.65	1.28	1.31	1.33	1.58	1.72	1.44
Perdagangan, Hotel dan Restoran	123,071.70	131,255.78	134,232.03	131,175.79	141,641.77	1.54	1.56	1.53	1.54	1.54	1.54
Pengangkutan dan komunikasi	18,139.45	18,503.44	19,635.28	20,703.58	22,897.41	2.35	2.44	2.60	2.85	2.85	2.62
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	18,623.39	19,030.38	19,571.57	20,601.37	23,522.17	2.30	2.35	2.40	2.73	2.86	2.53
Jasa-jasa	16,467.60	18,192.90	17,920.26	18,739.05	19,460.61	1.16	1.29	1.26	1.44	1.47	1.32
PDRB (juta rupiah)	391,504.24	409,569.84	425,743.69	409,373.47	441,077.17						
penduduk pertengahan tahun (jiwa)	93,058.00	93,533.00	93,614.00	96,362.00	96,461.00						
PDRB per kapita	4,207,099.25	4,378,880.60	4,547,863.48	4,248,287.42	4,572,595.89						

sektor	PDRB					LQ					rata-rata
	2001	2002	2003	2004	2005	2001	2002	2003	2004	2005	
Pertanian	114,753.90	118,658.70	120,599.54	130,631.42	129,049.20	2.85	3.01	3.08	3.24	3.29	3.10
Pertambangan dan Penggalian	3,147.81	3,601.07	4,180.34	5,405.75	5,784.30	1.19	1.25	1.39	1.71	1.79	1.47
Industri Pengolahan	38,582.52	39,687.75	42,389.23	44,727.43	46,194.51	0.30	0.29	0.30	0.29	0.29	0.29
Listrik, Gas dan Air bersih	114.03	135.15	133.95	138.31	154.56	0.14	0.14	0.15	0.15	0.15	0.15
Bangunan	14,564.56	15,512.69	16,719.62	17,986.79	18,996.96	3.20	3.31	3.39	3.47	3.67	3.41
Perdagangan, Hotel dan Restoran	24,911.81	26,469.40	27,499.59	31,194.30	31,725.84	0.50	0.50	0.51	0.53	0.52	0.51
Pengangkutan dan komunikasi	24,330.02	24,818.25	25,484.54	26,722.22	30,691.64	5.05	5.26	5.45	5.32	5.80	5.37
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	10,998.21	11,325.73	11,670.37	11,872.98	13,288.14	2.17	2.25	2.31	2.28	2.45	2.29
Jasa-jasa	13,636.96	14,952.26	14,657.21	14,627.55	14,804.92	1.53	1.71	1.67	1.62	1.70	1.65
PDRB (juta rupiah)	245,039.83	255,161.00	263,334.40	283,306.75	290,690.06						
penduduk pertengahan tahun (jiwa)	78,249.00	78,812.00	79,348.00	79,102.00	79,430.00						
PDRB per kapita	3,131,539.42	3,237,590.68	3,318,727.69	3,581,537.19	3,659,701.09						

Lampiran 26. PDRB dan LQ Kecamatan Meos

sektor	PDRB					LQ					rata-rata
	2001	2002	2003	2004	2005	2001	2002	2003	2004	2005	
Pertanian	46,809.66	48,228.92	49,382.54	35,621.61	45,849.92	1.22	1.27	1.29	1.05	1.30	1.23
Pertambangan dan Penggalian	2,588.90	2,961.68	3,447.95	3,129.84	3,391.50	1.03	1.07	1.17	1.18	1.17	1.12
Industri Pengolahan	19,212.55	19,762.90	21,494.11	22,006.08	22,851.80	0.16	0.15	0.15	0.17	0.16	0.16
Listrik, Gas dan Air bersih	329.79	465.56	460.74	455.16	492.07	0.42	0.51	0.52	0.58	0.55	0.51
Bangunan	84,719.65	89,493.46	97,343.82	95,417.52	99,281.61	19.62	19.85	20.16	21.93	21.31	20.57
Perdagangan, Hotel dan Restoran	41,521.68	44,148.30	45,730.32	40,032.47	47,459.40	0.88	0.87	0.86	0.81	0.87	0.86
Pengangkutan dan komunikasi	7,321.86	7,468.77	7,538.34	8,039.69	7,812.96	1.60	1.65	1.65	1.90	1.64	1.69
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	6,591.56	6,732.08	7,000.78	7,277.85	8,053.66	1.37	1.39	1.42	1.66	1.65	1.50
Jasa-jasa	23,626.29	26,052.28	25,676.18	25,923.39	26,254.38	2.80	3.09	2.98	3.43	3.34	3.13
PDRB (juta rupiah)	232,721.94	245,313.95	258,074.77	237,903.60	261,447.29						
penduduk pertengahan tahun (jiwa)	45,962.00	46,023.00	46,909.00	46,414.00	46,357.00						
PDRB per kapita	5,063,355.42	5,330,246.90	5,501,604.53	5,125,686.19	5,639,866.46						

Lampiran 27. PDRB dan LQ Kecamatan Sampang

sektor	PDRB					LQ					
	2001	2002	2003	2004	2005	2001	2002	2003	2004	2005	rata-rata
Pertanian	47,567.72	48,690.45	50,493.70	55,585.62	59,548.21	1.62	1.70	1.76	1.87	1.97	1.78
Pertambangan dan Penggalian	1,586.78	1,815.24	1,991.61	2,283.78	2,449.78	0.83	0.86	0.90	0.98	0.98	0.91
Industri Pengolahan	23,999.81	24,687.29	26,266.20	27,819.14	28,911.93	0.26	0.25	0.25	0.24	0.23	0.25
Lisrik, Gas dan Air bersih	229.17	274.89	282.62	295.08	333.44	0.38	0.40	0.42	0.42	0.43	0.41
Bangunan	22,322.39	24,061.88	25,927.92	28,188.99	30,088.03	6.75	7.05	7.19	7.37	7.51	7.17
Perdagangan, Hotel dan Restoran	35,532.86	37,469.18	38,357.22	43,634.84	46,792.01	0.98	0.98	0.97	1.00	1.00	0.99
Pengangkutan dan komunikasi	22,002.68	22,444.23	22,979.58	24,310.75	27,842.40	6.28	6.54	6.71	6.55	6.80	6.58
Kewangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	17,208.26	17,934.13	18,475.57	18,995.75	20,722.42	4.67	4.90	5.00	4.93	4.95	4.89
Jasa-jasa	7,707.32	8,238.52	8,061.64	7,970.87	8,126.46	1.19	1.29	1.25	1.20	1.20	1.23
PDRB (juta rupiah)	178,156.99	185,615.81	192,836.07	209,084.81	224,814.69						
penduduk pertengahan tahun (jiwa)	36,666.00	36,804.00	36,929.00	37,032.00	37,025.00						
PDRB per kapita	4,858,915.25	5,043,359.60	5,221,805.98	5,646,057.86	6,071,969.97						

Lampiran 28. PDRB dan LQ Kecamatan Kroya

sektor	PDRB					LQ					rata-rata
	2001	2002	2003	2004	2005	2001	2002	2003	2004	2005	
Pertanian	75,681.14	77,083.42	78,619.93	77,571.59	89,015.24	1.45	1.69	1.58	1.58	1.75	1.61
Pertambangan dan Penggalian	0.00	0.00	4.42	5.32	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Industri Pengolahan	38,212.69	39,307.32	41,621.48	42,612.88	44,047.40	0.23	0.25	0.23	0.23	0.21	0.23
Listrik, Gas dan Air bersih	598.53	635.26	641.60	687.21	778.40	0.56	0.58	0.55	0.60	0.60	0.58
Bangunan	328.75	347.64	373.97	402.70	425.72	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
Perdagangan, Hotel dan Restoran	131,918.41	138,497.29	142,149.25	149,331.30	166,269.16	2.05	2.28	2.06	2.08	2.11	2.11
Pengangkutan dan komunikasi	20,496.38	20,907.67	21,058.19	22,278.02	25,074.50	3.29	3.83	3.53	3.64	3.64	3.59
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	13,602.50	13,906.66	14,303.22	14,565.39	15,452.69	2.08	2.39	2.22	2.30	2.19	2.23
Jasa-jasa	35,548.63	4,703.67	37,190.81	37,090.85	37,098.25	3.09	0.46	3.31	3.39	3.27	2.71
PDRB (juta rupiah)	316,387.03	295,388.94	335,962.89	344,545.25	378,167.13						
penduduk pertengahan tahun (jiwa)	100,921.00	101,300.00	101,661.00	101,238.00	101,326.00						
PDRB per kapita	3,134,996.99	2,915,981.60	3,304,737.17	3,403,319.43	3,732,182.58						

sektor	PDRB					LQ					rata-rata
	2001	2002	2003	2004	2005	2001	2002	2003	2004	2005	
Pertanian	94,966.64	96,915.75	99,783.68	98,518.01	115,082.92	2.94	3.08	3.19	3.24	3.58	3.21
Pertambangan dan Penggalian	0.00	0.00	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Industri Pengolahan	33,507.32	34,467.16	36,496.35	37,365.67	38,623.54	0.33	0.32	0.32	0.32	0.29	0.31
Listrik, Gas dan Air bersih	113.78	135.83	143.17	141.40	151.14	0.17	0.18	0.20	0.20	0.18	0.19
Bangunan	12,911.55	13,851.05	15,027.50	16,551.17	17,896.72	3.54	3.70	3.81	4.24	4.21	3.90
Perdagangan, Hotel dan Restoran	26,535.36	27,854.93	28,515.77	29,881.88	33,954.69	0.66	0.66	0.66	0.67	0.68	0.67
Pengangkutan dan komunikasi	1,521.92	1,552.47	1,679.04	1,777.93	1,954.77	0.39	0.41	0.45	0.47	0.45	0.43
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	8,494.49	8,810.39	9,138.59	9,518.51	10,614.28	2.09	2.19	2.26	2.42	2.39	2.27
Jasa-jasa	18,572.95	20,382.59	19,921.92	19,904.21	20,049.78	2.60	2.91	2.83	2.93	2.80	2.82
PDRB (juta rupiah)	196,624.01	203,970.19	210,717.06	213,658.77	238,327.85						
penduduk pertengahan tahun (jiwa)	63,265.00	63,587.00	63,983.00	63,453.00	63,769.00						
PDRB per kapita	3,107,943.01	3,207,734.08	3,293,328.79	3,367,197.30	3,737,362.22						

Lampiran 30. PDRB dan LQ Kecamatan Nusawungu

sektor	PDRB					LQ					
	2001	2002	2003	2004	2005	2001	2002	2003	2004	2005	rata-rata
Pertanian	98,355.85	100,967.99	104,608.81	97,062.98	107,286.04	2.52	2.65	2.76	2.78	3.01	2.74
Pertambangan dan Penggalian	9,893.09	11,317.63	11,566.57	8,934.23	9,531.41	3.87	4.04	3.97	3.26	3.25	3.68
Industri Pengolahan	52,829.85	54,343.20	57,006.05	56,954.79	59,152.78	0.43	0.41	0.41	0.42	0.40	0.41
Listrik, Gas dan Air bersih	113.78	134.17	140.74	142.93	157.10	0.14	0.15	0.16	0.17	0.17	0.16
Bangunan	5,490.55	5,818.44	6,257.26	6,741.53	7,130.78	1.25	1.28	1.31	1.50	1.51	1.37
Perdagangan, Hotel dan Restoran	28,186.01	30,044.19	31,024.63	30,337.10	33,226.90	0.58	0.59	0.59	0.59	0.60	0.59
Pengangkutan dan komunikasi	11,085.24	11,307.68	11,042.81	11,698.17	12,861.70	2.37	2.47	2.44	2.68	2.67	2.53
Kewangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	10,005.13	10,251.05	10,539.57	10,738.58	11,500.24	2.03	2.10	2.16	2.37	2.33	2.20
Jasa-jasa	21,676.69	23,231.83	22,795.08	23,142.73	23,607.88	2.51	2.74	2.67	2.96	2.97	2.77
PDRB (juta rupiah)	237,636.19	247,416.18	254,981.51	245,753.05	264,454.82						
penduduk pertengahan tahun (jiwa)	75,463.00	75,867.00	76,031.00	75,341.00	75,520.00						
PDRB per kapita	3,149,042.44	3,261,183.15	3,352,769.98	3,261,876.64	3,501,785.28						

Lampiran 31. PDRB dan LQ Kecamatan Cilacap Selatan

sektor	PDRB					LQ					
	2001	2002	2003	2004	2005	2001	2002	2003	2004	2005	rata-rata
Pertanian	85,773.16	87,688.10	91,208.06	83,839.10	69,796.73	0.92	0.95	1.00	0.91	0.79	0.91
Pertambangan dan Penggalian	32,650.43	37,351.86	40,980.33	49,342.95	52,347.88	5.33	5.51	5.82	6.84	7.19	6.14
Industri Pengolahan	270,213.07	277,953.59	287,837.02	305,087.84	315,358.24	0.91	0.87	0.86	0.86	0.86	0.87
Listrik, Gas dan Air bersih	27,883.65	32,808.13	32,344.00	32,887.42	36,221.63	14.59	14.77	15.17	15.30	16.12	15.19
Bangunan	12,290.22	12,981.13	14,269.24	15,364.74	16,242.54	1.16	1.18	1.24	1.30	1.39	1.25
Perdagangan, Hotel dan Restoran	64,219.47	68,788.63	68,646.47	75,668.96	77,424.37	0.55	0.56	0.54	0.56	0.57	0.56
Pengangkutan dan komunikasi	17,171.54	17,516.14	17,951.65	19,688.72	21,646.99	1.53	1.58	1.64	1.72	1.81	1.66
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	25,016.20	25,546.32	26,846.96	27,338.12	28,373.92	2.12	2.16	2.27	2.30	2.32	2.24
Jasa-jasa	34,689.60	37,552.78	36,727.44	36,974.87	37,755.07	1.68	1.83	1.78	1.80	1.92	1.80
PDRB (juta rupiah)	569,907.33	598,186.68	616,811.15	646,192.73	655,167.38						
penduduk pertengahan tahun (jiwa)	76,069.00	76,258.00	76,702.00	76,873.00	77,217.00						
PDRB per kapita	7,491,978.70	7,844,248.21	8,041,656.68	8,405,977.84	8,484,755.66						

sektor	PDRB					LQ					rata-rata	
	2001	2002	2003	2004	2005	2001	2002	2003	2004	2005		
Pertanian	9,015.45	9,193.86	9,676.05	8,202.24	7,981.40	0.16	0.16	0.17	0.15	0.15	0.15	0.16
Pertambangan dan Penggalian	5,097.24	5,831.20	3,198.82	3,851.58	4,086.15	1.35	1.39	0.75	0.90	0.92	0.92	1.06
Industri Pengolahan	127,103.77	130,744.80	134,631.72	137,838.52	142,774.15	0.70	0.66	0.67	0.65	0.64	0.64	0.66
Listrik, Gas dan Air bersih	5,302.68	6,282.19	6,309.33	6,379.74	6,982.12	4.52	4.58	4.90	4.98	5.07	5.07	4.81
Bangunan	21,361.28	22,686.38	24,407.65	26,176.65	27,561.69	3.29	3.34	3.50	3.72	3.85	3.85	3.54
Perdagangan, Hotel dan Restoran	61,693.60	65,796.27	66,415.77	70,837.72	74,393.81	0.86	0.86	0.87	0.88	0.89	0.89	0.87
Pengangkutan dan komunikasi	41,453.00	42,284.83	42,469.76	45,021.68	49,499.54	6.02	6.19	6.42	6.59	6.77	6.77	6.40
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	22,131.17	22,724.64	23,374.18	23,706.83	25,015.29	3.05	3.12	3.27	3.35	3.34	3.34	3.23
Jasa-jasa	56,908.73	64,050.50	62,411.26	62,694.16	63,083.14	4.48	5.05	5.01	5.13	5.23	5.23	4.98
PDRB (juta rupiah)	350,066.92	369,594.66	372,894.53	384,709.12	401,377.30							
penduduk pertengahan tahun (jiwa)	83,269.00	83,458.00	83,337.00	83,349.00	83,566.00							
PDRB per kapita	4,204,048.55	4,428,510.88	4,474,537.49	4,615,641.68	4,803,117.25							

sektor	PDRB					LQ					
	2001	2002	2003	2004	2005	2001	2002	2003	2004	2005	rata-rata
Pertanian	7,995.88	8,222.79	8,682.51	9,923.08	12,493.03	0.11	0.11	0.12	0.14	0.18	0.13
Pertambangan dan Penggalian	7,339.51	8,396.34	4,605.99	5,710.53	6,058.29	1.55	1.58	0.85	1.05	1.06	1.22
Industri Pengolahan	208,068.14	214,028.46	220,820.15	227,853.06	237,578.62	0.90	0.85	0.86	0.85	0.83	0.86
Listrik, Gas dan Air bersih	9,868.35	12,701.39	12,486.39	13,113.56	14,836.98	6.68	7.29	7.62	8.05	8.41	7.61
Bangunan	32,727.19	38,060.36	40,988.04	40,931.29	40,128.86	4.00	4.41	4.62	4.57	4.38	4.40
Perdagangan, Hotel dan Restoran	67,683.44	72,087.25	71,570.54	77,750.43	82,826.34	0.75	0.75	0.73	0.76	0.77	0.75
Pengangkutan dan komunikasi	25,452.63	25,963.40	26,133.05	27,805.79	30,745.55	2.93	2.99	3.10	3.20	3.28	3.10
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	21,735.96	24,439.76	25,162.87	23,763.31	25,048.69	2.38	2.64	2.77	2.64	2.61	2.61
Jasa-jasa	59,833.32	65,748.14	63,950.54	62,690.59	64,480.31	3.74	4.08	4.03	4.03	4.18	4.01
PDRB (juta rupiah)	440,704.42	469,647.88	474,400.09	489,541.65	514,196.67						
penduduk pertengahan tahun (jiwa)	58,764.00	59,327.00	59,856.00	63,276.00	65,232.00						
PDRB per kapita	7,499,564.65	7,916,258.73	7,925,689.84	7,736,608.73	7,882,583.24						

Lampiran 34. Perhitungan LQ rata-rata kecamatan di Kabupaten Cilacap 2001-2005

Lapangan Usaha	Kawasan Prioritas										Kawasan Bukan Prioritas												
	Kec CS	Kec CT	Kec CU	Kec DL	Kec Mjg	Kec Ptm	Kec SR	Kec Kry	Kec Smpg	Kec NW	Kec WR	Kec Cmg	Kec KP	Kec Cpr	Kec KR	Kec GM	Kec BS	Kec Kwrm	Kec JL	Kec Ksgh	Kec AP	Kec Maos	Kec Bngn
Pertanian	0.91	0.16	0.13	5.69	1.83	3.41	2.75	1.61	1.78	2.74	3.53	2.98	2.56	4.95	2.86	3.28	4.48	4.79	3.21	1.38	3.10	1.23	3.21
Pertambangan dan Penggalian	6.14	1.06	1.22	0.15	3.36	4.17	0.01	0.00	0.91	3.68	0.40	0.01	6.31	0.14	6.66	3.70	0.00	0.03	7.99	4.24	1.47	1.12	0.00
Industri Pengolahan	0.87	0.66	0.86	0.01	0.44	0.10	0.21	0.23	0.25	0.41	0.15	0.36	0.12	0.11	0.25	0.06	0.02	0.02	0.25	0.48	0.29	0.16	0.31
Listrik, Gas dan Air bersih	15.19	4.81	7.61	0.23	1.55	0.44	0.47	0.58	0.41	0.16	0.37	0.06	0.09	0.31	0.32	0.20	0.05	0.06	0.09	0.31	0.15	0.51	0.19
Bangunan	1.25	3.54	4.40	1.67	0.43	2.74	0.29	0.06	7.17	1.37	2.31	2.25	0.10	0.17	2.52	0.48	0.13	0.09	0.14	1.44	3.41	20.57	3.90
Perdagangan, Hotel dan Restoran	0.56	0.87	0.75	0.12	1.46	0.61	1.56	2.11	0.99	0.59	1.01	1.05	0.69	0.54	0.73	0.98	0.96	0.69	0.91	1.54	0.51	0.86	0.67
Pengangkutan dan komunikasi	1.66	6.40	3.10	0.88	2.28	2.91	4.01	3.59	6.58	2.53	1.33	1.65	0.52	0.88	1.25	1.37	0.86	1.00	1.45	2.62	5.37	1.69	0.43
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	2.24	3.23	2.61	1.37	2.27	3.67	1.41	2.23	4.89	2.20	2.03	2.07	3.07	2.05	4.22	4.09	2.22	2.78	1.36	2.53	2.29	1.50	2.27
Jasa-jasa	1.80	4.98	4.01	1.46	1.59	2.82	1.43	2.71	1.23	2.77	2.11	1.12	8.12	1.05	1.94	3.64	1.98	1.96	1.58	1.32	1.65	3.13	2.82

Keterangan :

CS = Cilacap Selatan, CT = Cilacap Tengah, CU = Cilacap Utara, DL = Dayeuhluhur, Mjg = Majenang, Ptm = Patimuan, SR = Sidareja, Kry = Kroya, Smpg = Sampang, NW = Nusawungu, WR = Wanareja, Cmg = Cimanggu, KP = Karangpucung, GM = Gandrungmangu, BS = Bantarsuri, Kwrm = Kawunganten, JL = Jeruklegi, Ksgh = Kesugihan, AP = Adipala, Maos, Bngn = Binarungun